



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIFITAS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
PADA EMPAT DESA DI KABUPATEN KARANGASEM
PROPINSI BALI**

TESIS

**DIDIEK SETIABUDI HARGONO
0706181536**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIFITAS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
PADA EMPAT DESA DI KABUPATEN KARANGASEM
PROPINSI BALI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**DIDIEK SETIABUDI HARGONO
0706181536**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Didiek Setiabudi Hargono
NPM : 0706181536
Tanda Tangan :
Tanggal : 13 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : **Didiek Setiabudi Hargono**
NPM : **0706181536**
Program Studi : **Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik**
Judul Tesis : **EFEKTIFITAS PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA PADA EMPAT DESA DI KABUPATEN
KARANGASEM - PROPINSI BALI**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Desy Fernanda MSoc, Sc. ()
Penguji : DR. Sonny Harry B. Harmadi ()
Penguji : Hera Susanti SE. MSc. ()

Ditetapkan di : Salemba, Jakarta
Tanggal : 13 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada saya kesabaran yang luar biasa, hingga akhirnya tesis yang telah lama saya buat ini dapat selesai. Walaupun terjadi perpanjangan masa kuliah yang disebabkan karena belum terselesaikannya beberapa bidang studi, pada akhirnya tugas mengikuti perkuliahan dalam program kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah ini dapat diselesaikan.

Ketertarikan saya kepada bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik dikarenakan tergeraknya hati saya untuk memahami penderitaan rakyat yang sejak reformasi bergulir tidak kunjung lebih baik. Masalah-masalah mendasar rakyat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan masih jauh dari harapan yang diinginkan.

Untuk itulah saya berniat mendalami bidang studi ekonomi keuangan negara dan daerah dengan tujuan agar dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut.

Pemilihan tema tesis yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan desa, bertujuan untuk langsung menukik kepada permasalahan yang paling mendasar dan langsung bersentuhan dengan rakyat yang menjadi obyek dari kebijakan pemerintahan. Otonomi daerah yang telah diterapkan memberikan akses positif dan juga negatif kepada rakyat. Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan satu potongan kecil dari “*puzzle*” kesejahteraan rakyat yang tengah disusun oleh kita semua.

Pemilihan lokasi penelitian di daerah Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, disebabkan karena hingga saat ini Kabupaten Karangasem merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang masih masuk ke dalam daerah tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu struktur pemerintahan Desa di Propinsi Bali masih kuat pengaruh adat setempat, terbukti masih bertahannya Desa Dinas dan Desa Adat.

Saya sangat menyadari, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin saya menyelesaikan kuliah dan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ucapan terimakasih pertama, saya haturkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemudahan pikiran dan ketabahan hati yang luar biasa selama studi dan penulisan tesis ini. Juga kepada rakyat Indonesia yang

secara tidak langsung memberikan inspirasi dan dorongan semangat yang tidak putus-putusnya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada :

1. Seluruh pengurus Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI), tempat dimana saya membaktikan tenaga dan pikiran, serta mengamalkan segala ilmu yang saya dapat, yang telah mendukung kuliah saya dan membantu dana pendidikan.
2. Secara khusus ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri yang telah memberikan ijin saya melanjutkan studi ini, memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti, yang memberikan persetujuan atas pembiayaan kuliah ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI).
3. Pembimbing saya, Bapak Drs. Desy Fernanda MSoc.Sc. yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing saya. Kesabarannya membimbing sungguh merupakan berkah yang tak terhingga. Di tengah kesibukannya sebagai pimpinan di Lembaga Administrasi Negara, beliau masih menyempatkan memeriksa tesis ini dalam waktu yang sangat cepat.
4. Dewan penguji tesis, Bapak DR. Sonny Harry B. Harmadi dan Ibu Hera Susanti SE. MSc. dan Bapak DR. Andi Fahmi Lubis yang telah memberikan masukan dan perbaikan yang sangat berarti bagi kesempurnaan tesis ini.
5. Orangtua kandung saya, Bapak Drs. Djoko Hargono dan Ibu Hariningsih yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan saya dan keluarga untuk selalu dibimbing ke jalan yang benar. Kasih sayang keduanya kepada saya tak terhitung. Bapaklah yang selalu mengatakan bahwa kesuksesannya sebagai orangtua tercapai, ketika anak-anaknya jauh melebihi ayahnya dalam segala hal, terutama dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan.
6. Juga kepada Alm. Mayjen (Purn.) Hernowo Asmanoe dan Ibu Wahyu Hidayatin, mertua saya terkasih, yang selalu tak henti-henti menasehati dan memberi perhatian khusus. Ayah mertua saya semasa hidup menjadi tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman hidup. Tugas saya saat ini adalah mengisi kemerdekaan yang telah beliau rebut agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.
7. Istri tersayang Yakti Rizkinanda SS. MSi. dan keempat anak-anakku, Panji Bagaskoro Wisnumurti, Bayu Anindito Wicaksono, Raditya Dyaksa Widikrama, dan Dyah Madysta Ayu Wirati. Mereka memberi semangat seribu api yang berkobar, sehingga segala tantangan apapun tak gentar saya hadapi.

8. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar di MPKP – Fakultas Ekonomi UI yang telah bersedia menjadi “*pelita dalam kegelapan*”. Ilmu yang telah diberikan akan saya amalkan untuk kepentingan rakyat.
9. Teman-teman kuliah angkatan VII Sore MPKP – FEUI yang sudah bersama-sama menghabiskan waktu bersama berjam-jam di ruang kuliah menuntut ilmu selama empat semester dari tahun 2007 hingga tahun 2009.
10. Teman-teman di YKRI dan Griya Anggrek Kebun Raya Bogor yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mbak Ir. Eka Ratna, Ir. Heny Kristianti, serta khusus untuk Alm. Tati Hartati yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini. Beliau sudah lebih dahulu menghadap Sang Khalik, tanpa pernah sempat membaca buku ini. Mbak Jo Anes yang selalu saya repotkan berkaitan dengan kuliah saya ini. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan teman-teman.
11. Para pejabat daerah di Kabupaten Karangasem, tempat penelitian saya lakukan. Bapak Bupati, Camat, dan Perbekel di empat Desa dan Empat Kecamatan. Juga kepada keluarga Bapak I Wayan Narka, yang telah menganggap saya sebagai anak sendiri dan menyediakan tempatnya yang hangat selama penelitian di Karangasem – Bali.
12. Bapak Francisco Nunes Dos Santo SE. dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem – Bali yang berkenan memberikan data-data statistik yang saya perlukan dengan lengkap, serta sebagai teman untuk berdiskusi yang baik.
13. Kepada teman-teman setetangga di Kemang Pratama III, Bekasi Barat yang sudah saya anggap saudara sendiri. Mereka adalah sahabat di kala senang dan susah, teman yang memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah saya.
14. Terakhir saya sampaikan terimakasih kepada teman-teman Staf Administrasi MPKP FEUI, yang selalu dapat bekerjasama dengan baik dalam memperlancar proses belajar mengajar di kelas. Tanpa bantuan dari Bp. Triman, Bp. Harris dll., tidak mungkin selancar ini kuliah dan penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga buku ini dapat menjadi bagian kecil untuk melengkapi khazanah ilmu pengetahuan di tanah air tercinta, Indonesia dan juga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.

Salemba, 08 Januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Didiek Setiabudi Hargono**
NPM : **0706181536**
Program Studi : **Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik**
Fakultas : **Ekonomi**
Universitas : **Indonesia**
Jenis karya : **Tesis**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EFEKTIFITAS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA EMPAT
DESA DI KABUPATEN KARANGASEM PROPINSI BALI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba - Jakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2010

Yang menyatakan

Didiek Setiabudi Hargono

ABSTRAK

Nama : **Didiek Setiabudi Hargono**
Program Studi : **Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik**
Judul : **EFEKTIFITAS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA EMPAT DESA DI KABUPATEN KARANGASEM, PROPINSI BALI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa pada empat desa sampel di empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali dan disparitas (kesenjangan) pembangunan antar kecamatan. Perhitungan kuantitas Alokasi Dana Desa yang diterima tiap daerah harus sesuai dengan formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan variabel, yaitu variabel-variabel yang berhubungan dengan karakteristik desa, seperti variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah PBB desa serta variabel jumlah komunitas di desa, yaitu dusun, yang dihasilkan oleh masing-masing desa di Kabupaten Karangasem. Indikator efektifitas dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi desa yang diprosikan pada PDRB Kecamatan, serta kecilnya tingkat disparitas (kesenjangan) antar wilayah kecamatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem dan Propinsi Bali, Data Alokasi Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Karangasem, serta Data Monografi Desa dan Kecamatan pada empat desa, yaitu Desa Pempatan, Desa Selat, Desa Bebandem, dan Desa Tenganan.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu formula Alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, sedangkan untuk menghitung disparitas (kesenjangan) pembangunan antar wilayah digunakan Indeks Williamson dan analisa Tipologi Klassen.

Hasil yang diperoleh bahwa besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD Proporsional). Hasil perhitungan ini dianggap tidak adil bagi Desa, sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyaluran ADD. Pemanfaatan ADD tidak disalurkan pada bidang-bidang yang dapat menggerakkan ekonomi desa. Ketidakefisienan ini menyebabkan kecenderungan berasosiasi dengan disparitas yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson yang mendekati satu, yaitu : $Iw_{2004} = 0.378$, $Iw_{2005} = 0.389$, $Iw_{2006} = 0.404$, $Iw_{2007} = 0.410$, dan $Iw_{2008} = 0.421$ yang berarti semakin timbul kesenjangan. Analisa Tipologi Klassen, menunjukkan bahwa pembangunan selama tahun 2004-2008 mengelompokan kecamatan Karangasem dan Manggis pada kuadran daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, sedangkan kecamatan Sidemen, Selat, Rendang, Kubu, Abang, dan Bebandem pada kuadran relative tertinggal.

Kata kunci: *Alokasi Dana Desa, Disparitas Pembangunan Antar Wilayah, Indeks Williamson, Analisa Tipology Klasson, Kabupaten Karangasem*

ABSTRACT

Name : **Didiek Setiabudi Hargono**
Study Program : **Master in Planning and Public Policy**
Title : **THE EFFECTIVENESS OF THE DISTRIBUTION OF GRANT ALLOCATION FOR VILLAGES AT FOUR VILLAGES IN KARANGASEM, BALI**

This research attempts to figure out the effectiveness of the distribution of Grant Allocation for Villages in four villages as sample in four different subdistricts in Karangasem Regency, Bali and disparity in development among subdistricts. The calculation of quantity for "Village Grant Allocation" received by every district has to be match with "Village Grant Allocation" formula using variables related to the characteristics of a village such as poverty, education, health, access to the village, population, the width of the area, and the number of the PBB and the number of the communities in the village i.e., orchard made by each village in Karangasem Region. The indicators of the effectiveness can be seen from the decrease of poverty level and an increase in economy growth of the village by proxy to PDRB of the subdistrict, and also low level of disparity among subdistrict.

Data used in this research are from Central Bureau of Statistics (BPS) Karangasem Region and the Province of Bali, Data of Village Grant Allocation from the Board of Community Empowerment and Village Development (BPMPD) Karangasem Region, and Data of Village and Subdistrict Monograph of four villages, namely Pempatan, Selat, Bebandem, and Tenganan.

Three kinds of analysis tools are used in this research i.e., the formula of Village Grant Allocation which is in line with Minister of Home Affairs Decree No. 140/640/SJ the year 2005 about Village Grant Allocation from the local government of region to the local government of the village/district. Meanwhile, to count disparity in development among districts, the tools used are Williamson Index and Klassen analysis in Typology.

The result shows that the amount of Village Grant Allocation given to every village didn't use formula which is determined by weighing seven important variables of the villages, but it uses division of the total number of the villages in the region to determine ADDM (equal ADD) and division of the number of official "banjar" to determine ADDP (Proportional ADD). The result of this calculation is considered unfair for the villages, so it makes ADD distribution ineffective. ADD is not distributed on the fields that can drive the economy of the village. This inefficiency has caused the tendency of associating with disparity as shown by the score of Williamson Index which is close to 1, i.e.: $Iw_{2004} = 0.378$, $Iw_{2005} = 0.389$, $Iw_{2006} = 0.404$, $Iw_{2007} = 0.410$, and $Iw_{2008} = 0.421$ which means that there is greater disparity. The analysis of Klassen Typology shows that the development from 2004 to 2008 grouped Karangasem Region and Manggis into the quadrant of areas which easily develop and grow, while subdistricts like Sidemen, Selat, Rendang, Kubu, Abang, and Bebandem are in quadrant of areas which are relatively left behind.

Key words: *Village Grant Allocation, Disparity in Development Among Districts, Williamson Index, Klassen Typology Analysis, Karangasem Region*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Hipotesa Penelitian	8
1.6. Metodologi Penelitian.....	9
1.7. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.8. Manfaat Penelitian	10
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Kebijakan Otonomi Daerah (Desentralisasi).....	11
2.2. Pemerintah Desa dan Otonomi Desa	18
2.3. Alokasi Dana Desa	26
2.4. Efektifitas Pengalokasian Dana Desa	29
2.5. Penentuan Sektor Basis Dalam Ekonomi Regional Dengan Analisa “ <i>Location Quotient</i> ”	32
2.6. Disparitas (Ketimpangan) Pembangunan Antar Wilayah	33
2.7. Keragaman Desa di Indonesia.....	42
3. METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1. Jenis dan sumber data.....	46
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	47
3.3. Analisis Data	47
3.4. Alat Analisa.....	48
3.5. Langkah-Langkah Penelitian.....	48
3.5.1. Pemilihan Lokasi Penelitian.....	48

3.5.2.	Perhitungan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Karangasem.....	49
3.5.3.	Penentuan Sektor Basis Kabupaten Karangasem Dengan Analisa "Location Quotient"	51
3.5.4.	Perhitungan Kesenjangan (Disparitas) Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Dengan "Williamson Index"	53
3.5.5.	Perhitungan Analisa "Klassen Typology"	54
4.	GAMBARAN UMUM	56
4.1.	Bali Sebagai Contoh Pelaksanaan Desa Otonom	56
4.2.	Kabupaten Karangasem Sebagai Subyek Penelitian	61
4.3.	Kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali	65
5.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
5.1.	Hasil Penelitian Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem, Bali	69
5.2.	Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karangasem.....	70
5.2.1.	Proses Penentuan Alokasi Dana Desa Per Desa	70
5.2.2.	Proses Penyaluran Alokasi Dana Desa.....	75
5.2.3.	Proses Penggunaan Alokasi Dana Desa	77
5.2.4.	Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Karangasem dan Permasalahannya	83
5.3.	Penentuan Sektor Basis Kabupaten Karangasem	86
5.4.	Kesenjangan (Disparitas) Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah.....	89
5.5.	Analisis "Klassen Typology" Kecamatan-Kecamatan Di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.....	96
6.	KESIMPULAN DAN SARAN	100
6.1	Kesimpulan.....	100
6.2	Saran-Saran.....	101
	DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

•	Tabel	2.1
	Perbandingan Isi UU No 22 Tahun 1999 dengan UU No 32 Tahun 2004.....	16
•	Tabel	2.2.
	Tipologi Desa-Desa di Indonesia.....	43
•	Tabel	2.3.
	Jumlah Wilayah Administratif di Pulau Jawa dan Bali	45
•	Tabel	3.1.
	Bobot Variabel Penghitung Alokasi Dana Desa	51
•	Tabel	3.2.
	Perhitungan Angka Bobot	51
•	Tabel 4.1.	
	PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Selama Tahun 1993 – 2006.....	60
•	Tabel	4.2.
	Kecamatan dalam Kabupaten Karangasem dan Luas Wilayahnya.....	62
•	Tabel 4.3.	
	Demografi Kabupaten Karangasem Tahun 2008.....	63
•	Tabel 4.4.	
	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.....	64
•	Tabel 4.5.	
	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Propinsi Bali Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 1999-2009	65
•	Tabel 4.6.	
	Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Di Propinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2007	67
•	Tabel 4.7.	
	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin 2004 – 2008.....	68
•	Tabel 5.1.	
	Penerimaan Alokasi Dana Desa di Empat Desa, Kabupaten Karangasem - Bali Tahun 2007 - 2009.....	72
•	Tabel 5.2.	
	Contoh Perhitungan ADD Tahun 2007 di Kabupaten Karangasem	74
•	Tabel 5.3.	
	Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	78
•	Tabel	5.4.
	Beberapa Data Penggunaan ADD Desa Selat Kecamatan Selat.....	81
•	Tabel	5.5.
	Pembagian Penggunaan Dana ADD Di Desa Selat Tahun 2007-2009....	82
•	Tabel	5.6.
	Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kab. Karangasem.....	83
•	Tabel	5.7.
	Hasil Perhitungan Indeks “ <i>Location Quotient</i> ” Kabupaten Karangasem..	87

•	Tabel	5.8.
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tanpa Migas 2004-2008	90
•	Tabel	5.9.
	Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Karangasem 2004-2008.....	91
▪	Tabel	5.10.
	Indeks Williamson Kabupaten Karangasem Tahun 2004 – 2008.....	91
•	Tabel	5.11
	Laju Pertumbuhan PDRB Kecamatan di Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tanpa Migas , 2004-2008.....	97

DAFTAR GRAFIK

•	Grafik 4.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Propinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.....	58
•	Grafik 4.2.	Perkembangan Penduduk Miskin Di Indonesia Dari Tahun 1970-2009	74
•	Grafik 4.3.	Indeks Kemiskinan Propinsi Bali Berdasarkan Podes Tahun 2005.....	75
•	Grafik 4.4.	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Propinsi Bali (1996-2009).....	79
•	Grafik 5.1.	Indeks Williamson Kabupaten Karangasem Tahun 2004-2008.....	92



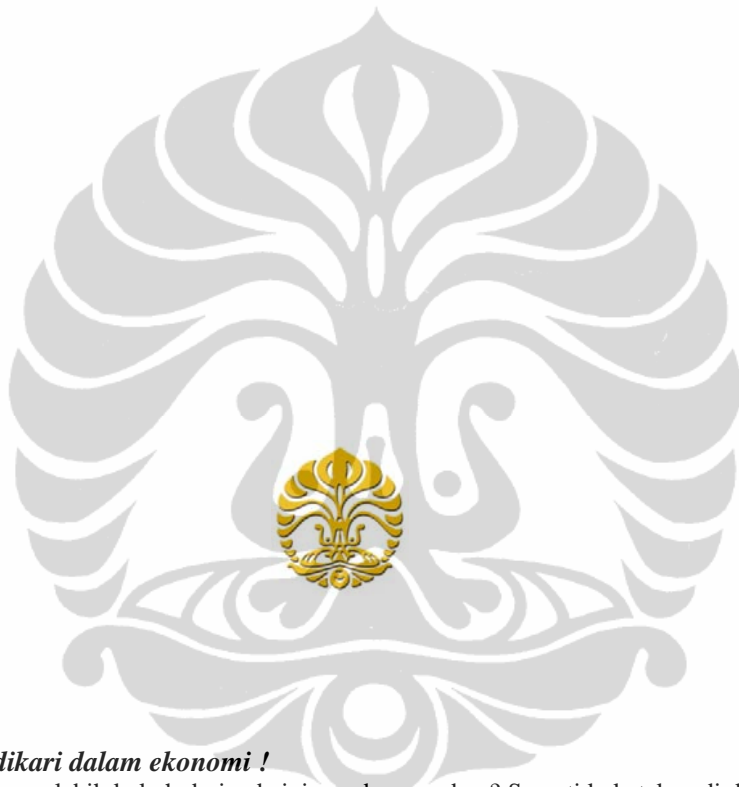
DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1. Siklus Perencanaan dan Pengendalian 34
- Gambar 2.2. Hipotesa Neo-klasik (Kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf “U” terbalik (reserve U-shaped curve)).. 39
- Gambar 3.1. Klasifikasi Pertumbuhan Menurut Analisa Tipologi Klassen..... 55
- Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Karangasem..... 61
- Gambar 5.1. Peta Lokasi Penelitian Di Empat Desa Kabupaten Karangasem, Bali... 69
- Gambar 5.2. Klasifikasi Kecamatan di Kabupaten Karangasem – Bali Menurut Tipologi Klassen, 2004-2008..... 98



DAFTAR LAMPIRAN

• Lampiran 1. Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2007.....	107
• Lampiran 2. Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2008	108
• Lampiran 3. Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2009.....	109
• Lampiran 4. Alokasi Dana Desa Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2009.....	110
• Lampiran 5. Desa-Desa di Kabupaten Karangasem	111
• Lampiran 6. Contoh Perhitungan Alokasi Dana Desa Menurut Pemerintah Pusat....	112
• Lampiran 7. Contoh Perhitungan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karangasem....	116
• Lampiran 8. Cara Perhitungan “ <i>Williamson Index</i> ”.....	117
• Lampiran 9. Cara Perhitungan “ <i>Location Quotient</i> ”.....	118



”Berdikari dalam ekonomi !

Apa yang lebih kokoh daripada ini, saudara-saudara? Seperti kukatakan di depan MPRS tempo hari, kita harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah ada di tangan kita dan menggunakannya semaksimal-maksimalnya. Pepatah lama *”ayam mati dalam lumbung”* harus kita akhiri, sekali dan buat selama-lamanya. Kita memiliki segala syarat yang diperlukan untuk memecahkan masalah sandang pangan kita. Barangsiapa merintangi pemecahan masalah ini, dia harus dihadapkan ke depan mahkamah rakyat dan sejarah.

Alam kita kaya raya, rakyat kita rajin, tetapi selama ini hasil keringatnya dimakan oleh tuan-tuan tanah, tengkulak-tengkulak, lintah-lintah darat, tukang-tukang ijon, dan setan-setan desa lainnya. Sudah cukup usahaku memberi kesempatan kepada kaum yang ragu ragu dalam revolusi, untuk merubah diri; aku sudah sangat sabar, sudah kutunjukkan kesabaran seorang bapak, tetapi kesabaranku ada batasnya, apalagi kesabaran rakyat!

Sudah cukup usahaku memberi kesempatan bagi pelaksanaan *landreform*; batas waktunya malahan sudah kutunda, dan kalau perlu aku bersedia memperpanjangnya dengan satu tahun lagi; aku sudah sangat sabar, sudah kutunjukkan kesabaran seorang bapak, tapi kuulangi lagi; kesabaranku ada batasnya, apalagi kesabaran rakyat!

Sudah cukup usahaku memberi kesempatan dewan-dewan perusahaan supaya berjalan, tapi di banyak tempat dewan-dewan itu masih macet saja; aku sudah sangat sabar, sudah kutunjukkan kesabaran seorang bapak, tetapi kesabaranku ada batasnya, apalagi kesabaran rakyat!

Hanya dengan mengatasi kemacetan-kemacetan inilah kita bisa menerapkan asas Berdikari dalam ekonomi !”

Soekarno.

***Pidato Presiden Republik Indonesia DR. Ir. Soekarno
berjudul "Capailah Bintang-Bintang Di Langit"
Istana Merdeka-Jakarta, Selasa Legi, 17 Agustus 1965 pukul 08.20.***



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonominya secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era reformasi sebagai respon dari tuntutan penerapan desentralisasi pemerintahan, dikeluarkanlah UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 1999. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan implementasi reformasi sistem pemerintahan di Indonesia terutama dalam mengelola hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan juga merupakan landasan hukum penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang menggeser dominasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Menurut UU Nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom dan tidak dirangkap dengan wilayah administrasi. UU Nomor 22 tahun 1999 meningkatkan efektifitas kontrol legislatif terhadap eksekutif begitu ketat sehingga peluang penyelewengan kekuasaan eksekutif makin sempit, sedangkan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah daerah makin diperluas, khususnya dalam penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure).

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, sistem kebijakan fiskal menyangkut transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yaitu berbentuk Sumbangan Daerah Otonom (SDO) dan INPRES. Sedangkan saat ini menurut UU Nomor 25 tahun 1999, penerimaan daerah terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang umumnya bersumber dari pajak daerah, retribusi dan laba BUMD.

- b) Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana BPHTB, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c) Pinjaman Daerah.

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, memungkinkan sebuah perbaikan dari undang-undang tersebut dengan menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU. No 33 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004.

Tujuan umum dari kebijakan otonomi daerah/desentralisasi ini adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

Dengan adanya undang-undang tersebut, maka pelimpahan atau pemberian sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah kabupaten/kota, bertujuan untuk pemberdayaan pemerintah daerah agar fungsi dari organisasi pemerintahan (organisasi publik) menjadi lebih efisien dan efektif, yaitu dengan mendekati diri dan mendekati kebutuhan/pelayanan masyarakat lokal.

Kebijakan otonomi daerah meliputi berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi yang berkaitan dengan dukungan sumberdaya (resources) yang memadai dan cukup agar otonomi tersebut dapat berhasil. Untuk itu dilakukan kebijakan desentralisasi fiskal, yang tujuannya adalah meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dan sebagai langkah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi yang dapat berimplikasi langsung dan berpengaruh terhadap keuangan daerah (APBD).

Pemerintahan Desa yang merupakan sistem pemerintahan yang terbawah di dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mengalami reformasi dalam era otonomi daerah ini. Dalam UU No.22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif. Kedudukan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Berbeda dengan UU No.5 Tahun 1979

yang sama sekali tidak memberikan hak kepada pemerintahan desa atau kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Kedudukan pemerintahan Desa diperkuat lagi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan Pemerintah Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat.

Dengan kedudukannya tersebut, saatnya pemerintah Desa berupaya melakukan pembenahan menuju arah kemandirian desa. Pasal 215 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 pun secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi desa telah didudukkan sebagai komponen pelaksana pembangunan yang sangat penting.

Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Selanjutnya bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk

Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Kabupatenlah yang berkewajiban untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Pendapatan itu bisa bersumber lagi dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Selanjutnya regulasi juga membolehkan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya desa sesungguhnya telah didorong, diupayakan dan diharapkan menjadi mandiri dan berdikari. Apalagi bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harusnya menjadikan desa benar-benar sejahtera.

ADD diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan dan dengan dilandasi oleh keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima. Sebagai acuan bagi daerah untuk menghitung besarnya ADD yang harus disalurkan kepada pemerintahan Desa, dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa”. Formula yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan tujuh variabel yaitu jumlah penduduk miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini mengambil topik utama mengenai Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk melihat apakah dengan diberlakukannya kebijakan Alokasi Dana Desa yang mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2007, tujuan diselenggarakannya kebijakan ini dapat mencapai sasaran. Seharusnya apabila sasaran penggunaan ADD ini dapat menggerakkan roda perekonomian Desa, maka pembangunan Desa akan semakin meningkat dan hal ini akan berpengaruh secara keseluruhan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruta Kabupaten Karangasem. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar wilayah di Kabupaten Karangasem, Bali.

Pemilihan lokasi penelitian di Bali berdasarkan beberapa hal, diantaranya adalah : Pertama, adalah bahwa bentuk Desa di Bali masih terjaga hingga kini, walaupun jaman bergerak menjadi lebih modern. Kedua, Kabupaten Karangasem Propinsi Bali merupakan kabupaten yang terendah pertumbuhannya dan juga ada beberapa desa yang masih termasuk ke dalam desa tertinggal di Indonesia. Ketiga, kondisi Bali mempunyai keunikan khusus dalam sistem pemerintahan Desanya, yaitu adanya dua bentuk desa, yaitu :

- Desa Dinas, yaitu desa yang bertugas melakukan kegiatan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, atau (merupakan 'kepanjangan tangan dari pemerintah').
- Desa Adat, yaitu desa yang mempunyai fungsi mengkoordinir kegiatan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan agama Hindu seperti upacara *Ngaben*, perkawinan dan lain-lain.

Peran Desa Dinas dan Desa Adat selama ini di Bali tidak pernah menimbulkan konflik atau benturan-benturan sosial dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan/pembagian peran yang dimiliki oleh desa dinas dan desa adat. Masing-masing desa mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan hal ini diperkuat dengan keberadaan aparat desa yang berbeda-beda pula (aparat desa dinas berlainan dengan

aparatus desa adat). Selain itu faktor yang juga menentukan adalah adanya dukungan masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Kebijakan otonomi daerah/desentralisasi, termasuk otonomi desa bertujuan untuk memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di tingkat daerah. Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

Agar pelaksanaan tugas yang diserahkan kepada desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel, guna mencapai tujuan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa, maka perlu dilakukan suatu upaya yang sistematis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan, berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya dukungan supradesa (Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan, personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal memegang peranan penting dalam otonomi daerah karena keberhasilan dan pencapaian tujuan desentralisasi tergantung dari berjalannya desentralisasi fiskal. Pemerintah Desa dalam otonomi desa harus disandarkan pada prinsip keragaman, demokrasi, akuntabilitas, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan utama dalam pemerintahan desa di era otonomi daerah adalah kedudukan dan kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, demokrasi desa – khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa, serta birokrasi desa (sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dan lain-lain).

Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana ADD tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Doller & Wallis, 2001 dalam

Ahmad Erany Yustika, 2008). Efisiensi, berhubungan dengan manajemen sumberdaya, sedangkan efektifitas yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesesuaian, pencapaian, dan mutu.

Meskipun ADD telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun masih banyak daerah yang belum melakukannya. Seharusnya proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju otonomi desa yang efisien dan efektif, sambil terus menata “capacity building system” dan struktur kelembagaan desa agar terbina SDM yang mampu mengatur desa dengan aspiratif, transparan dan akuntabel.

Dalam penentuan kuantitas besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaannya. Pemerintah kabupaten yang wilayahnya terdiri dari beberapa desa harus menentukan besarnya ADD sesuai dengan karakter desanya masing-masing dengan menekankan tujuan yang akan dicapai. Apabila Pemerintah Kabupaten mempunyai visi pengentasan kemiskinan, maka sistem penentuan kuantitas ADD disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada desa dan juga ditekankan pada infrastruktur penunjang berjalannya roda ekonomi desa.

Karakter desa dapat ditunjukkan dengan memperlihatkan tujuh faktor yaitu : kemiskinan (jumlah penduduk miskin), pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Penentuan besarnya kuantitas Alokasi Dana Desa seharusnya tidak dilakukan dengan cara “top down”, tetapi secara “bottom up”. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa atau “Musrenbangdes” yang diselenggarakan untuk menampung aspirasi rakyat secara demokratis, jangan hanya dipakai sebagai simbol demokrasi semata. Hasil Musrenbangdes kadang-kadang tidak sepenuhnya diwujudkan dalam APBD oleh pemerintah daerah setempat, sehingga kadangkala terjadi bias. Kalaupun dipergunakan maka karakteristik masing-masing desa harus menjadi pijakan utama untuk menentukan besarnya anggaran, Walaupun suatu desa jumlah penduduknya sama dan juga luas wilayahnya hampir sama, tetapi apabila jumlah penduduk

miskinnya berbeda, dan bahkan budaya masyarakatnya berbeda, maka besarnya anggaran harus berbeda. Konsep “bottom up” yang artinya lebih menekankan aspirasi suara bawah memang seharusnya menjadi sistem yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam penentuan besarnya Alokasi Dana Desa.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

“Apakah penyaluran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Kabupaten Karangasem telah memacu pertumbuhan pembangunan ekonomi Desa dan menurunkan disparitas (kesenjangan) pembangunan ekonomi antar wilayah di tingkat Desa dengan proksi pada tingkat Kecamatan dapat berkurang? “

1.4 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.4.1 Menilai efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Desa yang meliputi perencanaan, pencairan dana, hingga pemanfaatan Alokasi Dana Desa di wilayah desa terkait.
- 1.4.2 Menilai tingkat pertumbuhan pembangunan ekonomi antar desa dan disparitas (kesenjangan) pembangunan ekonomi antar wilayah di tingkat Desa dengan proksi pada tingkat Kecamatan.

1.5 Hipotesa Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Jika penyaluran Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan perhitungan yang ditentukan oleh perundang-undangan, dan efektif, maka pembangunan ekonomi Desa akan meningkat dan disparitas (kesenjangan) pembangunan ekonomi antar wilayah di tingkat Desa dengan proksi pada tingkat Kecamatan akan semakin kecil”.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel yang berhubungan dengan karakteristik desa, seperti variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah PBB desa serta variabel jumlah komunitas di desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem; BPS Propinsi Bali; Kecamatan Rendang, Selat, Bebandem, dan Manggis; Desa Pempatan, Selat, Bebandem, dan Tenganan; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa – Kabupaten Karangasem.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah formula Alokasi Dana Desa sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa untuk menilai apakah ADD yang diberikan untuk setiap Desa sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan sektor yang merupakan kekuatan suatu daerah digunakan Analisa “*Location Quotient*”. Sedangkan untuk menghitung ketimpangan (disparitas) pembangunan ekonomi antar wilayah digunakan *Index Williamson* dan juga Analisa “*Typologi Klassen*”.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan sebagai “*block grant*” dari pemerintah dengan tujuan sebagai stimulant untuk menggerakkan ekonomi desa dalam menunjang ekonomi perkotaan. ADD yang diterima oleh pemerintah Desa selanjutnya dimasukkan ke dalam pendapatan Desa.

Perhitungan besarnya jumlah yang diterima setiap Desa didasarkan pada azas adil dan merata. Untuk itu formula yang dipergunakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa”. Dengan demikian seharusnya di setiap Kabupaten di Indonesia, perhitungannya dilakukan seragam.

Penggunaan ADD merupakan permasalahan tersendiri, mengingat beragamnya kebutuhan yang harus diperbaiki dan dipenuhi Desa. Melalui Musyawarah

Perencanaan dan Pembangunan Desa (MusrenbangDes), penggunaan dana tersebut ditentukan, sehingga tujuan yang hendak dicapai efektif dan efisien dilaksanakan.

Dampak dari program ADD yang baru efektif berjalan pada tahun 2007 ini diharapkan cukup besar dalam mengangkat perekonomian Desa. Perlu diamati indikator-indikator berhasilnya program ADD sebagai tolok ukur.

1.8 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Alokasi Dana Desa (ADD) ini mudah-mudahan bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan publik.

- 1.8.1 Untuk para pengambil keputusan di daerah dapat mengetahui pengaruh perhitungan ADD dengan formula yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap bertumbuhnya perekonomian desa. Selain daripada itu juga untuk mengetahui apakah penyaluran Alokasi Dana Desa sudah efektif, sehingga dapat meminimalkan disparitas (kesenjangan) pembangunan ekonomi antar wilayah di daerahnya.
- 1.8.2 Untuk masyarakat pelaku ekonomi pedesaan dapat mengetahui pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang efektif, sehingga akan berdampak positif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi pedesaan.
- 1.8.3 Untuk civitas akademika, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan atau penelitian yang terkait, terutama yang mempunyai fokus terhadap pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Otonomi Daerah (Desentralisasi)

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah menjadi lebih handal dan professional dalam melayani publik. Selain itu juga meningkatkan kemampuan daerah untuk mengelola sumberdaya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan dapat menggunakan pendekatan sentralistis atau pendekatan desentralistis. Pendekatan pembangunan daerah yang digunakan pada masa Orde Baru adalah melalui pendekatan sentralistis, dimana pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di pusat. Pendekatan ini akhirnya memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang korup tanpa pengawasan, yang berakhir pada jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998.

Orde Reformasi kemudian melakukan beberapa koreksi atas kegagalan pendekatan pembangunan nasional dan daerah dengan menggunakan pendekatan desentralistis, dimana pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah (pemerintahan daerah) secara otonom, melalui suatu kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi yang mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2001 dengan dilandaskan pada TAP MPR No. XV/MPR/1998, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 1999, guna merespon tuntutan penerapan desentralisasi pemerintahan. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan implementasi reformasi sistem pemerintahan di Indonesia terutama dalam mengelola hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan juga merupakan landasan hukum penerapan system otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang menggeser dominasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Pergeseran ini memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi daerah untuk meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pemerintahannya serta meningkatkan akselerasi pembangunan didaerahnya.

Tujuan umum dari kebijakan otonomi daerah/desentralisasi sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah :

1. Memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) di daerah dalam pelayanan publik, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
3. Menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah dengan daerah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah;
4. Menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.
5. Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung ekonomi nasional

Menurut Juli Panglima Saragih (2003) salah satu tujuan dari kebijakan otonomi daerah/desentralisasi adalah memberdayakan masyarakat lokal (setempat) sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (*choices*) yang dapat dilakukan masyarakat.

Salah satu aspek yang mendukung berhasilnya kebijakan otonomi daerah (*desentralisasi*) adalah aspek ekonomi, yaitu perlunya dukungan sumberdaya (*resources*) yang memadai dan cukup. Untuk itu dikeluarkanlah kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan “efektifitas” penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta sebagai langkah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah – untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik – sesuai dengan

banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai dengan kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah, serta kondisi setiap daerah.

Menurut Machfud Siddik, dalam Anggito Abimanyu et al (2009) bahwa tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk : (i) Mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah, (ii) Menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan lebih efisien, (iii) Mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Tujuan ini sulit dicapai mengingat dua Undang-Undang Otonomi Daerah, UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, dirancang oleh dua lembaga yang berbeda, sehingga banyak terjadi ketidakjelasan dan tumpang tindih yang bersumber dari tiga unsur penting, yaitu : (i) Perhatian pemerintah lebih ditekankan pada sisi penerimaan, (ii) Pendelegasian ke pemerintah daerah lebih ditekankan pada kemampuan daerah masing-masing, dan (iii) Pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah untuk proaktif untuk menspesifikasi kewenangan mereka secara terperinci.

Dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga UU No.25 Tahun 1999, yang juga kemudian direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara dan Daerah, maka pelimpahan atau pemberian sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah kabupaten/kota, bertujuan untuk pemberdayaan pemerintah daerah dalam pengembangan daerahnya secara mandiri agar fungsi dari organisasi pemerintahan (organisasi publik) menjadi lebih efisien dan efektif, yaitu dengan mendekati diri dan mendekati kebutuhan/pelayanan masyarakat lokal. Semakin besar dan beragamnya kebutuhan masyarakat saat ini dan dimasa mendatang, serta akibat keterbatasan pemerintah pusat dalam menangani persoalan dan tuntutan masyarakat, maka kebutuhan akan desentralisasi akan semakin meningkat.

Menurut UU Nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom dan tidak dirangkap dengan wilayah administrasi, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas kontrol legislatif terhadap eksekutif sehingga peluang penyelewengan kekuasaan eksekutif makin sempit. UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah makin diperluas, khususnya dalam penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*).

Roy W. Bahl (1999) mengatakan bahwa dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip “money should follow function” merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.¹

Dengan semakin banyak wewenang yang dilimpahkan kepada daerah, maka kecenderungannya adalah semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Sehingga dalam pengelolaan pembiayaan tugas desentralisasi tersebut, prinsip efisiensi menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan. Anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik sedapat mungkin dikelola secara efisien, namun menghasilkan output yang maksimal. (Juli Panglima Saragih, 2003:84).

Dalam Ketentuan Umum UU No.25 Tahun 1999 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut :

“Suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata acara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan “dana perimbangan” adalah :

“Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

1 Dalam Implementasi Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan Prof. Roy W. Bahl, kedua belas aturan (rules) adalah : 1. Fiscal decentralization should be viewed as a comprehensive system, 2. Finance follow function, 3. There must be a strong central ability to monitor and evaluate decentralization, 4. One intergovernmental system doesn't fit the urban and rural sector, 5. Fiscal decentralization requires significant local government taxing powers, 6. Central government must keep the fiscal rules that they make, 7. Keep it simple, 8. The design of the intergovernmental transfer system should match the objectives of the decentralization reform, 9. Fiscal decentralization should consider all three levels of government, 10. Impose a hard budget constraint, 11. Recognize that intergovernmental system are always in transition and plan for this, 12. There must be a champion for *the fiscal decentralization*.

Dana perimbangan merupakan inti dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu hubungan keuangan merupakan sebuah sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah.

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Pasal 6, dana perimbangan terdiri atas sebagai berikut :

- Dana bagi hasil dari Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PPh Perorangan, dan penerimaan dari sumberdaya alam, yakni minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Penetapan besarnya dana bagi hasil pajak dan non pajak didasarkan atas persentase dengan tarif dan basis pajaknya.
- Dana Alokasi Umum (DAU) atau sering disebut juga dengan *block grant* yang besarnya didasarkan atas formula.
- Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK identik dengan *special grant* yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya *insidental* dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah (*bottom up*).

Sebelum diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah, sistem kebijakan fiskal yang menyangkut transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, diberikan dalam berbentuk Sumbangan Daerah Otonom (SDO) dan INPRES. SDO merupakan transfer yang realitasnya digunakan untuk membayar seluruh belanja pegawai daerah, sedangkan INPRES merupakan transfer yang menjadi kewenangan Presiden ke Dati I, Dati II dan Desa. Namun demikian, jika kedua bentuk transfer tersebut dirinci terbukti bahwa pada hakekatnya, SDO merupakan dana *block grant*, sedangkan INPRES bagian dari *specific grant*.

Walaupun UU No 22 dan 25 Tahun 1999 dinilai sebagai solusi maksimum dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat itu, namun disadari bahwa kedua undang-undang tersebut lahir dalam situasi darurat di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Sehingga setahun setelah kebijakan tersebut

dilaksanakan, kemudian dikeluarkanlah Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan akhirnya dilakukan perbaikan dari UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU. No 33 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004.

Perbedaan antara UU 22 Tahun 1999 dan UU 32 Tahun 2004, meskipun kedua UU tersebut sama-sama lahir pada era reformasi dan didasari sebagai antitesa sistem sentralistik pemerintah Orde Baru menurut Sadu Wasistiono (2005:188-190) ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perbandingan Isi UU No 22 Tahun 1999 dengan UU No 32 Tahun 2004

No.	Aspek Perbandingan	UU No.22/1999	UU No.32/2004
1.	Dasar Filosofi	Keanekaragaman dalam kesatuan	Keanekaragaman dalam kesatuan
2.	Pembagian Satuan Pemerintahan.	Pendekatan dan besaran isi otonomi, ada daerah besar dan ada daerah kecil yang masing-masing mandiri, ada daerah dengan isi otonomi terbatas dan ada daerah dengan otonomi luas.	Pendekatan besaran dan isi otonomi dengan menekankan pada pembagian urusan yang berkeselimbangan asas eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
3.	Penggunaan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Desentralisasi terbatas pada Daerah Propinsi dan luas pada daerah K/K. Dekosentrasi terbatas pada K/K dan luas pada Propinsi. Tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintahan.	Desentralisasi diatur berkeselimbangan antara Daerah Propinsi, dan K/K. Dekosentrasi terbatas pada K/K dan luas pada Propinsi. Tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintahan.
4.	Pola Otonomi	Local Democratic Model	Local Democratic Model dengan Struktural Efficiency Model
5.	Sistem Pertanggung-jawaban pemerintahan	Separated System	Mixed System dengan memadukan antara Integrated System dengan Separated system.
6.	Unsur pemda yang memegang peranan dominan	Badan Legislatif Daerah (legislative Heavy)	Menggunakan prinsip check and balances antara pemda dan DPRD

Sumber : Sadu Wasistiono, 2005:188-190

Dari tabel tersebut terdapat perubahan tekanan di dalam pengaturan tentang pemerintahan daerah, dari dominasi eksekutif (menurut UU No 5/1974) menjadi dominasi legislatif (menurut UU No 22/1999), dan kembali lagi pada dominasi

eksekutif (menurut UU No 32/2004). Selain daripada itu di dalam UU No 22/1999 pengaturan tentang DPRD ditempatkan di bagian depan sebelum pengaturan tentang Kepala Daerah dan Perangkat Daerah; sementara dalam UU No 32/2004, pengaturan tentang DPRD ditempatkan sesudah pengaturan tentang Kepala Daerah. Yang terpenting adalah bahwa dalam UU No.32/2004 tujuan pelaksanaan otonomi daerah sangat jelas dituliskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi UU No. 32 tahun 2004 ini sama dengan komposisi UU No. 5 tahun 1974, dimana memang terjadi penurunan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada penerbitan UU No 32/2004 tersebut (Wasistiono, 2005:190).

Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, yaitu :

1. pendapatan yang diterima yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (local source). Yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (local tax, sub national tax),
2. retribusi daerah (local retribution, fees, local licence) dan
3. hasil-hasil badan usaha (local owned enterprises) yang dimiliki oleh daerah.

Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Cochrane (1983), seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20 % perolehan PAD merupakan batas *minimum* untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20 %, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Desentralisasi fiskal harus diimbangi dengan kemampuan daerah untuk untuk membiayai sejumlah pengeluaran yang dialihkan kepadanya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dengan jalan memberikan kewenangan untuk menarik pajak yang telah dialihkan kepadanya, menarik pajak yang telah di-*assign* kepadanya.²

² Glynn Cochrane. "Policies For Strengthening Local Government In Developing Countries". World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing Series No. 9. Washington D.C.: The World Bank, 1983.

Untuk itu pemerintah perlu bertanggung jawab untuk menyediakan dana untuk terselenggaranya pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa. Demikian pula untuk tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota apabila memiliki PAD di wilayahnya, berkewajiban membantu pemerintahan Desa.

2.2. Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa

Dalam sejarah perkembangan manusia, Desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang pertama sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran dan negara-negara modern sebagaimana yang dikenal dewasa ini.

Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru, yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan yang merupakan "*rural industries*" (Wasistiono, 2007 : 12).

Menurut Sutopo Yuwono (dalam Bintarto, 1983 : 17) salah satu peranan pokok desa terletak pada bidang ekonomi. Daerah pedesaan merupakan tempat produksi pangan dan produksi komoditi ekspor. Peranan pentingnya menyangkut produksi pangan yang akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting sekali. Masyarakat desa perkebunan adalah produsen komoditi untuk ekspor (Wasistiono, 2007 : 12).

Secara sosiologis, masyarakat Desa memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Boeke (dalam Wasistiono, 2007:13) memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri dan kekayaan atau pendapatan sendiri. Persekutuan hukum pribumi terkecil dapat diartikan sebagai persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional, dan juga persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidaknya tidaknya sebagian besar daripada penduduk pribumi menjadi anggotanya.

Jika dipandang dari sudut politik dan administrasi pemerintahan, maka desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri (Soetardjo, 1984:16; Wiradi, 1988; dalam Wasistiono, 2007 : 14). Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk, yang mana kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Kesatuan masyarakat hukum tersebut mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa ‘Desa’ disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan ‘daerah otonom’ lainnya seperti Daerah Kabupaten atau Daerah Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.

Setelah Indonesia merdeka, maka para founding fathers kita menyusun UUD 1945 dan meletakkan kedudukan hukum Desa pada pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa”³

Pada tahun 1979 dilahirkan sebuah undang-undang nasional tentang Pemerintahan Desa yang efektif yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 yang

³ Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.

Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *Volkgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1979. Kedudukan pemerintahan desa dapat diketahui dari bunyi pasal 1 huruf a UU No.5 Tahun 1979 yang menyebutkan :

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

UU No.5 Tahun 1979 sama sekali tidak memberikan hak kepada pemerintahan desa atau kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, yang peraturan-peraturannya bersumber dari otonomi desa. Akan tetapi pemerintahan desa menurut UU ini hanya berhak menyelenggarakan pemerintahan umum yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang otonom di atasnya. Kedudukan desa tidak lebih dari wilayah administratif seperti wilayah administratif kelurahan dalam kawasan kota. UU No.5 Tahun 1979 merupakan produk hukum Pemerintahan Orde Baru yang dipandang sangat condong menopang Orde Baru dengan politik stabilitas dan sentralisasinya, sehingga menghambat demokratisasi desa.

Kebijakan pengaturan tentang Desa pada masa Orde Baru, sejauh mungkin diatur secara seragam dan sentralistis, dengan tujuan untuk kepentingan politik pemerintah. Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbang dalam UU No.5 Tahun 1979, bahwa : “..... sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku”. Namun upaya penyeragaman ini menghambat tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara mandiri, sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal disbanding masyarakat lainnya. Pengaturan terhadap pemerintahan desa yang kurang berdasar pada karakteristik masyarakatnya, hanya akan menimbulkan ketidakberdayaan dan ketergantungan.

Dengan bergulirnya reformasi maka dilakukan pembenahan mendasar dari sentralisasi menuju desentralisasi. Dalam kaitannya dengan adanya reformasi pemerintahan Desa, UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, segera diganti dengan

UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Dalam pasal 1 huruf (o) UU No.5 Tahun 1979 disebutkan bahwa :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

UU No.22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif. Kedudukan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Artinya desa tidak dapat berdiri sendiri, dan harus senantiasa melihat dinamika di atasnya. Walaupun Desa tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, melainkan menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, dimana setiap warga desanya berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengkoordinasikan keanekaragaman tersebut dalam pemerintahan nasional.

Perkembangan Desa di Indonesia selanjutnya adalah pada saat diterbitkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa memang tidak diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, karena sesuai amanat UUD 1945 secara eksplisit tidak disebutkan kedudukan pemerintahan desa dalam susunan sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Dengan demikian agar urusan yang diserahkan kepada desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa, maka perlu dilakukan suatu upaya yang sistematis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan. Upaya sistematis dimaksud tentu saja harus berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya dukungan supradesa (Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan, personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan Pemerintah Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat.

Untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Desa yang dapat dibentuk di wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada desa diberikan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahannya. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 200 mengatur bahwa “Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa’.

Berdasarkan Pasal 206 diatas, khususnya pada butir b, maka sebagai upaya untuk lebih memberdayakan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat di desa, pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan pengaturan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepala desa. Oleh karena itu, penyerahan sebagai urusan tersebut harus dilakukan dengan semangat pemberdayaan, dan urusan/kewenangan yang diserahkan adalah yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan layanan publik di desa, bukan urusan dan kewenangan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Desa.

Selain daripada itu pada pasal 215 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi

daerah. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Fungsi desa telah didudukkan sebagai komponen pelaksana pembangunan yang sangat penting. Pada pasal 215 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan dikeluarkannya PP No.72 tahun 2005 tentang Desa, maka semakin jelas kedudukan desa dalam pemerintahan NKRI, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar oleh Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.

Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Selanjutnya bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian pendapatan itu bisa bersumber lagi dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Selanjutnya regulasi juga membolehkan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya desa sesungguhnya telah didorong, diupayakan dan diharapkan menjadi mandiri dan berdikari. Apalagi bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harusnya menjadikan desa benar-benar sejahtera.

PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) dan penjelasannya menyebutkan :

- (1) *Sumber pendapatan Desa terdiri atas :*
- a. *Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.*
 - b. *Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.*

Penjelasan

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa. Dan retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara professional.

- c.. *Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan **Alokasi Dana Desa**.*

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- d. *Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.*

Penjelasan

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten/Kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

- e. *Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.*

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan, serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, khususnya tentang pendapatan asli desa sangat terbatas, kas desa yang bersumber dari pendapatan asli desa sangat minim, bahkan tidak ada. Padahal desa menjalankan fungsi pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan sub system pemerintahan lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah melalui UU No.34 sebagai perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan PP No.65 dan 66 Tahun 2001, menetapkan 10% diperuntukkan bagi Desa di Kabupaten. Kemudian bagian hasil pajak Provinsi dan Kabupaten, dan Dana Perimbangan dapat pula ditetapkan 10%, sedang Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota setelah dikurang belanja pegawai 10% dari DAU.

Perimbangan Dana Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa merupakan kelanjutan proses desentralisasi fiskal dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam implementasinya, desentralisasi keuangan ke tingkat desa tersebut terkadang diserahkan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Pada akhirnya sering perimbangan dana ini berhenti pada level jargon maupun retorika politik, faktor kepedulian pemerintah kabupaten terhadap desa lebih nampak daripada wujud integritas dan kesadaran terhadap "*rule of law*". Dalam konteks ketidakpastian regulasi dan formulasi perimbangan dana perimbangan kabupaten ke desa inilah urgensi mendorong desentralisasi keuangan di desa harus terus dilakukan (Sadu Wasistiono, 2007 : 110).

Dari aspek kebijakan, Desa pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh bagian dari bagian daerah Kabupaten. Skema anggaran yang dikembangkan di tingkat Kabupaten secara umum, masih belum terlihat adanya realisasi kongkrit dari pembagian tersebut. Serapan dana untuk kegiatan rutin hanya menyisakan 20-25% untuk dana pembangunan, menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha untuk mewujudkan suatu dana perimbangan daerah dengan desa. Realisasi dana perimbangan Desa akan sangat ditentukan oleh sejauhmana kabupaten dan desa bisa memperjelas apa yang akan dilayani di masing-masing level.

Dana perimbangan desa dari setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi dari desa yang bersangkutan, tidak ditetapkan melalui pembagian sama rata,

melainkan bagian desa dihitung dengan porsi kebutuhan dan potensi desa tersebut. Kebutuhan desa diperhitungkan dari variabel : jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, potensi alam, tingkat pendapatan masyarakat, dan jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan potensi desa adalah gambaran mengenai peluang penerimaan desa, baik dari sector pertanian maupun dari sector lainnya. Perhitungan ini sendiri diharapkan merupakan perhitungan yang melibatkan atau bahkan dilakukan sendiri oleh masyarakat desa.

Pelaksanaan konsep desentralisasi fiskal di tingkat pemerintah desa ini harus sejalan dengan pengembangan sistem perencanaan partisipatif, dimana proses perencanaan didorong kearah penyederhanaan jenis perencanaan, pentingnya pengembangan desentralisasi fiskal yang terdiri dari pelimpahan kewenangan dan transfer fiskal, penyederhanaan mekanisme perencanaan, penataan fungsi dan peranan kelembagaan serta berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan.

Tanpa adanya sinergi antara desentralisasi fiskal dengan perencanaan partisipatif, dalam pengertian perimbangan keuangan, tidak diletakkan dalam kerangka perencanaan partisipatif akan menyebabkan tidak terwujudnya tujuan peningkatan penyediaan barang dan jasa public serta peningkatan manfaat yang diterima oleh masyarakat desa. Begitu pula ruang partisipasi yang ada tidak akan dapat dioptimalkan oleh pemerintah dan masyarakat desa, sehingga tujuan umum desentralisasi dalam bentuk pelimpahan kewenangan dan transfer fiskal tidak akan dapat dicapai. Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif yang diimplementasikan dalam bentuk tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran social dan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa.

2.3. Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan.

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD.

Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu :

- kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- pendidikan dasar,
- kesehatan,
- keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
- jumlah penduduk,
- luas wilayah, dan
- potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “*Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa*” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindaklanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam perhitungan besarnya ADD untuk tiap desa, yaitu :

1. Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa.
2. Ketersediaan data untuk perhitungan ADD merupakan prasarat pertama

3. Rumus yang digunakan harus berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD harus sama untuk setiap desa ($ADD_{DM} = \text{Alokasi Dana Desa Minimal}$), dengan prosentase 60% dari ADD. Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu ($ADD_{DP} = \text{Alokasi Dana Desa Proporsional}$) dengan prosentase 40% dari ADD.

Dalam pengalokasian dana tersebut sudah pasti akan dapat terjadi ketimpangan fiskal antardesa, dan hal tersebut akan menyebabkan tidak dapat tercapainya keadilan dalam pengalokasian tersebut. Kebijakan ADD memang menjadi instrumen bagi terselenggaranya pemerintahan desa secara partisipatif. Hal ini karena ADD terintegrasi ke dalam APBdes dan tahap perencanaan, penetapan dan implementasi program yang tertuang dalam APBdes menghendaki partisipasi warga. Namun demikian ADD juga menjadi arena bagi elemen-elemen penyelenggara pemerintahan desa untuk mengusung kebijakan dan program yang responsif bagi kepentingan masyarakat. Fakta telah menunjukkan bahwa berbagai program yang diusung Desa menjadi sangat dekat dengan aspirasi masyarakatnya dan mendapat dukungan dana swadaya dan gotongroyong yang signifikan. Tidak kalah penting program itu juga diawasi pelaksanaannya sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi di dalam melaksanakan pekerjaannya.

ADD juga menjadi alat yang mempercepat proses kemandirian masyarakat desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri di wilayahnya. Dengan adanya ADD warga dapat belajar menangani proyek secara swakelola dan akhirnya mereka semakin percaya diri untuk mandiri membangun desanya.

2.4. Efektivitas Pengalokasian Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2002) bahwa siklus manajemen (perencanaan dan pengendalian) dimulai dengan tahapan aktivitas perencanaan tujuan dasar dan sasaran. Pemda umumnya menetapkan tujuan dasar dalam rumusan yang luas dan jangka panjang, yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Sedangkan sasaran dirumuskan dalam format yang lebih focus dan mengarah pada bidang-bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat, misalnya kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Gambar 2.1. menunjukkan bagaimana siklus perencanaan dan pengendalian.

Menurut Osborne dan Gaebler (1997: 389), efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing unit *output*, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas *output* itu. Ketika mengukur efisiensi, harus diketahui berapa banyak biaya yang harus ditanggung untuk mencapai suatu *output* tertentu. Ketika mengukur efektivitas harus diketahui apakah investasi tersebut dapat berguna. Efisiensi dan efektivitas merupakan hal penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efisiensi saja.

Derajat otonomi fiskal daerah akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD-nya, seperti pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, otonomi daerah dalam pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan yang efektif. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya (Radianto, 1997:3).

Devas et al. (1989: 17) mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu kerja dengan usaha yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut. Pendapat ini menyatakan bahwa semakin tinggi hasil perbandingan antara *output* dan *input*-nya berarti tingkat efisiensi semakin tinggi. Atau disebut juga daya guna, yaitu mengukut bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak bersangkutan. Selain mencakup biaya langsung, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor atau instansi lain dalam pemungutan pajak.

Menurut Nick Devas (1989) prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang mengalami perubahan paradigma seiring dengan penganjuran konsep “*good governance*” dalam penyelenggaraan pemerintahan, adalah :

1. Transparansi

Adanya keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah, sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan daerah atau APBD.

2. Efisien

Pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin, guna menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi. Dengan anggaran yang ada Pemda harus mencapai target minimal. Dengan kata lain, standar pelayanan minimal merupakan target yang harus dicapai sesuai proporsi biaya yang ditetapkan.

3. Efektif

Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD), pengelolaan anggaran haruslah tepat sasaran. Selama ini Pemda sering tidak mempedulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja tepat atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai. Pemikiran seperti ini bertentangan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi hasil atau output.

4. Akuntabilitas

Dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut adanya pertanggungjawaban kepada public yang dapat dilakukan secara institusional kepada DPRD. DPRD yang akan menilai apakah kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerah atau APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria atau tolok ukur sesuai apa yang direncanakan semula.

5. Partisipatif

Peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijamin. Kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah (APBD) juga harus mengakomodasikan aspirasi publik dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung.

2.5. Penentuan Sektor Basis Dalam Ekonomi Regional Dengan Analisa “*Location Quotient*”

Ketika dua kecamatan yang setara dalam peringkat dan penempatannya, ternyata tumbuh pada tingkat yang berbeda setelah jangka waktu tertentu, diperlukan suatu indikator untuk mengetahui penyebab terjadinya hal tersebut. Ketika dalam ilmu ekonomi regional fenomena ini tidak dapat lagi dijelaskan dengan “*Central Place Theory*”, maka digunakan analisa Teori Basis Ekonomi. Basis ekonomi adalah sumber pendapatan suatu daerah yang merupakan motor yang menggerakkan dan mengatur semua aktivitas di suatu daerah. Analisa Basis Ekonomi adalah suatu alat yang dapat membantu mengidentifikasi kecamatan atau daerah mana yang akan tumbuh dan juga dapat membantu menandai pertumbuhan seperti apa yang terjadi, serta membantu mengukur berapa banyak pertumbuhan.⁴

Konsep basis ekonomi adalah suatu konsep untuk mengetahui suatu sektor pembangunan ekonomi wilayah dan kegiatan basis, yang dapat melayani pasar daerah itu sendiri maupun pasar luar daerah (Kadariah, 1985 dalam Gatot D.A., 2003). Dalam mengukur suatu sektor apakah menjadi basis atau tidak, dipergunakan *Location Quotient Analysis*, yaitu suatu perbandingan relatif kemampuan suatu sektor dalam wilayah yang ingin di analisa. Analisa LQ akan menunjukkan tingkat keunggulan relatif kegiatan lapangan usaha di suatu wilayah dan digunakan juga untuk mengetahui kemampuan daerah dalam kegiatan sektor tertentu. *Location Quotient Analysis* mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya LQ memiliki konsep yang sederhana dan mudah diterapkan, sedangkan kekurangannya adalah penambahan unit lokasi harus disesuaikan dengan penentuan kegiatan basis dan non basis, model ini kurang bisa diandalkan jika wilayah lebih luas (Richardson, 1997 dalam Gatot D.A., 2003)⁵

Menurut Adisasmita (2005) bahwa dalam teori basis ekspor atau *Export Base Theory*, suatu sistem regional disederhanakan menjadi dua bagian, yaitu daerah yang bersangkutan dan daerah-daerah lainnya. Masyarakat dapat dinyatakan sebagai suatu

⁴ Basis Ekonomi dan Pertumbuhan Kabupaten Kota. 6 Desember 2006. Anto. www.getuk.wordpress.com

⁵ Gatot Dwi Adiatmodjo. 2003. Pembangunan Berkelanjutan Dengan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Untuk Membangun Perekonomian Dengan Basis Pertanian (di Kabupaten Musi Banyuasin). Program Pasca Sarjana (S3). Institut Pertanian Bogor. www.rudict.com

sistem sosial ekonomi, dimana keseluruhan masyarakatnya melakukan perdagangan dengan masyarakat lainnya di luar batas wilayahnya. Faktor penentu (*determinan*) pertumbuhan ekonomi dikaitkan secara langsung kepada permintaan akan barang dari daerah lainnya di luar batas masyarakat ekonomi regional. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan material (bahan) untuk komoditas ekspor akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas dalam perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan yakni aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasarannya adalah bersifat lokal.

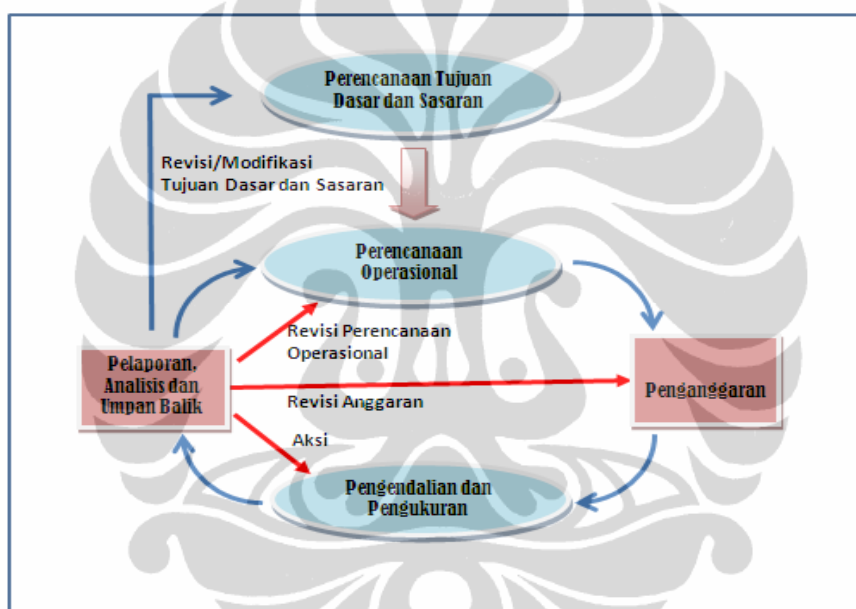
Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lainnya akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional. Dengan bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah, maka akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya akan menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya, berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan pendapatan yang mengalir ke dalam suatu wilayah akan berkurang, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis.

2.6. Disparitas (Ketimpangan) Pembangunan Antar Wilayah

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata yang ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Namun lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang luas, seperti dimensi sosial yang justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, pembangunan juga mempertimbangkan dampak

aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik.

Model pertumbuhan lancar telah mendominasi perkembangan teori pembangunan yang dikemukakan Adam Smith, Karl Marx dan Rostow. Dasar pemikiran dari model ini adalah evolusi proses pembangunan yang dialami oleh suatu negara selalu melalui tahap-tahap tertentu. Tahapan tersebut merupakan proses urutan, artinya mutlak harus dilalui oleh suatu negara yang sedang membangun, satu-persatu secara berurutan menuju tingkat yang semakin tinggi (Kuncoro, 1997).



Sumber : Jones, R. and Pendlebury, M. (1996) *Public Sector Accounting*, 4th Ed, London : Pitman dalam Mardiasmo (2004).

Gambar 2.1. Siklus Perencanaan dan Pengendalian

▪ Teori Adam Smith

Adam Smith membagi pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap, yaitu masa perburuan, masa berternak, masa bercocoktanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang cenderung kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian

kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja atau masyarakat sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi.

- *Teori Karl Marx*

Karl Marx di dalam bukunya *Das Kapital* membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme yang akan sejalan dengan pelaksanaan proses pembangunan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi dimana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam tahap ini tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar relatif tinggi terhadap pelaku ekonomi lain. Perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula agraris-feodal kemudian mulai beralih menjadi masyarakat industri yang kapitalis. Selanjutnya, ekonomi kapitalis menyebabkan masyarakat bawah tertindas yang akan menimbulkan paham sosialisme.

- *Teori Rostow*

Pada dekade 1950-1960, teori Rostow mempengaruhi pandangan dan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan. Teori ini berdasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju terutama di Eropa. Dengan mengamati proses pembangunan di Eropa dari mulai abad pertengahan sampai dengan abad modern, kemudian Rostow memformulasikan pola pembangunan menjadi tahapan evolusi dari suatu pembangunan ekonomi. Rostow membagi proses pembangunan ekonomi menjadi lima tahap, yaitu (1) Tahap ekonomi tradisional, (2) Tahap prakondisi tinggal landas, (3) Tahap tinggal landas, (4) Tahap menuju kedewasaan, (5) Tahap konsumsi masa tinggi.

1. *Tahap Perekonomian Tradisional*

Perekonomian masyarakat tradisional cenderung bersifat sub sistem dengan pemanfaatan teknologi yang masih sangat terbatas, sehingga sektor pertanian memegang peranan penting. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi dalam proses produksi menyebabkan barang-barang yang

diproduksi sebagian besar adalah komoditas pertanian dan bahan mentah lainnya. Struktur sosial kemasyarakatan dalam sistem masyarakat seperti ini bersifat berjenjang. Kemampuan penguasaan sumber daya yang ada sangat dipengaruhi oleh hubungan keluarga.

2. *Tahap Prakondisi Tinggal landas*

Tahap kedua dari proses pertumbuhan ini merupakan proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang disamping sektor pertanian yang masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan bagi persiapan menuju tahap-tahap pembangunan berikutnya.

3. *Tahap Tinggal Landas*

Tinggal landas merupakan tahap yang menentukan dalam keseluruhan proses pembangunan bagi kehidupan bermasyarakat. Pengalaman negara Eropa menunjukkan bahwa tahap ini berlaku dalam waktu yang relatif pendek yang diperkirakan dua dasawarsa. Dalam tahap ini akan terjadi suatu revolusi industri yang berhubungan erat dengan revolusi metode produksi.

4. *Tahap Kedewasaan*

Tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang dimana produksi dilakukan secara swadaya. Tahapan ini ditandai dengan munculnya beberapa sektor penting yang baru. Pada saat negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, terdapat tiga perubahan penting yang terjadi, yaitu (1) Tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik; (2) Perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan; (3) Masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh.

5. *Tahap Konsumsi Masa Tinggi*

Pada tahap ini akan ditandai dengan terjadinya migrasi secara besar-besaran dari masyarakat pusat perkotaan ke pinggiran kota akibat pembangunan pusat kota sebagai sentral bagi tempat bekerja. Penggunaan alat transportasi pribadi maupun yang bersifat transportasi umum seperti halnya kereta api

merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Pada fase ini terjadi perubahan orientasi dari pendekatan penawaran (*supply side*) menuju ke pendekatan permintaan (*demand side*) dalam sistem produksi yang dianut.

Berdasarkan teori Rostow di atas, pada saat ini negara Indonesia termasuk dalam tahap tinggal landas. Untuk mencapai tahapan selanjutnya, maka salah satu langkah yang diambil adalah dengan penyelenggaraan otonomi daerah.

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” berarti undang-undang. Menurut perkembangan sejarah pemerintahan di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang-undangan juga mengandung arti pemerintahan atau perundang-undangan itu sendiri (Pamudji, 1982: 45).

Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Pada prinsipnya, hakekat otonomi daerah ialah mempunyai sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk melaksanakan tugas otonomi, serta mempunyai anggaran belanja yang ditetapkan sendiri. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada tiga faktor yang menentukan, yaitu perangkat, personalia, dan pembiayaan atau pendanaan daerah.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cukup besar. Terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi masih tetap dalam kerangka memperkuat negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh setiap aparatur pemerintah

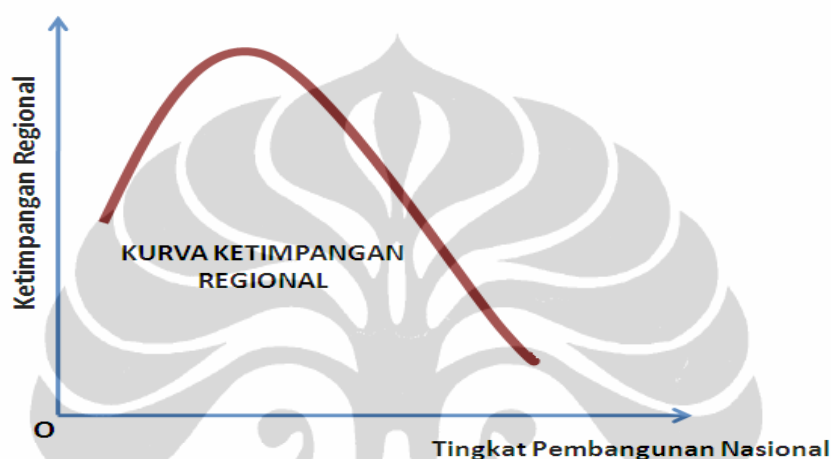
daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat sebagai perumus kebijaksanaan.

Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. Pertama, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Kedua, keuangan yang merupakan bahasan pada lingkup penulisan ini sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. Ketiga, peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah. Keempat, untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka diperlukan organisasi dan pola manajemen yang baik (Kaho (1998) dalam Sjafrizal (2008).

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda, dimana akhirnya terjadi pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan juga terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Sjafrizal, 2008:104).

Permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-klasik yang kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-klasik, dimana diprediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak.

Setelah itu, apabila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf “U” terbalik (*reverse U-shaped curve*), seperti yang terlihat pada Gambar 2.2.



Sumber : Sjafrizal (2008)

Gambar 2.2 Hipotesa Neo-klasik (Kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf “U” terbalik (*reverse U-shaped curve*)).

Penganut model Neo-klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju, sehingga ketimpangan pembangunan regional pembangunan terus berlanjut. Dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju, maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang (*convergence*). Perkiraan ini merupakan kesimpulan kedua dari model ini dan kemudian dikenal sebagai Hipotesa Neo-klasik yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Mengingat kesimpulan ini masih bersifat hipotesa, maka hal ini perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui seberapa

jauh kesimpulan ini dapat dibenarkan. Sesuai dengan kesimpulan dari Model Neo-klasik ini, hipotesa yang dapat ditarik adalah :

- a. Kemajuan teknologi, peningkatan investasi, dan peningkatan jumlah tenaga kerja suatu wilayah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan.
- b. Pada permulaan proses pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah titik maksimum bila pembangunan terus dilanjutkan, maka ketimpangan pembangunan antar daerah akan berkurang dengan sendirinya.

Pada negara sedang berkembang ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat, justru pada waktu proses pembangunan sedang dilakukan, karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai di Negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana, serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial budaya, sehingga akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat, karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Keadaan yang berbeda terjadi di negara yang sudah maju dimana kondisi daerahnya umumnya telah dalam kondisi yang lebih baik dari segi prasarana dan sarana, serta kualitas sumberdaya manusia. Disamping itu, hambatan hambatan social dan budaya dalam proses pembangunan hampir tidak ada sama sekali. Dalam kondisi yang demikian, setiap kesempatan peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata antar daerah. Akibatnya proses pembangunan pada negara maju akan cenderung mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Kebenaran Hipotesa Neo-klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang. Hasilnya adalah benar bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan

ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya. Fakta empirik ini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pembangunan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang, sebenarnya bukan karena kesalahan pemerintah atau masyarakatnya, tetapi hal tersebut terjadi secara natural di seluruh negara.

Jeffrey G. Williamson kemudian mengeluarkan indeks untuk mengukur tingkat ketimpangan antar wilayah yang kemudian disebut Indeks Williamson. Secara statistik indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Kelemahan indeks ini antara lain adalah sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan. Berbeda dengan *Gini Ratio* yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan, *Williamson Index* menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar, karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah, dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.

Indeks Williamson sensitif terhadap ukuran wilayah yang digunakan, artinya bahwa bila ukuran wilayah yang digunakan berbeda, maka hal ini akan berpengaruh pada hasil perhitungan indeks ketimpangan. Dengan demikian, analisa perlu dilakukan secara hati-hati bila pembahasan menyangkut dengan perbandingan indeks ketimpangan antar negara dimana ukuran wilayahnya akan berbeda satu sama lainnya.

Analisa mengenai faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah bertujuan untuk dapat menjelaskan secara empirik unsur penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah, serta dapat memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perumusan kebijakan untuk menanggulangi atau mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab atau pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia antara lain adalah adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam, perbedaan kondisi demografis, kurangnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Kebijakan dalam upaya untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan wilayah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan tersebut. Kebijakan yang dimaksudkan adalah upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu negara atau wilayah, antara lain : penyebaran pembangunan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pengembangan pusat pertumbuhan, dan pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Jhingan (1993) dalam Ayu-Savitri (2006), sesuai dengan teori pertumbuhan dari Harrod-Domar, bahwa investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.

Disparitas distribusi investasi antardaerah dapat juga dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi atau pendapatan antardaerah (Tambunan, 2003 dalam Sjafrizal, 2008).

Sjafrizal (1985) mengatakan bahwa dalam konsep pertumbuhan model Neo-Klasik terdapat hubungan antara tingkat pertumbuhan dengan perbedaan kemakmuran (regional disparity) pada negara bersangkutan. Dikatakan bahwa pada saat awal pembangunan tingkat disparitas cenderung akan tinggi (terjadi divergensi), sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama, maka perbedaan antarwilayah akan cenderung menurun (terjadi konvergensi). Akan tetapi kapan waktu perbedaan kemakmuran masing-masing daerah akan mengecil belum diketahui secara pasti, mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya adalah kelancaran lalu lintas permodalan dan sumber daya manusia masih rendah.⁶

2.7. Keragaman Desa di Indonesia

Keragaman desa-desa di Indonesia, secara empirik, tidak hanya ditentukan berdasarkan asal-usul, pengaruh adat, sistem nilai, bentuk kesatuan masyarakat hukum adat maupun susunan aslinya. Meskipun variabel-variabel itu secara bervariasi mempengaruhi keragaman desa, tetapi juga ada variabel-variabel lain yang turut

⁶ Ayu Savitri Gama. 2006. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial | INPUT |* Volume 2 Nomor 1

membentuk keragaman desa, yakni: kondisi geografis (pegunungan, pantai, kepulauan, pertanian, daratan, pedesaan, perkotaan, dan lain-lain), basis ekonomi, konsisi sosiologis, tingkat kemajuan desa akibat dari pembangunan dan perubahan sosial; dan lain-lain (Dwipayana dan Eko, 2005).

Tabel 2.2. Tipologi Desa-Desa di Indonesia

No	Type Item	Desa sebagai kesatuan masyarakat	Desa Administratif	Desa sebagai kesatuan pemerintahan lokal	Kelurahan
1.	Status	Pemerintahan komunitas (<i>self governing community</i>)	Satuan perangkat pemerintah daerah.	Satuan pemerintah lokal yang otonom.	Satuan perangkat kerja pemerintah daerah.
2.	Kedudukan	Sebagai subsistem pemerintahan NKRI	Subsistem pemerintahan kabupaten/kota		Subsistem pemerintahan kabupaten/kota
3.	Bentuk (1)	Desa adat, masyarakat adat atau perkumpulan masyarakat	Desa-desa baru atau desa definitif di unit transmigrasi	Desa lama yang telah mengalami kemajuan	Desa maju yang mengalami perubahan status
4.	Bentuk (2)	Tradisional	Transisional	Maju	Modern
5.	Kemajuan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Swasembada
6.	Kondisi geografis	Wilayah pedesaan yang terpencil	Wilayah pedesaan baru	Wilayah semakin terbuka	Perkotaan
7.	Kondisi sosiologis	Komunalisme	Komunalisme	Komunalisme makin memudar	Individualisme
8.	Basis ekonomi	Pertanian (dalam arti luas)	Pertanian	Pertanian dan nonpertanian	Perdagangan, industri, jasa, dll
9.	Pengaruh adat tradisional	Sangat kuat	Tidak ada	Mulai memudar	Sudah hilang
10.	Susunan asli	Masih kuat	Tidak ada	Mulai memudar	Sudah hilang
11.	Sifat otonomi	Otonomi asli	Tidak ada	Otonomi asli dan pemberian dari negara	Sudah hilang
12.	Pemilihan pemimpin	Musyawahar adat	Pemilihan langsung	Pemilihan langsung	Pengangkatan
13.	Kewenangan asal usul	Masih kuat	Tidak ada	Terbatas	Sudah hilang
14.	Kewenangan	Asal-usul	Delegatif (tugas pembantuan) dan administratif	Asal-usul, atributif dan delegatif	Administratif dan delegatif
15.	Tugas	Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai asal-usul	Menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara	Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat	Menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara
16.	Sumber keuangan	Hasil pengelolaan SDA dan bantuan pemerintah	Hasil SDA dan bantuan pemerintah	Hasil SDA, pungutan desa, dan dana alokasi desa.	Dana belanja aparatur dari pemerintah kabupaten/kota dan bantuan pemerintah untuk masyarakat.
17.	Payung pengaturan	UU Desa	UU Pemda	UU Desa	UU Pemda

Sumber : AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko. (2005).

Variabel yang begitu banyak tentu membuat rumit penentuan tipologi desa dan juga mempersulit pengaturan desa yang bersifat beragam. Tetapi kalau skema pengaturan dibuat desa yang baku secara nasional (*default village*), maka pengaturan yang standar itu akan sulit bekerja di semua daerah dan desa di Indonesia. Pengaturan desa yang menggunakan standar desa-desa di Jawa tentu akan sulit bisa bekerja di Luar Jawa.

Terdapat empat tipe desa yang dipengaruhi oleh banyak faktor, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.2. *Pertama*, desa sebagai kesatuan masyarakat atau disebut dengan pemerintahan komunitas atau *self governing community*. Tipe desa ini bukanlah unit pemerintahan formal seperti yang selama ini berjalan, melainkan sebagai bentuk pemerintahan informal yang mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul sebagai pembentuk otonomi asli. Tipe desa ini tidak perlu mengalami birokratisasi dan menjalankan tugas-tugas administratif dari pemerintah. *Kedua*, desa administratif sebagai desa-desa baru yang dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat atau karena pembentukan desa definitif di wilayah UPT transmigrasi.

Tipe desa ini tidak mempunyai kewenangan asal-usul, dan menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh pemerintah, serta mengelola fungsi-fungsi pembangunan dan kemasyarakatan. *Ketiga*, desa sebagai kesatuan pemerintahan lokal yang lebih siap dikembangkan menjadi unit pemerintahan yang otonom. Di desa-desa bertipe ini pengaruh adat sudah mulai pudar, dan akibat dari perubahan sosial telah tumbuh menjadi desa yang maju, swasembada dan modern. Selain itu, pemerintahan desa (dalam pengertian formal) telah berjalan dengan baik, dan karenanya sudah siap dikembangkan sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (*local self government*). Keempat, kelurahan atau sebagai satuan kerja perangkat daerah, suatu bentuk unit administratif baru yang dibentuk secara sengaja atau merupakan evolusi dari desa-desa maju di kawasan perkotaan.

Empat tipe desa tersebut membawa konsekuensi lebih lanjut terhadap kedudukan, bentuk, kewenangan, tugas fungsi, keuangan dan juga payung pengaturan. Tipe desa sebagai pemerintahan komunitas dan tipe desa sebagai unit pemerintahan yang otonom berada dalam subsistem pemerintahan NKRI yang diatur melalui UU

Desa tersendiri, sementara desa administratif dan kelurahan berada dalam subsistem pemerintahan kabupaten/kota serta diatur melalui UU Pemerintahan Daerah. Yang penting UU Desa memberikan pengaturan mengenai pembentukan, penggabungan dan perubahan dari satu tipe ke tipe yang lain, misalnya dari desa menjadi kelurahan.

Tabel 2.3. Jumlah Wilayah Administratif di Pulau Jawa dan Bali - Indonesia

No.	Provinsi	Kab	Kota	Kec.	Kel.	Desa	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	DKI Jakarta	1	5	44	267	0	740,29	9.111.651	12.308,21
2	Jawa Barat	16	9	568	547	5.231	36.925,05	39.130.756	1.078,13
3	Jawa Tengah	29	6	564	744	7.817	32.799,71	32.952.040	1.004,64
4	DI Yogyakarta	4	1	78	47	391	3.133,15	3.279.701	1.046,77
5	Jawa Timur	29	9	654	785	7.682	46.689,64	37.076.283	794,10
6	Banten	4	2	130	144	1.340	9.018,64	9.127.923	1.012,11
7	Bali	8	1	56	89	602	5.449,37	3.487.764	640,03
	Total	349	91	5.263	7.113	62.806	1.860.359,67	220.953.634	

Sumber: www.depdagri.go.id Situs Departemen Dalam negeri Republik Indonesia

Yang lebih penting, keempat tipe desa itu menunjukkan bahwa pengaturan desa sebaiknya bersifat *optional*, sehingga bisa membentuk *optional village*. Salah satu cara yang ditempuh adalah menerapkan manajemen transisi selama dua tahun, dimana pemerintah sebaiknya memberikan kesempatan kepada daerah dan masyarakat setempat untuk menentukan pilihan kepada tipe-tipe desa. Jika sekarang di daerah hanya mengenal tipe desa standar dan kelurahan, maka kedepan bisa jadi di setiap daerah akan mempunyai empat tipe desa secara beragam, sangat tergantung pada konteks lokal di masing-masing desa.⁷

7 AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko. 2005. Pokok-pokok pikiran untuk penyempurnaan UU No. 32/2004 khusus pengaturan tentang desa (masukan untuk tim pakar depdagri)

BAB 3

METODE ANALISA

3.1. Jenis dan sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtut waktu (time series) dalam bentuk tahunan dari tahun 2004-2008 untuk data-data Badan Pusat Statistik dan data-data tentang ADD dari tahun 2007 - 2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data penerimaan ADD per Desa di Kabupaten Karangasem tahun 2007-2009
2. Laporan Penggunaan ADD per Desa di Kabupaten Karangasem tahun 2007-2009
3. Data PDRB pemerintah daerah Propinsi Bali tahun 2004-2008
4. Data PDRB pemerintah daerah Kabupaten Karangasem tahun 2004-2008
5. Data PDRB pemerintah daerah delapan Kecamatan di Kabupaten Karangasem tahun 2004-2008
6. Data DAU pemerintah daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2009
7. Data BPS Propinsi Bali, BPS Kabupaten Karangasem, serta Monografi Desa Pempatan, Selat, Bebandem, dan Tenganan.
8. Data-data perhitungan ADD pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Karangasem Propinsi Bali
9. Laporan Pemeriksaan BPKP Pusat Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Karangasem periode tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009 melalui situs www.bpkp.go.id

Dalam penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari :

1. Badan Pusat Statistik Propinsi Bali Tahun 2009
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem Tahun 2004-2009
3. Kantor Perbekel Pempatan, Selat, Bebandem, dan Tenganan
4. Kantor Kecamatan Rendang, Selat, Bebandem, dan Manggis

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan literatur yang meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan Alokasi Dana Desa (ADD), tentang otonomi daerah, otonomi desa, desentralisasi fiskal, dan tentang pemerintahan desa. Juga tentang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional serta buku-buku tentang keuangan daerah.

2. Studi Lapangan

a. Observasi

Mengadakan tinjauan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mengamati, meneliti dan mempelajari tentang data-data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan serta Kantor Perbekel (Desa) di empat desa pada Kabupaten Karangasem.

b. Dokumentasi

Pencatatan, pengumpulan dan pengelompokkan data berkaitan dengan permasalahan penelitian dari sumber data sekunder.

3.3 Analisis Data

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan perhitungan Alokasi Dana Desa masing-masing Desa dan juga melakukan perhitungan "*Location Quotient*", "*Williamson Index*", dan "*Klassen Typology*" untuk empat kecamatan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa, PDRB dan PDRB Per Kapita, data-data lainnya yang berhubungan dengan empat desa dan kecamatan di Kabupaten Karangasem.
- Mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh untuk dipergunakan sebagai sumber data perhitungan "*Location Quotient*", "*Williamson Index*", serta "*Klassen Typology*" dalam penelitian ini.

- Menghitung dan menyajikan hasil analisis data berupa tabel dan grafik untuk menjelaskan analisa penelitian.
- Menarik kesimpulan atas rangkaian analisis data dan informasi yang disajikan, sehingga diketahui efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karangasem.

3.4. Alat Analisa

Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

1. Formula Alokasi Dana Desa sesuai dengan Surat Mendagri No.140/640/SJ tahun 2005 perihal Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
2. Analisa "*Location Quotient*" untuk menentukan sektor basis di tiap Kecamatan
3. Indeks Williamson untuk menghitung ketimpangan fiskal antar Desa
4. Analisa "*Klassen Typologi*" untuk menentukan gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah.
5. UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Permendagri yang berkaitan dengan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa

3.5. Langkah-Langkah Penelitian

3.5.1. Pemilihan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian tentang Alokasi Dana Desa ini di empat desa Bali berdasarkan pertimbangan bahwa Bali merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadat sangat kuat termasuk dalam hal pengelolaan perdesaan. Setelah UU No. 22 Tahun 1999 berlaku, maka sistem pemerintahan Desa kembali menjadi seperti sistem yang berlaku sebelum Orde Baru berkuasa. Melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengembalian Peristilahan Kepala Desa, maka istilah Kepala Desa dikembalikan menjadi "*Perbekel*", Dusun dikembalikan menjadi "*Banjar Dinas*" dan Kepala Dusun dikembalikan menjadi "*Kelian Banjar Dinas*". Propinsi Bali memiliki kekhasan dalam sistem pemerintah desa, dimana selama ini masyarakat Bali mengenal adanya dua bentuk desa,

yaitu : "Desa Dinas", dan "Desa Adat". Peran Desa Dinas dan Desa Adat selama ini di Bali tidak pernah menimbulkan konflik atau benturan-benturan sosial dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan/pembagian peran yang dimiliki oleh Desa Dinas dan Desa Adat. Masing-masing Desa mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan hal ini diperkuat dengan keberadaan aparat desa yang berbeda-beda pula (aparat desa dinas berlainan dengan aparat desa adat). Selain itu factor yang juga menentukan adalah adanya dukungan masyarakat yang sepenuhnya mengetahui dan mendukung mekanisme tersebut.

Untuk menentukan empat desa yang dipilih dari 714 desa⁸ di Bali, maka digunakan data PDRB Per Kapita di Bali pada tahun 1993-2006, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4.1, dipilih kabupaten yang mewakili kabupaten dengan PDRB terendah yaitu Kabupaten Karangasem. Empat desa yang diambil adalah desa-desa dari Kecamatan yang berdekatan dari dataran rendah dekat pantai hingga dataran tinggi, yaitu Desa Tenganan, Bebandem, Selat, dan Pempatan.

3.5.2. Perhitungan Besarnya Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karangasem

Perhitungan Alokasi Dana Desa berdasarkan rumus penentuan besarnya ADD yang telah ditetapkan oleh Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 secara lengkap dilampirkan pada lampiran 7. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam penentuan besarnya ADD setiap Desa.

A. Rumus Alokasi Dana Desa

$$ADDX = ADDM + ADDPx \dots\dots\dots 3.1$$

Dimana,

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desa x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

$$ADDPx = BDx X (ADD - \Sigma ADDM) \dots\dots\dots 3.2$$

⁸Bali Dalam Angka 2009. Katalog BPS 1102001.51. Badan Pusat Statistik Propinsi Bali.

Dimana,

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota

$\Sigma ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

B. Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + \dots + a_n KV_n \dots\dots\dots 3.3$$

C. Perhitungan Masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa x ($KV1_x$, $KV2_x$, ...)

$$KV_{1, 2, \dots, x} = \frac{V_{1, 2, \dots, x}}{\Sigma V_n} \dots\dots\dots 3.4$$

Dimana :

$KV_{1, 2, \dots, x}$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk Desa x. Misalnya: Nilai Variabel Kemiskinan Desa Bahagia, Nilai Variabel Pendidikan Desa Bahagia, dst.

$V_{1, 2, \dots, x}$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x. Misalnya: Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Tidak Lulus Pendidikan dasar Desa Bahagia, dst.

ΣV_n : Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya: Jumlah Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Contoh:

Desa Ulakan di Kabupaten Karangasem, diketahui memiliki data-data sebagai berikut :

- Jumlah KK miskin Desa Bahagia = 45 KK
- Jumlah KK miskin Kabupaten Sejahtera = 15.000 KK
- Koefisien Variabel Kemiskinan Desa Bahagia
- KV_1 (Desa Bahagia) = $45/15.000 = 0,003$

D. Penentuan Bobot Variabel (a)

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1 \dots\dots\dots 3.5$$

dimana :

a1, a2, ..., an : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.

Misalnya: Bobot Kemiskinan 0,4; Kesehatan 0,3; dst.

Contoh:

Daerah menetapkan 4 (empat) variabel independen untuk menetapkan Nilai Bobot Desa (BDx), yakni Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan Keterjangkauan. Tabel 3.1. menunjukkan contoh perhitungannya.

Cara lain menentukan angka bobot, misalnya:

- Variabel dianggap sangat penting diberi bobot 4
- Variabel dianggap penting diberi bobot 3
- Variabel dianggap cukup penting diberi bobot 2
- Variabel dianggap kurang penting diberi bobot 1

Contoh perhitungan Angka Bobot ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Bobot Variabel Penghitung Alokasi Dana Desa

Variabel	Angka Bobot (a)
Variabel Kemiskinan (A1)	0.40
Variabel Pendidikan Dasar (a2)	0.30
Variabel Kesehatan (a3)	0.20
Variabel Keterjangkauan (a4)	0.10
Jumlah Bobot	1.00

Tabel 3.2 Perhitungan Angka Bobot (a)

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jml Bobot
Variabel Kemiskinan (a1)	4	0.36
Variabel Pendidikan Dasar (a2)	3	0.27
Variabel Kesehatan (a3)	3	0.27
Variabel Keterjangkauan (a4)	1	0.09
Jumlah Bobot	11	1.00

3.5.3. Penentuan Sektor Basis di Tiap Kecamatan Pada Kabupaten Karangasem Dengan Analisa "Location Quotient"

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi (*location quotient*). Tujuan dari analisa "LQ" untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-

sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Dalam teknik LQ berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah. Analisa *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan sektor unggulan perekonomian daerah dan mengidentifikasi serta merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan PDRB sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Formulasi matematisnya adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{X_r/RV_r}{X_n/RV_n} \quad \text{atau} \quad LQ = \frac{X_r/X_n}{RV_r/RV_n} \dots\dots\dots 3.6.$$

dimana :

- X_r** = Nilai Produksi Sektor i pada Kecamatan j pada Kabupaten Karangasem
- RV_r** = Total PDRB Kecamatan j pada Kabupaten Karangasem
- X_n** = Nilai Produksi Sektor i pada Kabupaten Karangasem
- RV_n** = Total PDRB Kabupaten Karangasem

Kriteria pengukuran LQ yaitu apabila nilai $LQ > 1$ berarti nilai produksi sektor tertentu di Kecamatan lebih besar dari sektor yang sama di tingkat Kabupaten, sehingga sektor tersebut merupakan sektor basis. Artinya sektor tersebut merupakan sektor unggulan di kecamatan dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian kecamatan.

Apabila nilai $LQ < 1$ berarti nilai produksi sektor tertentu di Kecamatan lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat Kabupaten, sehingga sektor tersebut merupakan sektor non basis. Artinya sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian kecamatan.

Apabila nilai $LQ = 1$ berarti nilai produksi sektor tertentu di Kecamatan sama dengan sektor yang sama pada tingkat propinsi.

Asumsi dalam analisa LQ adalah bahwa permintaan di setiap daerah adalah identik dengan pola permintaan nasional dan juga produktivitas tiap

tenaga kerja di setiap daerah sektor regional adalah sama dengan produktivitas tiap tenaga kerja dalam industry nasional. Diasumsikan pula bahwa perekonomian nasional merupakan suatu perekonomian tertutup.

3.5.4. Perhitungan Kesenjangan (Disparitas) Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Dengan "Williamson Index"

Untuk mengukur kesenjangan pembangunan antar wilayah digunakan Formulasi Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Formulasi Indeks Williamson sebagaimana ditunjukkan pada rumus 3.6 menurut Sjafrizal (2008), secara statistik dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \times (n_i/N)}}{Y} \dots\dots\dots 3.7$$

$0 < I_w < 1$

dimana :

- I_w** = Indeks Kesenjangan Williamson
- Y_i** = Pendapatan Regional Per Kapita (PDRB) Kecamatan ke-i
- Y** = Pendapatan Regional Per Kapita (PDRB) Kabupaten Karangasem
- n_i** = Jumlah penduduk Kecamatan ke-i
- N** = Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem

Perhitungan Indeks Kesenjangan Williamson (I_w) ini menggunakan Pendapatan Regional Per Kapita (PDRB = Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Karangasem menurut kecamatan atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kurun waktu 2004 – 2008. Didasarkan atas harga konstan, maksudnya adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dinilai atas harga tahun dasar sehingga menunjukkan nilai riil karena telah menghilangkan faktor inflasi.

Rumus Indeks Williamson ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Ekstrimnya jika

angka indeks = nol maka menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan. Angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan antar kecamatan. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan.

Seharusnya yang diperbandingkan tingkat pertumbuhan wilayah pada kabupaten Karangasem adalah setingkat Desa. Dengan mengukur adanya ketimpangan atau disparitas antar desa diharapkan dapat diketahui bahwa jika perlakuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karangasem dalam hal pemberian Alokasi Dana Desa kepada keempat Desa, yaitu Desa Pempatan, Desa Selat, Desa Bebandem, dan Desa Tenganan, maka seharusnya tingkat disparitas pembangunan Desa relatif kecil. Akan tetapi data PDRB yang diperoleh dari BPS Kabupaten Karangasem hanya mengukur PDRB tingkat Kecamatan, sehingga akhirnya digunakan PDRB Kecamatan, sebagai proksi dari Desa. Sedangkan pengertian indeks ini adalah sebagai berikut : bila I_w mendekati 1 berarti sangat timpang, sedangkan bila I_w mendekati 0 berarti sangat merata (tidak timpang).

3.5.5. Perhitungan “*Klassen Typology*”

Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah digunakan alat analisa *Klassen Typology* (Tipologi Klassen). Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah.

Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu:

- daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income),
- daerah maju tapi tertekan (high income but low growth),
- daerah berkembang cepat (high growth but income),
- daerah relatif tertinggal (low growth and low income)

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kecamatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Kabupaten Karangasem;
- daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten Karangasem;
- daerah berkembang cepat, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten Karangasem;
- daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapat per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten Karangasem.

Dikatakan “tinggi” apabila indikator di suatu kecamatan lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kecamatan di Kecamatan Karangasem dan digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kecamatan lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem.

Data yang diperlukan adalah data-data perkembangan PDRB per kapita dan pertumbuhan PDRB untuk tiap Kecamatan kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2004-2008, beserta rata-ratanya untuk seluruh kecamatan Kabupaten Karangasem. Dari data-data tersebut akan digambarkan bentuk diagram Tipologi Klassen sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.

PDRB/ KAPITA (Y) LAJU PERTUM- BUHAN(R)	$y_i > Y$	$y_i < Y$
	$r_i > R$	$r_i < R$
	“cepat maju dan cepat tumbuh”	“berkembang cepat”
	“maju tapi tertekan”	“relatif tertinggal”

Gambar 3.1 Klasifikasi Pertumbuhan Menurut Analisa Tipologi Klassen

BAB 4 GAMBARAN UMUM

4.1. Bali Sebagai Contoh Pelaksanaan Desa Otonom

Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia, mempunyai keunikan khusus baik dalam sosial budaya, maupun dalam sistem pemerintahannya. Adat budaya pemerintahan tradisional warisan nenek moyang pada jaman dahulu masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Ketika reformasi terjadi dan pemerintah memberlakukan otonomi daerah dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, Propinsi Bali segera menetapkan Keputusan Gubernur Bali No.4 Tahun 2004 tentang „Pengembalian Peristilahan Kepala Desa, Dusun, dan Kepala Dusun“. Kebijakan ini merupakan wujud dari penyesuaian bentuk dan susunan pemerintahan desa yang berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat Bali. Tujuannya agar pemerintahannya lebih bersifat demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreativitas masyarakat. Sistem pemerintahan Desa di Bali kembali menggunakan sistem pemerintahan Desa seperti pada jaman sebelum orde baru. Sesuai dengan keputusan tersebut, maka istilah Kepala Desa diganti menjadi ”Perbekel”, sedangkan Dusun diganti menjadi ”Banjar Dinas”, dan Kepala Dusun diganti menjadi ”Kelian Banjar Dinas”.

Keunikan lain dari sistem pemerintahan Desa di provinsi Bali adalah bahwa selama ini masyarakat Bali mengenal adanya dua bentuk desa, yaitu : (1) Desa Dinas, desa yang bertugas melakukan kegiatan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi merupakan ’kepanjangan tangan dari pemerintah’. (2) Desa Adat, adalah desa yang mempunyai fungsi mengkoordinir kegiatan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan agama Hindu seperti upacara *Ngaben*, perkawinan dan lain-lain.

Desa adat atau yang dikenal sebagai „*Desa Pakraman*“ mempunyai kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang

keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan, melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adatnya, serta membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya, serta menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat. Fungsi-fungsi tersebut dijabarkan di dalam *Awig-awig Desa Adat*, dimana setiap desa adat memiliki awig-awig tertulis yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Awig-awig tersebut dibuat dan disahkan oleh krama desa adat, yang selanjutnya tercatat di Kantor Bupati/Walikota di daerah yang bersangkutan.

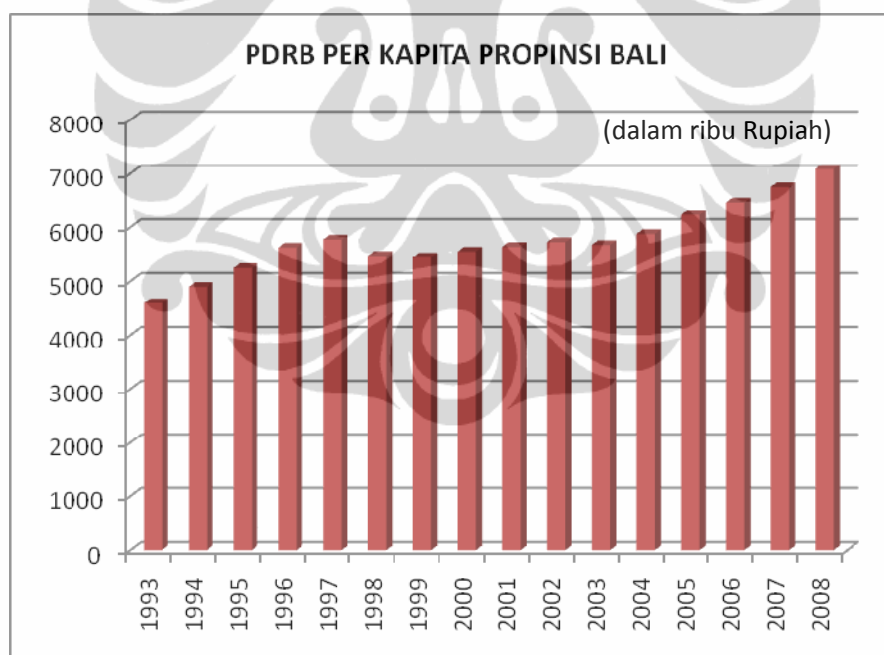
Desa Pakraman tidak sama dengan Pemerintahan Desa seperti Kelurahan, Perbekelan atau Desa Dinas yang sumber penataannya dari norma-norma Negara yang melayani warga Negara, sedangkan Desa Pakraman mengurus umat yang beragama Hindu. Namun demikian Desa Pakraman dan Pemerintahan Desa wajib bekerja sama.⁹

1. Peningkatan peranan Desa Pakraman dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, hukum, keagamaan dan lain-lain. Bila di sektor moneter peranan Desa Pakraman, melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sudah mulai menampakkan hasil, maka pemberdayaan ekonomi Desa Pakraman di sektor riil perlu ditingkatkan melalui Badan Usaha Milik Desa Pakraman (BUMDP), seperti: Koperasi Desa Pakraman, Pasar Desa Pakraman hingga akhirnya dapat membantu usaha-usaha kecil lainnya, sehingga ekonomi rakyat dapat lebih diberdayakan. Demikian juga misalnya lembaga keamanan, menurut catatan tahun 2003 jumlah Desa Pakraman di Bali seluruhnya 1404. Kalau tiap Desa Pakraman memiliki 1 peleton pecalang, maka jumlah seluruhnya menjadi 1404 peleton pecalang, cukup untuk mengamankan Bali. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menggali potensi itu dan me-manage dengan baik agar efektif dan efisien dalam tugas pengamanan.
2. Hubungan krama Desa Pakraman dengan LSM/ NGO yang peduli/ bernafaskan adat, budaya dan agama, perlu dijaga agar masing-masing tetap berdiri sendiri,

⁹ I Ketut Wiana. Desa adat adalah Desa Pakraman. www.parisada.org Minggu 28 September 2008

saling menghormati. Biarkan LSM/ NGO itu tumbuh dan berkembang di luar organisasi krama adat. Para anggotanya adalah pemikir kritis dan kreatif yang sangat peduli pada pembangunan Bali, karena itu wajib didukung eksistensinya. Desa Pakraman mengharapkan pengabdian yang tulus dari LSM/ NGO, bebas dari kepentingan pribadi, kelompok dan aliran politik.

Dalam era demokrasi dan otonomi yang sangat luas sekarang ini, diharapkan peran aktif semua pihak yang berkompeten, dalam rangka menemukan format pemerintahan desa yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi riil kemasyarakatan di Bali. Hal ini, demi untuk peningkatan keberdayaan desa pakraman, yang sampai saat sekarang masih tetap diharapkan tetap sebagai “benteng” terakhir bagi kelangsungan budaya, adat Bali serta Agama Hindu. Jangan sampai kebebasan berdemokrasi dan berotonomi itu lalu ‘kebablasan’ menjadi tindakan anarki yang merusak eksistensi desa pakraman.



Sumber : Badan Pusat Statistik Bali 2009

Grafik 4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Propinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.

Pola perkampungan/permukiman orang Bali dari segi strukturnya dibedakan atas dua jenis pola pemukiman, yaitu : Pertama, pola perkampungan mengelompok

padat, pola ini terutama terdapat pada desa-desa di Bali bagian pegunungan. Pola perkampungan di desa-desa ini bersifat memusat dengan kedudukan desa adat amat penting dan sentral dalam berbagai segi kehidupan warga desa tersebut. Kedua, pola perkampungan menyebar, pola ini terutama terdapat pada desa-desa di Bali dataran, dimana baik wilayah maupun jumlah warga desa disini jauh lebih luas dan lebih besar dari desa-desa pegunungan. Desa-desa di Bali dataran yang menunjukkan pola menyebar terbagi lagi dalam kesatuan-kesatuan sosial yang lebih kecil yang disebut Banjar. Banjar disini pada hakekatnya adalah juga suatu kesatuan wilayah dan merupakan bagian dari suatu desa dengan memiliki kesatuan wilayah, ikatan wilayah, ikatan pemujaan, serta perasaan cinta dan kebanggaan tersendiri.

Tata kehidupan masyarakat Bali secara umum terbagi menjadi dua, yaitu : Pertama, sistem kekerabatan yang terbentuk menurut adat yang berlaku, dan dipengaruhi oleh adanya klen-klen keluarga; seperti kelompok kekerabatan disebut Dedia (keturunan), pekurenan, kelompok kekerabatan yang terbentuk sebagai akibat adanya perkawinan dari anak-anak yang berasal dari suatu keluarga inti. Kedua, sistem kemasyarakatan merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah/ territorial administrasi (perbekelan/kelurahan) yang pada umumnya terpecah lagi menjadi kesatuan sosial yang lebih kecil yaitu banjar dan territorial adat. Banjar mengatur hal-hal yang bersifat keagamaan, adat dan masyarakat lainnya. Dari sistem kemasyarakatan yang ada ini maka warga desa bisa masuk menjadi dua keanggotaan warga desa atau satu yaitu : sistem pemerintahan desa dinas sebagai wilayah administratif dan desa pakraman. Dari kehidupan masyarakat setempat terdapat pula kelompok-kelompok adat.¹⁰

Pemerintahan Desa yang merupakan fokus dari pembangunan di setiap daerah, termasuk Bali, pasca otonomi daerah terlihat lebih agresif. Pemerintahan Desa di Bali menggunakan lagi istilah-istilah yang dulu pernah digunakan pada saat orde lama, yaitu Banjar (Dusun), Desa Pakraman (Desa Adat) untuk membedakan dengan Desa Dinas. Dilihat dari tipologi desa, Bali dapat dilihat dari asal-usul pembentukan dan bentuk kesatuan masyarakat adat. Dalam konteks ini muncul desa genealogis (dibentuk

10 Muhammad Zulfan Zubaidi, ST. <http://202.80.113.102/M5/5B.asp?W=37&P=51>. *Sistem Kemasyarakatan di Bali* . 4 November 2009.

berdasarkan garis keturunan), desa teritorial (kesamaan wilayah), desa campuran antara genealogis dan teritorial; belakangan ditambah dengan tipe desa administratif. Tipologi desa genealogis dan teritorial untuk saat ini tidak relevan lagi digunakan sebagai basis pengaturan desa secara beragam, karena kategori desa genealogis dan desa teritorial untuk masa sekarang sudah sulit ditemukan secara jelas. Akibat dari perubahan sosial, mobilitas sosial maupun transmigrasi, desa-desa sekarang tidak lagi bersifat homogen, tetapi telah menjadi heterogen dan bahkan mengalami fragmentasi sosial. Selain itu, kebijakan penyeragaman pada masa Orde Baru telah membuat model desa administratif berpengaruh kuat terhadap hilangnya karakteristik otonomi asli yang melekat pada desa genealogis dan teritorial. Karakteristik desa administratif tentu lebih menonjol daripada karakteristik genealogis dan teritorial. Tetapi untuk Bali, masih dapat terlihat perbedaan antara Desa genealogis dan teritorial dengan Desa administratif.

Tabel 4.1. PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Selama Tahun 1993 – 2006.

(Dalam ribu Rp)

Tahun	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar	Bali
1993	3978	3383	8521	4356	4058	3209	2669	2887	3684	4593
1994	4199	3602	9048	4680	4340	3395	2826	3084	3868	4897
1995	4458	3848	9641	5038	4648	3618	3007	3298	4068	5243
1996	4775	4119	10295	5436	4983	3867	3213	3533	4286	5628
1997	5037	4153	10859	5220	5244	3679	3354	3831	6670	5772
1998	4801	3969	10059	5041	5078	3718	3242	3684	6161	5472
1999	4799	3972	9860	5087	5100	3716	3244	3691	6092	5442
2000	4929	4059	10100	5292	5213	3794	3309	3795	6141	5550
2001	5015	4119	10409	5447	5412	3848	3360	3894	6254	5640
2002	5104	4250	10601	5546	5650	3912	3426	4008	6420	5724
2003	4966	4234	9566	5506	5587	3829	3293	3921	7392	5674
2004	5189	6929	14582	5704	5847	3947	3436	4050	7594	5876
2005	5552	7423	15016	5939	6163	4162	3809	4273	7819	6228
2006	5730	7726	16697	6281	6473	4276	3958	4506	7569	6465

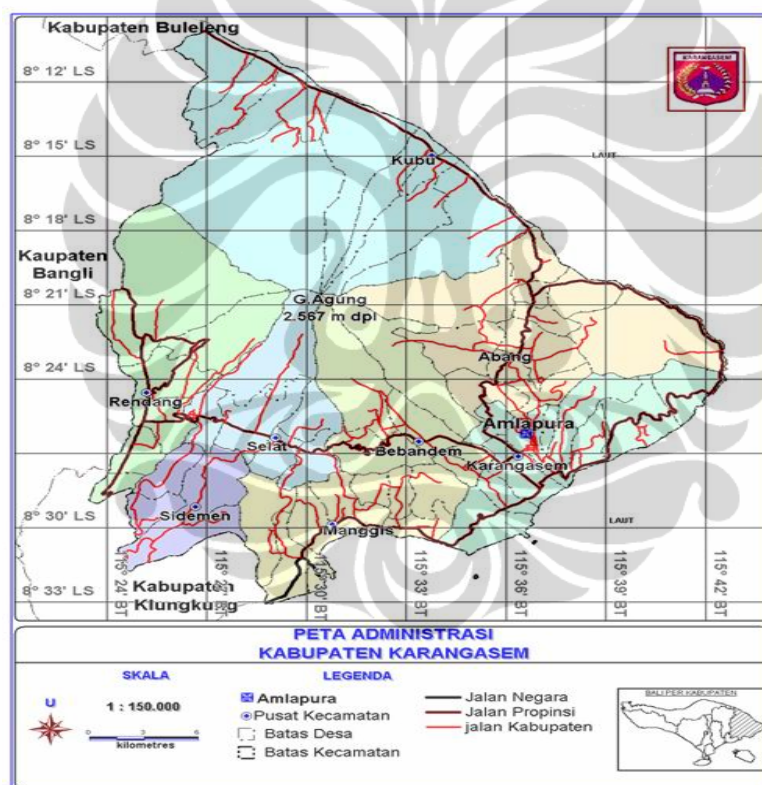
Sumber : Bappeda Propinsi Bali – 2006 dalam Ayu Savitri Gama (2006)

Bali memilih sektor pariwisata daerah sebagai lokomotif pengembangan ekonominya, tatanan sosial budaya masyarakat Bali dan potensi sumberdaya alamnya sangat akomodatif terhadap perkembangan sektor pariwisata. Dari data pada Tabel 4.1 terlihat bahwa pertumbuhan yang tinggi di Bali tidak berarti terjadi secara merata dan

seimbang di tingkat Kabupaten/Kota, apalagi di tingkat Kecamatan dan Desanya. Pertumbuhan terbesar terjadi di Kabupaten Badung (PDRB/Kapita = Rp.16.697.000), sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Karangasem (PDRB/Kapita = Rp.3.958.000).

4.2. Kabupaten Karangasem Sebagai Subyek Penelitian

Karangasem merupakan Kabupaten paling Timur di Pulau Bali. Secara geografis Kabupaten Karangasem terletak pada posisi $8^{\circ}00'00''$ - $8^{\circ}41'37,8''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}35'9,8''$ - $115^{\circ}54'8,9''$ Bujur Timur.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem mempunyai curah hujan sedang, dengan tingkat kesuburan tanah yang sedang dan hampir sebagian tanah di daerah ini ditutupi oleh pasir/material hasil letusan Gunung Agung. Kabupaten Karangasem mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh angin musim dan memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Karangasem

didominasi oleh tanah regosol dan tanah latosol. Khususnya di daerah dataran tinggi sebagian besar terbentuk dari tanah jenis andosol.

Kabupaten Karangasem mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : di sebelah Utara dengan Laut Bali, di sebelah Timur dengan Selat Lombok, di sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli dan Buleleng.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km² yang terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan dengan luas masing - masing kecamatan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.5.

Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 Kecamatan, 3 Kelurahan, 75 Desa, 52 Lingkungan dan 529 Dusun (Banjar Dinas). Untuk menjalankan roda pemerintahan di masing-masing tingkat wilayah dikepalai oleh seorang Camat untuk tingkat Kecamatan, Lurah untuk tingkat Kelurahan, Perbekel (Kepala Desa Dinas) untuk tingkat Desa, Kepala Lingkungan untuk tingkat Lingkungan, dan Kepala Dusun untuk tingkat Dusun (Banjar Dinas).

Tabel 4.2. Kecamatan dalam Kabupaten Karangasem dan Luas Wilayahnya

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	PROSENTASE (%)
1	<i>Rendang</i>	Menanga	109,70	13,07
2	<i>Sidemen</i>	Sidemen	35,15	4,19
3	<i>Manggis</i>	Ulakan	69,83	8,32
4	<i>Karangasem</i>	Amlapura	94,23	11,22
5	<i>Abang</i>	Abang	134,05	15,97
6	<i>Bebandem</i>	Bebandem	81,51	9,71
7	<i>Selat</i>	Selat	80,35	9,57
8	<i>Kubu</i>	Kubu	234,72	27,96
JUMLAH			839,54	100,00

Sumber : BPS Karangasem 2008

Selain Desa Dinas terdapat pula Desa Adat yang jumlahnya di Kabupaten Karangasem berjumlah 189 dan Banjar Adat yang jumlahnya 605. Keduanya mendukung Desa Dinas dan Banjar Dinas.

Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2008 adalah 430.251 jiwa yang terdiri dari 215.283 jiwa laki-laki dan 214.968 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga 106.710 untuk keadaan akhir tahun 2008. Kecamatan yang paling padat

penduduknya adalah Kecamatan Sidemen yaitu sebesar 966 jiwa per km² dengan luas wilayah yang paling kecil yaitu 35,15 km², sedangkan kecamatan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Kubu yaitu sebesar 304 jiwa per km² dengan luas wilayah terbesar, yaitu 234,72 km².

Tabel 4.3. Demografi Kabupaten Karangasem Tahun 2008

Kecamatan	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk Total	Jumlah Rumah Tangga	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk Per Km ²	% Penduduk Kecamatan Thd Kabupaten
Rendang	17.935	17.851	35.786	8.355	109,70	326	8,32 %
Sidemen	16.866	17.092	33.958	7.956	35,15	966	7,89 %
Manggis	23.637	23.565	47.202	11.143	69,83	676	10,97 %
Karangasem	42.587	42.296	84.883	22.184	94,23	901	19,73 %
Abang	34.508	33.920	68.428	16.984	134,05	510	15,90 %
Bebandem	24.461	24.446	48.907	12.542	81,51	600	11,37 %
Selat	19.612	20.160	39.772	10.751	80,35	495	9,24 %
Kubu	35.677	35.638	71.315	16.795	234,72	304	16,58 %
Total	215.283	214.968	430.251	106.710	839,54	512	100,00 %

Sumber : Karangasem Dalam Angka Tahun 2009. BPS Kabupaten Karangasem - Bali

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Karangasem dua tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang meningkat, walaupun peningkatannya tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat dimengerti mengingat sejak pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi secara umum, sehingga mempengaruhi nilai Produk Domestik Regional Brutto (PRDB). Pertumbuhan ekonomi dilihat dari PRDB Kabupaten Karangasem tahun dari tahun 2004 hingga 2008 (atas harga konstan Tahun 2000) ditunjukkan pada Tabel 4.4. Terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 5,052% per tahun dengan PDRB Rata-Rata sebesar 1.888.659,52. Sedangkan PDRB Perkapita Rata-Rata selama 2004-2008 sebesar Rp. 3,929,805.75. PDRB Perkapita setiap kecamatan dan kabupaten Karangasem ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Struktur Ekonomi suatu daerah sangat di tentukan oleh besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang di ciptakan oleh masing-masing sektor menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan

produksi dari masing-masing sector. Dengan mengetahui peranan masing-masing sektor maka dapat diketahui potensi masing-masing sektor ekonomi di kabupaten Karangasem.

Adapun peranan masing-masing sektor dapat dilihat dari distribusi presentase PRDB. Berdasarkan PRDB atas dasar harga berlaku, sektor pertanian masih memegang peranan penting di Kabupaten Karangasem, pada tahun 2008 besarnya 29,60% terhadap total PRDB di susul oleh sektor jasa sebesar 22,71 % dan urutan ketiga yang besarnya 17,33% ditempati oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor lain yang peranannya cukup besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,78%, sektor industri pengolahan 6,82%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,46%, serta sektor bangunan sebesar 4,76%.

Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kecamatan dan Kabupaten Karangasem (dalam juta Rupiah)

Wilayah	2004	2005	2006	2007	2008
Kecamatan :					
<i>Kubu</i>	145,177.87	152,500.70	159,537.11	167,641.98	175,483.38
<i>Selat</i>	124,375.14	130,415.40	135,456.47	141,150.17	146,507.15
<i>Bebandem</i>	136,136.73	142,756.58	149,094.41	156,087.68	162,864.75
<i>Abang</i>	174,463.69	183,571.80	192,145.02	202,239.92	212,435.34
<i>Karangasem</i>	331,178.89	350,478.34	365,722.94	386,414.76	407,290.87
<i>Manggis</i>	294,507.45	310,775.36	328,402.78	349,718.57	372,933.14
<i>Sidemen</i>	82,239.02	86,061.94	89,556.62	93,172.66	96,594.45
<i>Rendang</i>	78,011.62	82,000.42	85,248.29	89,317.85	93,111.37
Kabupaten :					
<i>Karangasem</i>	1,366,090.41	1,436,224.88	1,505,163.65	1,583,407.93	1,663,749.20

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem 2009 – Karangasem Dalam Angka

Secara umum kontribusi sektor-sektor tersebut dapat dibagi menjadi tiga sektor besar meliputi :

- Sektor Primer yang meliputi : pertanian dan jasa
- Sektor Sekunder yang meliputi : perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi

- Sektor Tersier yang meliputi :, industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan; jasa perusahaan; bangunan.

Dari kontribusi tersebut jika dilihat dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan disemua sektor kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor bangunan. Sedangkan sektor pertanian turun cukup banyak, demikian pula halnya dengan jasa.

4.3. Kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dampak pembangunan, dimana tujuan positif dari pembangunan adalah penurunan tingkat kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan masalah yang bersifat multidimensi karena berkaitan dengan berbagai aspek atau dimensi kehidupan masyarakat, sehingga pemecahan masalah kemiskinan tersebut dengan sendirinya menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Kemiskinan juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang bersifat lokal. Oleh karena itu, dalam penanggulangan kemiskinan juga perlu memperhatikan berbagai karakteristik yang bersifat spesifik lokal, termasuk di dalam pengukuran kemiskinan perlu memasukkan berbagai indikator yang spesifik lokal. Sehingga diperlukan pula adanya perubahan cara pandang dalam melihat masalah kemiskinan tersebut.

Tabel 4.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 1999-2009

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)			Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu jiwa)			Prosentase Penduduk Miskin (dalam %)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1999	94.714	81.456	-	114.5	143.3	257.8	9.42	7.94	8.53
2000	95.826	82.413	-	80.1	96.7	176.8	5.49	5.85	5.68
2001	105.515	90.754	-	67.1	181.3	248.4	4.30	11.35	7.87
2002	145.650	118.463	130.586	98.9	122.9	221.8	5.72	8.25	6.89
2003	158.415	130.668	141.179	99.7	146.4	246.1	6.14	8.48	7.34
2004	158.639	136.166	-	87.0	144.9	231.9	5.05	8.71	6.85
2005	166.962	136.897	152.519	105.9	122.5	228.4	5.40	8.51	6.72
2006	174.038	142.579	161.763	127.4	116.0	243.5	6.40	8.03	7.08
2007	179.141	147.963	165.954	119.8	109.3	229.1	6.01	7.47	6.63
2008	190.026	158.206	176.569	115.1	100.6	215.7	5.70	6.81	6.17
2009	211.461	176.003	196.466	92.1	89.7	181.7	4.50	5.98	5.13

Sumber : BPS Propinsi Bali (Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional)

Kemiskinan tidak lagi hanya dilihat dari sisi ekonomi atau moneter saja, akan tetapi dari berbagai aspek yang terkait dengan kemiskinan tersebut. Masalah kemiskinan lebih banyak dijumpai di daerah-daerah perdesaan (rural phenomenon), sehingga upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus dimulai dari daerah perdesaan. Dalam kaitan ini, pembangunan daerah perdesaan termasuk di dalamnya sektor pertanian, infrastruktur perdesaan seperti jalan, irigasi, listrik, lembaga keuangan, sarana air bersih, dan lain-lain, perlu mendapatkan prioritas utama di dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan.

Pada tahun 2005 menurut BPS Indonesia besarnya indeks kemiskinan propinsi Bali adalah nomer tiga terendah di Indonesia, yaitu DKI Jakarta (13,2), Jogjakarta (16.1) dan Bali (17.3). Dalam hal jumlah orang miskin di Propinsi Bali sesuai dengan data Podes-BPS Tahun 2005 menunjukkan bahwa jumlah total orang miskin di Propinsi Bali sebesar 181.700 jiwa atau 5.13% dari total penduduk Bali. Tabel 4.3. menunjukkan data-data mengenai jumlah orang miskin di Bali berdasarkan klasifikasi daerah. Terlihat adanya penurunan jumlah orang miskin, meskipun batas garis kemiskinan mengalami peningkatan.

Jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar daripada jumlah orang miskin di perkotaan, tetapi jumlah tersebut mengalami penurunan hingga tahun 2009 dan terjadi hal yang berlawanan dimana jumlah orang miskin di pedesaan lebih rendah dari perkotaan. Terjadinya urbanisasi merupakan salah satu penyebab tingginya kemiskinan di perkotaan, mengingat pusat pertumbuhan di Bali adalah Denpasar dan kota-kota kabupaten yang menjadi tumpuan mencari pekerjaan. Kondisi ini semakin memperparah adanya kesenjangan pembangunan antar kabupaten di Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Savitri (2006) menunjukkan adanya disparitas dan konvergensi PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Propinsi Bali.

Jumlah orang miskin per kabupaten/kota ditunjukkan dalam Tabel 4.4. Dari tabel terlihat adanya penurunan orang miskin di beberapa kabupaten dan ada beberapa kabupaten yang justru meningkat di beberapa kabupaten. Disparitas pembangunan yang terjadi antara desa dan kota menyebabkan adanya penambahan penduduk miskin di perkotaan, karena peningkatan pengangguran di pedesaan. Pengangguran terbuka di Propinsi Bali pada tahun 2008 saja menurut BPS Propinsi Bali berdasarkan hasil

Sakernas 2008, menunjukkan angka 42.195 orang laki-laki (3.64%) dan 27.353 orang perempuan (2.91%).

Tabel 4.6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota tahun 2005-2007

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu jiwa)			Prosentase Penduduk Miskin (dalam %)		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Jembrana	22.9	26.3	25.0	9.1	10.5	9.9
Tabanan	37.2	31.8	30.2	9.2	7.8	7.5
Badung	22.0	18.2	17.4	5.3	4.6	4.3
Gianyar	21.6	27.1	25.8	5.1	6.3	6.0
Klungkung	13.3	15.7	15.0	8.2	9.5	9.1
Bangli	14.1	16.7	15.9	6.7	7.9	7.5
Karangasem	30.3	35.8	34.1	7.7	9.4	9.0
Buleleng	55.6	56.1	53.4	9.2	9.2	8.7
Denpasar	11.4	15.7	12.3	2.2	2.7	2.1
BALI	228.4	243.5	229.1	6.72	7.08	6.63

Sumber : BPS Propinsi Bali (Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional)

Karangasem dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali yang masuk dalam kategori daerah tertinggal di Indonesia. Hampir separuh dari penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan.

Menurut BPS tahun 2007 pada tingkat kabupaten se-Bali dalam kategori tingginya kemiskinan, maka Kabupaten Karangasem menempati rangking kedua. Angka kemiskinan mencapai 41.826 RTM setelah Kabupaten Buleleng dengan angka 47.908, disusul Bangli sejumlah 13.191 RTM, Tabanan 11.672 TRM, Klungkung 8.460 RTM, Gianyar dengan 7.629 RTM, Jembrana dengan 6.998 RTM, Badung 5.201 RTM, dan Denpasar sejumlah 4.159 RTM. Sedangkan untuk tingkat desa terdapat sepuluh desa yang berada di Karangasem, yang tercatat sebagai Desa sangat miskin.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung jumlah orang miskin di Karangasem adalah Luas Lantai Bangunan kurang dari 8 meter/orang, Lantai terbuat dari tanah/bambu/kayu murah, Dinding rumah berkualitas rendah/rumbia/kayu/bambu/tanpa plester, Tidak mempunyai WC, Tanpa listrik, Sumber air dari sumur/tak terlindung, Bahan Bakar kayu/arang/minyak, Makan Daging seminggu sekali, Membeli 1 stel pakaian pertahun, Makan 1 -2 kali sehari, Tak mampu berobat di Puskesmas, Pendapatan dibawah Rp. 600.000 per bulan, Pendidikan dibawah

setingkat SD, Tidak punya tabungan minimal 500.000 kebawah, sepeda motor, emas, ternak, kapal motor dan modal lain.¹¹

Kemiskinan di Karangasem merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan masih besarnya jumlah dan tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 masih sebesar 37,17 juta (16,58 persen) dari total penduduk; persentase penduduk miskin di 11 kabupaten/kota target, bahkan mencapai angka rata-rata sebesar 42,7 persen jauh di atas rata-rata nasional.

Tabel 4.7. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin 2004 - 2008

Kecamatan	2004		2005		2006		2007		2008	
	Jml KK	Jml Pra KS	Jml RT	Jml RTM	Jml RT	Jml RTM	Jml RT	Jml RTM	Jml RT	Jml RTM
Rendang	9.243	930	7.657	2.376	7.657	2.376	8.328	2.249	8.355	1.333
Sidemen	7.847	715	7.924	2.847	7.924	2.847	7.960	2.632	7.956	2.636
Manggis	10.377	1.280	10.287	2.667	10.287	2.667	11.049	2.504	11.143	1.880
Karangasem	19.798	3.348	20.333	8.352	20.333	8.352	19.520	7.996	22.184	8.577
Abang	15.129	4.338	14.987	7.834	14.987	7.834	16.895	7.611	16.984	6.503
Bebandem	11.340	2.679	11.940	6.004	11.940	6.004	12.443	5.818	12.542	5.806
Selat	9.498	1.695	9.599	3.722	9.599	3.722	10.244	3.629	10.751	2.975
Kubu	14.297	1.845	14.653	8.024	14.653	8.024	16.474	7.833	16.795	6.211
Karangasem	97.529	14.613	97.653	41.826	97.653	41.826	102.913	40.272	106.710	35.921

Sumber : Karangasem Dalam Angka Tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009. BPS Kabupaten Karangasem - Bali

- Catatan : - Data Tahun 2004 adalah Data Kepala Keluarga dan Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karangasem per Kecamatan
 - Data Tahun 2005 adalah Hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE'05) Kabupaten Karangasem per Kecamatan
 - Data Tahun 2006 adalah Hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE'05) Kabupaten Karangasem per Kecamatan
 - Data Tahun 2007 adalah Hasil Pemutahiran Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE'05) Kabupaten Karangasem per Kecamatan
 - Data Tahun 2008 adalah Hasil Pendataan PPLS'08 Kabupaten Karangasem per Kecamatan.

11 http://www.karangasem-bangkit.org/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=54 Separuh Penduduk Karangasem Miskin, tanggal 10 April 2007.

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Karangasem meliputi empat desa yang berada di dalam empat kecamatan. Adapun lokasi penelitian adalah : Desa Pempatan, Kecamatan Rendang; Desa Selat, Kecamatan Selat; Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem; Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Peta Lokasi Penelitian di Empat Desa, Kabupaten Karangasem, Bali.

Penelitian dilakukan pada bulan Nopember – Desember 2009, meliputi pengambilan data sekunder dari berbagai tempat, seperti BPS Propinsi Bali dan BPS Kabupaten Karangasem, Bali. Selain itu dilakukan pengamatan langsung di lapangan pada keempat desa tersebut. Melakukan dialog dengan para pimpinan adat dan

Universitas Indonesia

pimpinan pemerintahan daerah Kecamatan. Hasil yang diperoleh merupakan data-data dasar yang dipergunakan dalam pembahasan mengenai efektifitas Alokasi Dana Desa dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan wilayah. Berikut terdapat tiga bagian besar yang akan dihitung dalam penelitian ini, yaitu : Jumlah Alokasi Dana Desa di keempat desa dan cara perhitungannya dari tahun 2007 – 2009; Analisa “*Location Quotient*” di Kabupaten Karangasem dari tahun 2004-2008, Indeks Williamson Kabupaten Karangasem dari tahun 2004-2008; dan Analisa Tipologi Klassen ke empat Kecamatan di Kabupaten Karangasem (2004-2008).

5.2. Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Karangasem

5.2.1. Proses Penentuan Alokasi Dana Desa per Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) baru diterapkan di Kabupaten Karangasem pada tahun 2007, sehingga pada tahun ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan ADD. Program pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karangasem dilandasi dengan adanya UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan juga PP No.72/2005 tentang Desa yang memberikan akses bagi desa untuk memperoleh dana perimbangan berupa Alokasi Dana Desa. Sedangkan formula perhitungan ADD yang digunakan di setiap desa seharusnya sesuai dengan Surat Mendagri No.140/640/SJ Tahun 2005 perihal “Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa”.

Pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem mengeluarkan Keputusan Bupati No.52 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran yang mulai membagikan dana perimbangan berupa Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) kepada desa di Kabupaten Karangasem yang berjumlah total 75 desa terdiri dari Rendang 6 Desa, Selat 8 Desa, Sidemen 9 Desa, Bebandem 7 Desa, Manggis 12 Desa, Karangasem 8 Desa, 3 Kelurahan (Karangasem, Padangkerta, Subagan), Abang 14 Desa, Kubu 9 Desa, dengan rincian seperti terlampir pada Lampiran 4.

Sedangkan jumlah Dusun (Banjar) yang berada di dalam Kabupaten Karangasem berjumlah sebanyak 529 Dusun dengan rincian : Rendang 62

Banjar Dusun, Selat 66 Banjar Dusun, Sidemen 51 Banjar Dusun, Bebandem 64 Banjar Dusun, Manggis 59 Banjar Dusun, Karangasem 70 Banjar Dusun dan 52 Lingkungan, Abang 96 Banjar Dusun, Kubu 61 Banjar Dusun.

Berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem No. 52 Tahun 2007 tentang “Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2007, maka dibuatkanlah surat yang ditandatangani oleh Asisten Praja, atas nama Sekretaris Daerah No.141/957/Pemdes Tanggal 23 Mei 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana/Kelurahan (ADD/K). Surat yang berisi Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 2007 tersebut dikirimkan kepada kedelapan Camat, dengan tembusan Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekda.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa jumlah total yang diberikan oleh Kabupaten Karangasem untuk pemerintahan Desa yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) untuk tahun 2007 untuk 8 kecamatan, 75 desa, 3 Kelurahan adalah sebesar Rp. 11.347.583.186 dengan rincian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.1. Nilai yang tercantum dalam surat lampiran Keputusan Bupati ini sedikit berbeda dengan Lampiran 1. yang merupakan hitungan dengan program excel windows.

SK Bupati No.342 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem No.52 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2007, dikeluarkan dikarenakan adanya perubahan format penulisan tabel pada surat Sekda No. 141/957/Pemdes, walaupun perhitungannya sama. Dalam format surat terdahulu dirinci perhitungan ADD Dana Perimbangan dengan bagian-bagian Pembagian Merata 60% dan Proporsional 40%. Sedangkan dalam surat terakhir digabungkan langsung jumlah total keduanya. Pada Tabel 4.2. ditunjukkan rincian contoh perhitungan penentuan ADD untuk seluruh Desa di Kabupaten berdasarkan data-data lapangan pada tahun 2007.

Program penyaluran ADD tahun 2008 secara lengkap ditunjukkan pada Lampiran 2., dimana pembagiannya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem No.147 Tanggal 19 Maret 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana

Desa Tahun Anggaran 2008. Jumlah total yang diterima seluruh desa se Kabupaten Karangasem, Bali adalah sebesar Rp. 18.367.033.014.

Tabel 5.1. Penerimaan Alokasi Dana Desa di Empat Desa, Kabupaten Karangasem – Bali, Tahun 2007 - 2009.

No.	Keterangan	Desa Penelitian			
		Desa Pempatan	Desa Selat	Desa Bebandem	Desa Tenganan
Tahun 2007					
1	Pembagian Merata (60%) ADDM	72,987,243.00	55,751,382.00	76,434,415.20	52,304,209.80
2	Pembagian Proporsional (40%) ADDP	48,658,162.00	37,167,588.00	50,956,276.80	34,869,473.20
3	Jumlah Total ADD	121,645,405.00	92,918,970.00	127,390,692.00	87,173,683.00
4	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	38,907,892.00	38,907,892.00	38,907,892.00	38,907,892.00
5	Total Dana Yang Diterima Desa	160,553,297.00	131,826,862.00	166,298,584.00	126,081,575.00
6	Pembagian Dana ADD untuk Pem Des (70%)	112,387,307.90	92,278,803.40	116,409,008.80	88,257,102.50
7	Pembagian Dana ADD untuk Operasional Desa (30%)	48,165,989.10	39,548,058.60	49,889,575.20	37,824,472.50
8	Pembagian Dana ADD untuk BPD (22% dari OD)	10,596,517.60	8,700,572.89	10,975,706.54	8,321,383.95
9	Total ADD Se Kabupaten Karangasem	7,598,142,285.00	7,598,142,285.00	7,598,142,285.00	7,598,142,285.00
10	Total Bagi Hasil Pajak/Retribusi Se Kab. Kr.As.	2,918,091,900.00	2,918,091,900.00	2,918,091,900.00	2,918,091,900.00
11	Total Pembagian Dana ADD untuk BPD	694,071,456.21	694,071,456.21	694,071,456.21	694,071,456.21
Tahun 2008					
1	Pembagian Merata (60%) ADDM	113,380,720.10	113,380,720.10	113,380,720.10	113,380,720.10
2	Pembagian Proporsional (40%) ADDP	150,031,167.90	64,299,084.90	128,598,169.90	53,582,570.90
3	Jumlah Total ADD	263,411,888.00	177,679,805.00	241,978,890.00	166,963,291.00
4	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	55,925,906.00	55,925,907.00	55,925,907.00	55,925,907.00
5	Total Dana Yang Diterima Desa	319,337,794.00	233,605,712.00	297,904,797.00	222,889,198.00
6	Pembagian Dana ADD untuk Pem Des (70%)	223,536,455.80	163,523,998.40	208,533,357.90	156,022,438.60
7	Pembagian Dana ADD untuk Operasional Desa (30%)	95,801,338.20	70,081,713.60	89,371,439.10	66,866,759.40
8	Pembagian Dana ADD untuk BPD (22% dari OD)	21,076,294.40	15,417,976.99	19,661,716.60	14,710,687.07
9	Total ADD Se Kabupaten Karangasem	14,172,590,013.00	14,172,590,013.00	14,172,590,013.00	14,172,590,013.00
10	Total Bagi Hasil Pajak/Retribusi Se Kab. Kr.As.	4,194,442,996.00	4,194,442,996.00	4,194,442,996.00	4,194,442,996.00
11	Total Pembagian Dana ADD untuk BPD	1,212,224,178.59	1,212,224,178.59	1,212,224,178.59	1,212,224,178.59
Tahun 2009					
1	Pembagian Merata (60%) ADDM	51,127,494.00	51,127,494.00	51,127,494.00	51,127,494.00
2	Pembagian Proporsional (40%) ADDP	67,654,524.00	28,994,796.00	57,989,592.00	24,162,330.00
3	Jumlah Total ADD	118,782,018.00	80,122,290.00	109,117,086.00	75,289,824.00
4	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	73,748,560.00	73,748,560.00	73,748,560.00	73,748,560.00
5	Total Dana Yang Diterima Desa	192,530,578.00	153,870,850.00	182,865,646.00	149,038,384.00
6	Pembagian Dana ADD untuk Pem Des (70%)	134,771,404.60	107,709,595.00	128,005,952.20	104,326,868.80
7	Pembagian Dana ADD untuk Operasional Desa (30%)	57,759,173.40	46,161,255.00	54,859,693.80	44,711,515.20
8	Pembagian Dana ADD untuk BPD (22% dari OD)	12,707,018.15	10,155,476.10	12,069,132.64	9,836,533.34
9	Total ADD Se Kabupaten Karangasem	6,390,936,694.98	6,390,936,694.98	6,390,936,694.98	6,390,936,694.98
10	Total Bagi Hasil Pajak/Retribusi Se Kab. Kr.As.	5,531,142,000.00	5,531,142,000.00	5,531,142,000.00	5,531,142,000.00
11	Total Pembagian Dana ADD untuk BPD	786,857,193.87	786,857,193.87	786,857,193.87	786,857,193.87

Sumber : Data Monografi Desa 2007-2009

Program penyaluran ADD tahun 2009 secara lengkap ditunjukkan pada Lampiran 3. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem No.248 Tanggal 8 April 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2009. Jumlah yang diterima seluruh desa se Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp. 11.922.078.694,98

Data-data tentang penerimaan ADD setiap tahun dari tahun 2007 hingga tahun 2009 ditunjukkan pada lampiran tesis ini. Untuk memudahkan pengamatan, maka hasil penerimaan empat desa di empat kecamatan pada Kabupaten Karangasem, diringkas pada Tabel 5.1.

Perhitungan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Kabupaten Karangasem berbeda dengan cara perhitungan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005, karena data-data yang tersedia kurang memadai dan juga perhitungannya cukup rumit. Perhitungan hanya berdasarkan atas jumlah total Desa dan total Dusun (Banjar Dinas).

Sebagai contoh perhitungan yang digunakan oleh Kabupaten Karangasem dalam penentuan jumlah ADD yang diterima oleh setiap Desa ditunjukkan pada Tabel 5.2. Sebagaimana diketahui bahwa besarnya ADD/K yang harus dibagikan kepada seluruh Desa di Kabupaten Karangasem diambil dari Anggaran Kabupaten pada Bagian Dana Perimbangan. Pada Surat Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Karangasem tanggal 16 Februari 2009 tentang Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan menyebutkan bahwa untuk Tahun 2007 besarnya bantuan ADD yang diambil dari Bagian Dana Perimbangan adalah sebesar Rp. 6.390.936.694,98. Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk seluruh desa diambil dari Bagian Dana Perimbangan di atas, yaitu sebesar Rp. 6.390.936.694,98. Untuk menentukan bagian ADD yang diterima merata (ADDM), dihitung sebesar 60% dari nilai Bagian Dana Perimbangan di atas. Sedangkan bagian ADD yang diterima proporsional (ADDP), dihitung sebesar 40% dari nilai Bagian Dana Perimbangan.

Penentuan ADDM dan ADDP menggunakan data jumlah desa se Kabupaten Karangasem yang jumlahnya 75 Desa, dan jumlah Dusun (Banjar Dinas) se Kabupaten Karangasem sebanyak 529 Banjar Dinas. Sehingga setiap desa akan memperoleh dua jenis ADD yaitu : ADD Pembagian Merata (60%) sebesar Rp.51.127.493,56/Desa dan ADD Proporsional (40%) sebesar Rp 4.832.466,31 / Banjar Dinas.

Tabel 5.2. Contoh Perhitungan ADD Tahun 2007 di Kabupaten Karangasem

Rincian	Nilai (Rp)
<i>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</i>	
- Gaji Perbekel dan Perangkat Desa	14.930.750.000,00
- Bagian Dana Perimbangan	6.390.936.694,98
- Total	21.321.686.694,98
<i>Alokasi Dana Desa se Kab. Karangasem</i>	
Σ ADD = Jumlah Bagian Dana Perimbangan	6.390.936.694,98
Σ ADDM (Merata) = 60% dari Σ ADD	3.834.562.016,99
Σ ADDP (Proporsional) = 40% dari Σ ADD	2.556.374.677,99
<i>ADD yang diterima setiap Desa dan Banjar Dinas</i>	
ADD Pembagian Merata (60%)	
= Σ ADDM / Σ Desa se-Kabupaten	
= Rp. 3.834.562.016,99 / 75 Desa	51.127.493,56
ADD Proporsional (40%)	
= Σ ADDP / Σ Banjar Dinas se- Kabupaten	
= Rp. 2.556.374.677,99 / 529 Banjar Dinas	4.832.466,31
Catatan :	
Jika misalnya Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali memiliki 11 Banjar Dinas, maka jumlah ADD yang diterima oleh Desa Pempatan adalah :	
-	ADD Pembagian Merata (60%)
= Rp. 51.127.493,56	
-	ADD Pembagian Proporsional
(40%) = Rp. 4.832.466,31 X 11	
-	= Rp. 53.157.129,41
-	Total ADD
= Rp. 104.284.622,97	

Sumber: Data ADD dari Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Karangasem - Bali

Selain dana ADD tersebut setiap Desa mendapatkan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Untuk tahun 2009 Desa Pempatan memperoleh Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar **Rp. 73.748.560,00**. Sehingga total dana yang diperoleh Desa Pempatan adalah : **Rp. 178.033.182,97**.

Dari proses penentuan besarnya ADD di Kabupaten Karangasem, dapat disimpulkan bahwa penentuan ADD tidak sesuai dengan Surat Mendagri

No.140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005, yang mengharuskan dilakukannya pembobotan terhadap Desa. Sebagaimana diutarakan sebelumnya, bahwa penyelenggaraan ADD harus memenuhi asas merata dan asas adil, yang direpresentasikan pada ADDM (Merata) dan ADDP (Proporsional). Dalam hal asas merata, Kabupaten Karangasem sudah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu ADDM diperoleh dengan membagi 60% dari total ADD yang harus disalurkan dengan jumlah total desa yang ada di Kabupaten Karangasem. Tetapi asas keadilan masih belum dipenuhi dalam perhitungan yang berlaku, karena jumlah ADDP sebesar 40% dari total ADD hanya dibagi dengan jumlah banjar dinas saja, tidak dilakukan pembobotan terhadap tiap Desa.

Kelemahan perhitungan tersebut adalah bahwa jika terdapat dua Desa yang mempunyai jumlah Banjar Dinas yang sama tetapi terdapat perbedaan dalam luas wilayah dan kepadatan penduduk, maka Desa yang memiliki luas wilayah yang besar dan padat penduduk akan menerima jumlah yang sama dengan Desa yang luas wilayahnya sempit dan jumlah penduduknya sedikit. Akibatnya jika diasumsikan dilakukan penyaluran yang sama kepada sektor-sektor yang telah ditetapkan pada kedua Desa tersebut, maka dipastikan akan terjadi perbedaan akan hasil pembangunan Desa yang dapat menyebabkan disparitas (kesenjangan) antar Desa. Belum lagi jika dilihat dari jumlah orang miskin di tiap Desa yang menjadi sasaran utama program ADD dan juga menjadi indikator keberhasilan program ADD. Perbedaan jumlah orang miskin yang sangat besar antar Desa sangat mempengaruhi efektivitas program Alokasi Dana Desa.

5.2.2. Proses Penyaluran Alokasi Dana Desa

Proses yang dilakukan sehubungan dengan penyaluran ADD dimulai dengan diadakannya forum "*Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)*" sebagai wadah berhimpunnya semua elemen yang ada di masyarakat, dalam menentukan Rencana Pengalokasian Dana ADD pada tahun bersangkutan. Musyawarah Desa ini dihadiri oleh perwakilan Kecamatan, Perangkat Desa, baik Desa Dinas maupun Desa Adat. Selain memutuskan

program yang akan dilakukan, juga menentukan Petugas Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Petugas Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), serta Panitia Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K). Hasil dari pertemuan ini akan disampaikan kepada Kecamatan untuk dipergunakan sebagai pembanding laporan hasil kerja yang dilakukan setelah dana ADD diterima dan dipergunakan.

Musrenbangdes diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, menimbulkan rasa tanggung jawab secara bersama-sama, masing-masing unsur akan saling menghargai, saling menghormati dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu membangun Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa.

Proses "*Bottom Up*" dalam penentuan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang menyusun Program Perencanaan dan Anggaran Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam tahun anggaran berjalan, melalui proses perencanaan partisipatif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Proses "*Top Down*" yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD), yaitu badan di bawah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Karangasem yang bertugas untuk melakukan perhitungan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan formulasi yang diberikan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal "Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa" sebagai acuan bagi daerah berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dll) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Kedua proses ini bertemu ketika kemudian Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem tentang “Penetapan Alokasi Dana Desa” tahun anggaran tertentu, yang berarti dana siap dicairkan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Surat Keputusan Bupati Karangasem tersebut akan diedarkan kepada seluruh Camat di Kabupaten Karangasem yang berjumlah delapan, yaitu : Karangasem, Manggis, Kubu, Bebandem, Abang, Selat, Sidemen, dan Rendang. Tugas Camat selanjutnya adalah menginformasikan kepada seluruh Perbekel (Kepala Desa Dinas) dan Lurah untuk kemudian mencairkan dananya melalui BPD ke rekening Desa dan merupakan bagian dari Pendapatan Desa.

Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran dana ADD ini adalah seringkali adanya keterlambatan dalam penyaluran dana. Sesuai dengan ketentuan bahwa dana yang telah disetujui dapat diambil oleh masing-masing Desa secara bertahap setiap triwulan. Sebagai contoh di desa Selat, untuk tahun 2007 terdapat keterlambatan hingga bulan Oktober, sedangkan tahun 2008 disalurkan bulan Juli dan November, sedangkan untuk tahun 2009 belum ada pengambilan dana pada saat penelitian dilakukan.

Keterlambatan penyaluran dana ini mempunyai dampak negatif, yaitu pertama akan menyulitkan pemanfaatan dana sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh masing-masing Desa. Selain daripada itu akan menimbulkan kerugian dalam hal pengendapan dana, karena ada beberapa Desa yang mempunyai program untuk disalurkan ke dalam Program Simpan Pinjam Desa. Masuknya dana lebih awal sesuai dengan yang ditentukan akan lebih menguntungkan dalam hal penerimaan sukubunga penempatan dan pada Desa yang bersangkutan.

5.2.3. Proses Penggunaan Alokasi Dana Desa

Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) akan dialokasikan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%, sedangkan yang dipergunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa adalah 30%. Untuk

pembiayaan Badan Perwakilan Desa (BPD) dana yang dialokasikan nilainya sebesar 22% dari Nilai Dana Operasional Pemerintahan Desa.

Tabel 5.3. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

No.	Penggunaan ADD	Rincian Sasaran Kegiatan	Prosentase(%)
1	Pemberdayaan Masyarakat		70.0%
		- Penanggulangan Kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin	20.0%
		- Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	5.0%
		- Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK	5.0%
		- Bantuan Desa	21.5%
		- Lain-lain, seperti :	49.5%
		o bantuan operasional banjar	
		o pembentukan BUMDes	
		o peningkatan derajat kesehatan desa	
		o usaha pendidikan luar sekolah	
		o peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat (linmas)	
		o pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga	
		o pembangunan infrastruktur desa	
		o pengembangan wilayah terpencil	
		o pengembangan teknologi tepat guna	
2	Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		30%
		- Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Bantuan Purna Bakti dan Uang Duka sesuai PP No.72/2005	10.0%
		- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada Masyarakat	10.0%
		- Tunjangan dan Biaya Operasional BPD sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati No.248/2009	10.0%
Total			100%

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Tanggal 6 April 2009 No.12 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Salah satu tujuan terpenting dari Alokasi Dana Desa adalah menanggulangi tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah, terutama di tingkat pedesaan. Selain itu juga mengurangi tingkat kesenjangan dan tingkat

pengangguran. Oleh karena itu salah satu indikator keberhasilan ADD adalah berkurangnya jumlah orang miskin, berkurangnya jumlah pengangguran, serta berkurangnya kesenjangan.

Tingkat efektivitas suatu program dapat diukur dengan pencapaian indikator tersebut diatas. Indikator ekonomi yang dapat dipergunakan adalah indikator kemiskinan, PDRB per kapita, indeks Williamson, dan tipology Klassen.

Sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Tanggal 6 April 2009 Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan ketahanan social.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat

Untuk menilai apakah pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) berhasil atau tidak, digunakan beberapa indikator, yaitu :

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktivitas mereka dalam kegiatan ekonomi
2. Berkurangnya pengangguran karena tumbuhnya lapangan kerja di pedesaan
3. Meningkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa

4. Terbentuknya Badan-badan Usaha Milik Desa dan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PAD)
5. Angka kesakitan/kematian DBD/Malaria/GE dan berfungsinya posyandu-posyandu dan Polindes/Poskesdes di semua Desa, tingkat kematian ibu, tingkat kematian bayi/anak, angka gizi buruk.
6. Terbentuknya lembaga pendidikan di luar sekolah dan meningkatnya prestasi siswa.
7. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam system keamanan lingkungan
8. Terciptanya pemerataan pembangunan di semua Banjar Dinas dan berkembangnya lingkungan terpencil
9. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana umum di pedesaan
10. Semaraknya peranan perempuan dalam pembangunan melalui aktifitas kegiatan ekonomi produktif
11. Meningkatnya swadaya gotong-royong dan terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat
12. Berkembangnya teknologi tepat guna di pedesaan dan meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dalam penelitian ini indikator keberhasilan yang dianalisa dibatasi pada indikator penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Keterbatasan data pada desa-desa yang diteliti menyulitkan untuk pengambilan contoh perhitungan di setiap desa. Data yang cukup memadai diperoleh pada Desa Selat, Kabupaten Selat.

ADD yang diterima oleh Desa Selat 70% penggunaannya untuk Biaya Pembangunan Desa, kemudian oleh Desa dilakukan pembagian dana untuk beberapa kegiatan, yang kemudian diambil sebagai contoh untuk diamati sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 5.3. Dari seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Desa dari Biaya Pembangunan Desa hanya 30% yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membangkitkan perekonomian Desa.

Tabel 5.4. Beberapa Data Penggunaan ADD Desa Selat Kecamatan Selat Tahun 2007 - 2008

LAPORAN PENGGUNAAN ADD KECAMATAN SELAT		
	2007	2008
Biaya Operasional Pemerintah Desa	39,548,058.60	70,081,714.00
Biaya Pembangunan	92,278,803.40	163,523,998.00
Total ADD yang diterima Desa	131,826,862.00	233,605,712.00
Biaya Pembangunan		
- Penanggulangan kemiskinan	17,532,972.64	27,799,080.00
- Pembentukan BUMDes	4,583,243.16	6,540,960.00
- Bantuan Pemberdayaan Masyarakat	14,000,000.00	19,758,120.00
	36,116,215.80	54,098,160.00
Pengangguran		
- jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	1642	1643
- jumlah penduduk usia kerja 15-56 thn tdk bekerja	95	100
- wanita usia 15-56 yang jadi IRT	625	650
- penduduk usia > 15 thn cacat tdk bekerja	38	38
Total pengangguran	2400	2431
Orang Miskin		
- Jumlah Rumah Tangga (KK)	797	796
- Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK)	210	203
Keuangan Desa		
- APBD Desa	250,544,667.00	405,612,139.67
- PAD Desa	8,300,000.00	21,600,000.00
- ADD	131,826,802.00	233,605,712.00
Pendapatan Desa		
- pertanian	4,598,522,600.00	5,614,363,840.00
- kehutanan	50,350,000.00	58,300,000.00
- perkebunan	489,900,000.00	454,686,000.00
- peternakan	1,498,300,000.00	1,782,162,500.00
- perikanan	10,800,000.00	13,875,000.00
- perdagangan	2,498,300,000.00	2,782,162,500.00
- jasa	1,220,400,000.00	1,423,800,000.00
- hotel/penginapan	18,000,000.00	20,000,000.00
- pariwisata	-	-
- industri rumah tangga	988,200,000.00	109,800,000.00
	11,372,772,600.00	12,259,149,840.00

Sumber : Data Monografi Desa Selat – Kecamatan Selat, Karangasem Bali 2007-2008

Tabel 5.5. Pembagian Penggunaan Dana ADD di Desa Selat Tahun 2007-2009

PEMBAGIAN PENGGUNAAN DANA ADD DI DESA SELAT							
No.	Rincian Penggunaan	TAHUN 2007	%	TAHUN 2008	%	TAHUN 2009	%
Pembiayaan Yang Dapat Menggerakkan Ekonomi Desa							
1	Penanggulangan Kemiskinan	17,532,972.64	19%	27,799,080.00	17%	16,156,300.00	15%
2	Bantuan Pemberdayaan Masyarakat	18,847,945.59	20%	21,258,120.00	13%	14,000,000.00	13%
3	Bantuan Pembentukan dan Penambahan Modal BUMDes	4,383,243.16	5%	6,540,960.00	4%	3,231,000.00	3%
4	Bantuan Peningkatan Derajat Kesehatan	2,629,945.90	3%	8,176,200.00	5%	4,308,000.00	4%
5	Peningkatan Kualitas Pendidikan	1,753,297.26	2%	8,176,200.00	5%	5,385,000.00	5%
6	Pembangunan Infrastruktur Desa	17,532,972.64	19%	24,528,600.00	15%	16,310,000.00	15%
			68%		59%		55%
Pembiayaan Operasional Yang Kurang Menggerakkan Ekonomi Desa							
1	Operasional LPM	4,383,243.16	5%	8,176,200.00	5%	5,385,000.00	5%
2	Operasional PKK	4,383,243.16	5%	8,176,200.00	5%	5,385,000.00	5%
3	Operasional Banjar Dinas	4,383,243.16	5%	8,176,200.00	5%	5,385,000.00	5%
4	Peningkatan Stabilitas Keamanan	2,629,945.90	3%	8,176,200.00	5%	6,465,000.00	6%
5	Pembinaan organisasi Kepemudaan	4,383,243.16	5%	8,176,200.00	5%	6,460,000.00	6%
6	Peningkatan Kehidupan Beragama	1,753,297.26	2%	11,446,680.00	7%	7,539,000.00	7%
7	Pelestarian Bulan Bakti	3,068,270.24	3%	-	0%	-	0%
8	Bantuan Biaya Pemilihan Perbekel, Kelian Banjar Dinas	-	0%	8,176,200.00	5%	3,230,000.00	3%
9	Administrasi pelaporan Honor PJK, PAK, dan TPK	4,613,940.17	5%	6,540,958.00	4%	8,469,700.00	8%
			32%		41%		45%
Total		92,278,803.40	100%	163,523,998.00	100%	107,709,000.00	100%

Sumber : Data Monografi Desa Selat – Kecamatan Selat, Karangasem Bali 2007-2008

Akibat yang ditimbulkan dari penggunaan ADD tersebut, jika dilihat dari tabel 5.3. tersebut, adanya peningkatan pengangguran sebesar 1% dan penurunan Rumah Tangga miskin sebesar 3%. Sedangkan dalam hal keuangan desa, terjadi peningkatan APBDesa sebesar 62%, peningkatan PAD sebesar 160%, peningkatan ADD sebesar 77%, sehingga secara keseluruhan mengalami peningkatan keuangan desa sebesar 69%.

Sedangkan pendapatan Desa meningkat 8% dengan sumbangan terbanyak dari sektor pertanian, walaupun peningkatannya masih lebih kecil dari sektor perikanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah Desa untuk menguatkan pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagian besar dana dari ADD yang digunakan, seharusnya diarahkan lebih banyak ke sektor tersebut, sebagai faktor unggul. Jika dilihat dari rincian keuangan yang ada, ternyata penyaluran dana-dana dari ADD masih kurang tepat sasaran, sehingga belum dapat menghasilkan nilai yang optimal.

Tabel 5.6. Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Karangasem Tahun 2004-2008

Kecamatan	Jml Pra KS 2004	Jml RTM 2005	Jml RTM 2006	Jml RTM 2007	Jml RTM 2008
Rendang	930	2376	2376	2249	1333
		155.5%	0.0%	-5.3%	-40.7%
Manggis	1280	2667	2667	2504	1880
		108.4%	0.0%	-6.1%	-24.9%
Bebandem	2679	6004	6004	5818	5806
		124.1%	0.0%	-3.1%	-0.2%
Selat	1695	3722	3722	3629	2975
		119.6%	0.0%	-2.5%	-18.0%

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem – Bali 2009

5.2.4. Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Karangasem dan Permasalahannya

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2007 perihal “*Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa*”, dengan dilandasi semangat otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten di Bali menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah bervariasi antara Rp 80 juta sampai Rp 200 juta per desa.

Dengan adanya aliran ADD pembangunan untuk membangkitkan ekonomi desa dan sumber daya manusia dapat berjalan. Jumlah ADD yang diterima setiap daerah bervariasi. Pada APBD Tahun 2007, Kabupaten Bangli menganggarkan sekitar Rp 13 milyar atau tiap desa akan mengantongi dana sekitar Rp 150 juta. Kabupaten Buleleng menganggarkan Rp 200 juta per desa, Kabupaten Tabanan hingga Rp 83 juta per desa, Kabupaten Gianyar menganggarkan Rp 5,54 milyar atau Rp 80 juta - Rp 98 juta per desa, Kabupaten Jembrana menganggarkan Rp 17,2 milyar dan jumlah diterima tiap desa sampai Rp 300 juta lebih.¹²

12 Bali Post. 2008. Aliran Dana ADD di Bali - Ada Menunggu Pencairan sampai Keluhan Pemotongan. www.balipost.com

Kabupaten Klungkung sejauh ini belum merumuskan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara teknis tentang bantuan kepada desa/kelurahan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung hanya menjadikan ADD sebagai pembungkus program bantuan anggaran kepada desa untuk mencantumkan anggaran di APBD.

Dalam pencairan ADD ini pihak desa menerima secara utuh kecuali pajak. Perolehan ADD tertinggi Rp 98 juta, sedangkan terendah Rp 80 juta. Dari jumlah tersebut 30 persen dipergunakan untuk operasional pemerintah desa, dan 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Realisasi dana ADD di Kabupaten Jembrana dilakukan tanpa memberikan potongan. Jumlah dari 10 persen DAU dan 10 persen pajak dan retribusi untuk Jembrana berjumlah Rp 17,2 milyar. Dana ini dibagi sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Nilai yang paling rendah diterima oleh desa sebesar Rp 184 juta lebih seperti Delod Berawah dan beberapa desa lainnya, dan yang paling tinggi Rp 306 juta lebih untuk Desa Penyaringan, Blimbingsari dan beberapa desa yang luas lainnya.

Pemanfaatan ADD sudah diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing Kabupaten, dimana 75% dari total ADD yang diterima oleh daerah harus dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, sementara 30% dari ADD untuk operasional Badan Perwakilan Desa (BPD), serta di kantor desa dan perangkat desa termasuk sekretariat Kelian Banjar Dinas. Dari jumlah dana 30% untuk operasional, 25% bagiannya untuk operasional BPD dan 75% bagiannya untuk operasional di perbekelan dan banjar dinas.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kapasitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, perhatian yang sangat besar telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hal ini disebabkan karena kondisi desa-desa di Kabupaten Karangasem saat ini 39,13% merupakan desa dengan tingkat perkembangan keluarga paling rendah yaitu jumlah penduduk 40.727 Rumah Tangga Miskin (RTM) dari jumlah 83.643 Rumah Tangga (RT) yang tersebar di 75 Desa dan 3 Kelurahan dengan luas wilayah 839.54 Km² atau 14,19% dari luas wilayah Propinsi Bali. Sehingga

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat harus sinergis dengan penanggulangan kemiskinan.¹³

Sebagaimana diketahui Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain untuk mendorong semangat desentralisasi hingga ke desa; adil, transparan dan akuntabel; pasti dan dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatan; serta memberikan stimulant dan intensif bagi Desa.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum adalah : (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; (2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat; (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya, dalam rangka mewujudkan ketahanan social; (5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; (6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat; (7) Mendorong peningkatan ke-swadaya-an dan gotong royong masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan kebutuhan Desa dengan memperhatikan faktor-faktor utama : kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, dan keterjangkauan Desa. Selain itu perlu juga memperhatikan faktor-faktor tambahan yang meliputi : luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, dan jumlah komunitas di Desa (Banjar Dinas).

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi secara garis besar menjadi dua bagian yaitu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7. yaitu untuk pemberdayaan masyarakat (70%) dan biaya operasional pemerintah Desa dan BPD (30%).

13 Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Tanggal 6 April 2009 No.12 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu terobosan dalam upaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Diharapkan Desa-Desa di Kabupaten Karangasem akan dapat menentukan sendiri kebutuhan pembangunan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja di pedesaan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum.

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan awal sebagai berikut, bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa pada empat desa di Kabupaten Karangasem belum mencapai efektifitas yang maksimal, karena cara perhitungan kuantitas ADD per desa dinilai tidak adil karena tidak menggunakan perhitungan sesuai dengan yang ditentukan, yang mempertimbangkan tujuh faktor esensial di desa. Penggunaan dana ADD sering salah sasaran atau tidak dialokasikan pada sektor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

5.3. Penentuan Sektor Basis Kabupaten Karangasem

Dari perhitungan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha tahun 2004-2008 dari delapan kecamatan di Kabupaten Karangasem. Dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh hasil indeks LQ (Location Quotient) sebagaimana yang tercantum pada Tabel 5.6. Analisis LQ menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa sektor lapangan usaha. Artinya, semua daerah memiliki sektor unggulan. Selain itu terdapat sektor-sektor yang bukan merupakan unggulan dan daya saingnya tidak dimiliki oleh masing-masing daerah. Adapun penyebaran sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh kecamatan di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

- Sektor Pertanian : Kubu (1,57), Bebandem (1,38), Rendang (1,29), Selat (1,28), Sideman (1,27), dan Abang (1,14),
- Sektor Pertambangan dan Penggalian : Kubu (6,10), Selat (4,74), dan Bebandem (3,17)
- Sektor Industri Pengolahan : Sideman (2,09), Selat (1,90), Abang (1,27), dan Rendang (1,14)

- Sektor Listrik dan Air Bersih : Bebandem (2.53), Kubu (1.72), Sideman (1.39), dan Abang (1.26)
- Sektor Bangunan : Bebandem (1.96), Abang (1.44), dan Karangasem (1.42)
- Sektor Perdagangan, Hotel dan Pariwisata : hanya Manggis (2.16)
- Sektor Pengangkutan dan Komunikasi : Manggis (2.05), dan Bebandem (1.49)
- Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan : Bebandem (1.85), Kubu (1.62), dan Rendang (1.55)
- Sektor Jasa-jasa : Karangasem (1.55)

Tabel 5.7. Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient Kabupaten Karangasem

"Location Quotient" Rata-rata									
KABUPATEN KARANGASEM									
2004-2008									
No.	Lapangan Usaha	KECAMATAN							
		RENDANG	SIDEMAN	MANGGIS	KARANGASEM	ABANG	BEBANDEM	SELAT	KUBU
1	Pertanian	1.2856	1.2726	0.5675	0.8571	1.1426	1.3804	1.2834	1.5718
	a. Tanaman Bahan Makanan	1.4991	1.5578	0.5311	0.7406	0.9674	1.5938	1.4374	1.1665
	b. Tanaman Perkebunan	0.7142	0.7624	0.5314	1.0502	1.7690	1.1385	0.9318	2.6973
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.5141	1.0876	0.8031	0.7683	1.1657	1.1400	1.1726	2.3912
	d. Kehutanan	7.2224	1.0133	0.2293	0.3574	1.0754	1.2910	1.0848	0.7796
	e. Perikanan	-	-	0.5382	1.5792	1.8537	0.4756	0.5767	2.4906
2	Pertambangan dan Penggalian	0.0170	-	-	0.0200	0.4769	3.1700	4.7424	6.1081
	c. Penggalian	0.0170	-	-	0.0200	0.4769	3.1700	4.7424	6.1081
3	Industri Pengolahan	1.1412	2.0896	0.3538	0.8991	1.2749	0.9973	1.9026	0.7801
	b. Industri Tanpa Migas	1.1412	2.0896	0.3538	0.8991	1.2749	0.9973	1.9026	0.7801
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.0265	1.3901	0.7696	1.1323	1.2606	2.5342	0.8402	1.7232
	a. Listrik	0.6985	1.1479	0.7979	1.3900	1.3138	3.0760	0.7531	1.8844
	c. Air Bersih	1.5511	1.7774	0.2244	0.7201	1.1754	1.6530	0.9650	1.4580
5	Bangunan	0.3150	0.2497	1.1085	1.4269	1.4495	1.9617	0.2160	0.6434
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	0.9423	0.9919	2.1608	0.5962	0.6942	0.8788	0.6699	0.7505
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	1.5119	1.5898	0.7024	0.9359	1.0913	1.4151	1.0748	1.1949
	b. Hotel	0.0316	0.0704	3.1278	0.7604	0.8084	0.0075	0.1158	0.3957
	c. Restoran	0.0077	0.0091	4.6213	0.0040	0.0057	0.0046	0.0063	0.0082
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.6028	0.3425	2.0547	0.6470	0.6564	1.4974	0.7574	0.8184
	a. Pengangkutan	0.5966	0.3387	2.0990	0.6068	0.6612	1.5066	0.7485	0.8170
	- Angkutan Jalan Raya	0.8245	0.4577	0.7908	0.8495	1.0323	2.4601	1.1920	1.3552
	- Angkutan Laut	-	-	4.6407	-	-	-	-	-
	- Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	-	-	4.6411	-	-	-	-	-
	- Jasa Penunjang Komunikasi	1.0860	0.6579	1.3684	1.0605	0.7275	1.2572	0.7483	0.5945
	b. Komunikasi	0.8609	0.5021	0.1943	2.3410	0.4505	1.1114	1.1390	0.8741
	- Pos dan Telekomunikasi	0.8609	0.5021	0.1943	2.3410	0.4505	1.1114	1.1390	0.8741
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.5526	1.1443	0.6213	0.9651	1.0760	1.8500	1.2179	1.6176
	a. Bank	2.9960	0.9587	0.7641	0.6360	0.3435	3.4492	1.3974	0.87
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	2.9685	0.5506	0.5439	1.8215	0.1629	0.6085	1.3708	0.2659
	c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	3.0451	1.0220	0.7828	-	-	-
	d. Sewa Bangunan	1.3642	1.2733	0.5604	0.8706	1.2885	1.8026	1.2366	1.8469
	e. Jasa Perusahaan	0.4989	0.2758	0.4516	2.7637	0.0692	0.4574	0.6460	1.2883
9	Jasa-jasa	0.7916	0.6478	0.8790	1.5591	0.9895	0.6885	0.7755	0.8281
	a. Pemerintahan Umum	0.8368	0.6308	0.5457	1.7470	1.1536	0.6883	0.7034	0.9097
	b. Swasta	0.7235	0.6734	1.3819	1.2756	0.7418	0.6890	0.8827	0.7051
	- Sosial Kemasyarakatan	1.5555	1.3241	0.6074	0.8493	1.2507	1.5130	1.2128	1.6514
	- Hiburan dan Rekreasi	1.0500	1.1533	0.9046	1.1367	1.1785	1.2207	0.8968	0.918
	- Perorangan dan Rumah tangga	0.6811	0.6366	1.4241	1.2968	0.7120	0.6430	0.8663	0.6588

Sumber Data : PDRB Seluruh Kecamatan di Kabupaten Karangasem dari BPS Kabupaten Karangasem, Bali Tahun 2004-2008

Jika dihubungkan dengan Alokasi Dana Desa yang diterima di masing-masing desa, maka keputusan penyaluran dana seharusnya mempertimbangkan faktor sektor basis berikut ini. Dari keempat kecamatan tempat desa penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa Kecamatan Rendang mempunyai kekuatan di sektor kehutanan, dimana pada daerah ini terdapat usaha penggergajian kayu untuk bahan bangunan. Pusat kayu dan peternakan adalah di desa Pempatan. Hasil kayu ini didistribusikan hingga ke Denpasar dan NTT. Sedangkan dalam bidang pertanian, yang banyak dihasilkan oleh penduduk adalah tanaman pangan dan peternakan. Dalam analisa LQ ini nilai indeks untuk kehutanan sebesar 7.22, peternakan 1.51, dan tanaman bahan pangan 1.49. Untuk sektor jasa di dominasi oleh keuangan Bank (2.99), Non Bank (2.96), serta Jasa Sosial Kemasyarakatan (1.55). Bagian dana ADD sebesar 70% yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat seharusnya diarahkan ke infrastruktur yang menunjang perekonomian desa dan juga sektor-sektor di atas.

Kecamatan Manggis dimana memiliki pantai dan teluk di Padangbai merupakan kawasan pariwisata laut dan juga budaya, dengan adanya Desa Tenganan yang merupakan kawasan cagar budaya. Sehingga potensi pariwisata seharusnya menjadi fokus pemerintah setempat. Terlebih lagi di daerah ini sering disinggahi kapal pesiar, sehingga perlu dibangun kawasan pelabuhan. Hal ini akan mendongkrak pariwisata dan pendapatan daerah. Dalam analisa LQ terlihat bahwa indeks terbesar adalah perhotelan (3.13), Restoran (4.62), Angkutan Laut dan Penyeberangan (4.64), Jasa Penunjang Komunikasi (1.36), Jasa Penunjang Keuangan (3.05), dan Jasa Swasta Perorangan/RT (1.42).

Kecamatan Bebandem merupakan daerah penghasil salak bali yang besar dan juga buah-buah lainnya. Sehingga alokasi dana ADD yang diterima oleh desa-desa harus difokuskan pada pertanian, serta galian C, karena banyaknya pasir hasil dari letusan Gunung Agung pada tahun 1964. Selain itu sektor-sektor yang menonjol adalah : jasa swasta hiburan dan rekreasi (1.22), jasa swasta sosial kemasyarakatan (1.51), sewa bangunan (1.80), jasa keuangan Bank (3.44), pertanian tanaman pangan (1.59), kehutanan (1.29), peternakan (1.14), galian C (3.17), listrik dan air bersih (2.53).

Kecamatan Selat juga memiliki karakteristik yang sama dengan Bebandem, dimana sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Tetapi yang terbesar penyumbang pdrb terbesar adalah tambang pasir (galian C) dengan indeks LQ sebesar 4.74, sedangkan pertanian (1.28), dan keuangan dan perbankan sebesar (1.33).

Dari hasil Analisa "*Location Quotient*" tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah hendaknya lebih memprioritaskan sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Meskipun demikian sektor lainnya tetap mendapat perhatian secara proporsional sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya. Pengembangan sektor unggulan hendaknya diarahkan pada upaya untuk menciptakan keterkaitan antar daerah di Kabupaten Karangasem. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui penciptaan spesialisasi yang memungkinkan bergeraknya perekonomian secara bersama-sama melalui proses pertukaran komoditas. Namun demikian masih dibutuhkan analisis lanjut untuk mengukur tingkat spesialisasi antar kecamatan di Kabupaten Karangasem.

Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah terutama untuk daerah yang masih berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal, diperlukan kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi investasi di daerah tersebut. Insentif yang dapat diberikan adalah perbaikan prasarana, yang selama ini menghambat laju investasi di daerah-daerah tersebut. Penggunaan hasil pengukuran "*Location Quotient*" dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah Kecamatan dan Desa untuk menilai kekuatan dari sektor yang dapat mempengaruhi besarnya PDRB Kecamatan, sehingga alokasi penggunaan ADD di Desa dapat tepat sasaran yang dapat menggerakkan roda ekonomi Desa.

5.4. Kesenjangan (Disparitas) Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat didekati melalui Formulasi Indeks Williamson, yang menggunakan data PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Formulasi Indeks Williamson menurut Sjafrizal (2008), secara statistik dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \times (n_i/N)}}{Y}$$

dimana $0 < I_w < 1$

dimana :

- I_w** = Indeks Kesenjangan Williamson
- Y_i** = Pendapatan Regional Per Kapita (PDRB) Kecamatan ke-i
- Y** = Pendapatan Regional Per Kapita (PDRB) Kabupaten Karangasem
- n_i** = Jumlah penduduk Kecamatan ke-i
- N** = Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem

Seharusnya yang diperbandingkan tingkat pertumbuhan wilayah pada kabupaten Karangasem adalah antar wilayah Desa, karena yang akan diamati adalah tingkat disparitas pembangunan antar desa pada tahun sebelum ada program Alokasi Dana Desa, pada saat telah diterapkannya program Alokasi Dana Desa.

Tabel 5.8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tanpa Migas 2004-2008

Wilayah	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
Kecamatan :						
<i>Kubu</i>	2,266,244.28	2,485,303.42	2,512,276.70	2,642,403.15	2,746,003.93	2,530,446.30
<i>Selat</i>	3,342,878.51	3,717,232.97	3,851,258.64	4,089,886.58	4,191,547.25	3,838,560.79
<i>Bebandem</i>	3,125,843.24	3,511,242.32	3,720,663.13	3,551,563.95	3,699,537.73	3,521,770.07
<i>Abang</i>	2,590,173.03	2,909,404.71	2,992,447.04	3,300,906.25	3,460,535.26	2,468,812.32
<i>Karangasem</i>	4,497,879.81	5,053,396.88	5,244,016.35	5,078,991.64	5,348,534.09	5,044,563.75
<i>Manggis</i>	6,295,853.84	7,081,746.36	7,556,611.56	8,332,187.29	8,806,809.09	7,614,641.63
<i>Sidemen</i>	2,667,067.40	2,797,761.45	2,886,781.43	3,072,368.94	3,170,669.48	2,918,929.74
<i>Rendang</i>	2,282,777.06	2,494,309.28	2,573,533.28	2,795,288.54	2,900,213.97	2,609,224.43
Kabupaten:						
<i>Karangasem</i>	3,435,910.19	3,808,877.53	3,957,780.33	4,128,791.17	4,317,669.55	3,929,805.75

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem – Bali 2009

Dengan mengukur adanya ketimpangan atau disparitas antar desa diharapkan dapat diketahui bahwa jika perlakuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karangasem dalam hal pemberian Alokasi Dana Desa kepada keempat Desa, yaitu Desa Pempatan, Desa Selat, Desa Bebandem, dan Desa Tenganan sama, maka seharusnya tingkat disparitas pembangunan Desa relatif kecil. Akan tetapi karena data PDRB yang dibutuhkan tidak ada di BPS, maka sulit untuk mendapatkan PDRB setingkat Desa. Yang paling rendah hanya sampai tingkat kecamatan.

Tabel 5.9. Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Karangasem 2004-2008

Wilayah	2004	2005	2006	2007	2008
Kecamatan :					
<i>Kubu</i>	62,769	64,346	67,559	70.718	35.786
<i>Selat</i>	36,456	36,791	37,418	38.469	33.958
<i>Bebandem</i>	42,674	42,635	42,631	48.989	47.202
<i>Abang</i>	65,998	66,166	68,311	68.294	84.883
<i>Karangasem</i>	72,146	72,729	74,195	84.806	68.428
<i>Manggis</i>	45,835	46,019	46,235	46.785	48.907
<i>Sidemen</i>	30,213	32,258	33,004	33.803	39.772
<i>Rendang</i>	33,485	34,474	35,241	35.617	71.315
Kabupaten:					
Karangasem	389.576	395.418	404.593	427.481	430.251

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem – Bali 2009

Dengan menggunakan formulasi Indeks Williamson di atas, data dari Tabel 5.7. dan Tabel 5.8. dimasukkan ke dalam formula tersebut. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan Indeks Williamson Kabupaten Karangasem dari 2004-2008, yang dirangkum dalam Tabel 3. berikut :

Tabel 5.10. Indeks Williamson Kabupaten Karangasem Tahun 2004 – 2008

INDEKS WILLIAMSON	
Tahun	Indeks
2004	0.378
2005	0.389
2006	0.404
2007	0.410
2008	0.421
Rata-Rata (Iw)	0.421

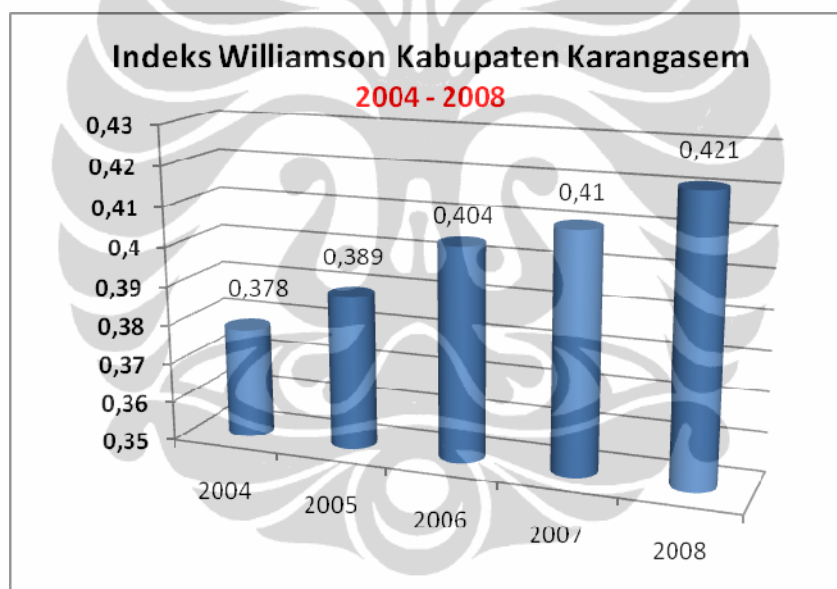
Sumber : Data PDRB dari BPS Kabupaten Karangasem Bali 2004-2008

Seperti diketahui bahwa Indeks Williamson meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang secara signifikan.

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah

merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan karakteristik wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari kenyataan itu, dapat dijelaskan bahwa kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Indeks Williamson digunakan untuk melihat ketimpangan atau disparitas antar wilayah yang dihitung. Bila nilai I_w mendekati angka 1 berarti terjadi disparitas yang tinggi (sangat timpang), sedangkan bila nilai I_w mendekati 0 berarti pembangunan yang terjadi pada wilayah itu sangat merata (tidak timpang).



Sumber data : BPS Kabupaten Karangasem 2004-2008

Grafik 5.1. Indeks Williamson Kabupaten Karangasem Tahun 2004-2008

Hasil perhitungan nilai Indeks Williamson menunjukkan selama lima tahun nilai indeks-nya antara 0.378 hingga 0.421 pertahun. Nilai yang diperoleh mendekati nilai 0 dan bukan mendekati nilai 1 sehingga dapat dikatakan tidak ada ketimpangan (disparitas) tetapi cenderung meningkat angka indeks-nya dari tahun ke tahun menuju

ketimpangan (disparitas) pembangunan antar kecamatan dalam Kabupaten Karangasem.

Angka indeks ketimpangan (disparitas) PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Karangasem – Bali selama periode tahun 2004-2008 menunjukkan bahwa dari tahun 2004 hingga tahun 2008 distribusi pendapatan Kabupaten Karangasem - Propinsi Bali belum merata (Indeks Williamson menjauh dari nol). Nilai rata-rata indeks sebesar 0.4004. Tahun dengan ketimpangan terbesar adalah pada tahun 2008 yaitu pada tahun 2008 sebesar 0.42, sedangkan Indeks Williamsonnya paling kecil adalah di tahun 2004, yaitu sebesar 0.378.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan stimulasi terhadap pergerakan perekonomian di Desa, agar terjadi pertumbuhan yang seimbang antara satu Desa yang memang memiliki sumberdaya yang besar dengan Desa lainnya yang sumberdaya alamnya kecil. Disparitas antar desa saat ini memang tidak dapat dihindari. Hal ini diakibatkan karena tidak terjadinya efek perembesan ke bawah (*trickkle down effect*). Angka kemiskinan absolut justru meningkat karena semakin lebarnya jurang perbedaan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Disparitas pembangunan antara kabupaten di Bali dapat dilihat dari adanya kesenjangan yang cukup besar antara pembangunan di wilayah Bali Selatan dan Bali Tengah, dibandingkan pembangunan di Bali Timur atau Bali Barat. Konsentrasi pembangunan oleh pemerintah provinsi Bali terlihat dilakukan di Bali Tengah dan Bali Selatan, sedangkan daerah seperti Kabupaten Karangasem yang dinilai tidak “menjual” menjadi tertinggal.

Disparitas pendapatan antar daerah merupakan topik yang perlu dikaji, karena disparitas merupakan suatu hal yang dapat menghambat pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Dari Indeks Williamson dapat dilihat bahwa terjadi proses disparitas atau kesenjangan yang meningkat dari tahun ke tahun, sesuai dengan teori kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah yang berbentuk “U” terbalik (*reserve U-shaped curve*). Pada permulaan proses pembangunan suatu wilayah, dalam hal ini kabupaten Karangasem, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, apabila proses pembangunan

terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Perhitungan dari tahun 2004 hingga 2008 diperoleh angka-angka sebagai berikut : $Iw_{2004} = 0.378$, $Iw_{2005} = 0.389$, $Iw_{2006} = 0.404$, $Iw_{2007} = 0.410$, $Iw_{2008} = 0.421$.

Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Karangasem, diantaranya adalah karena :

1. Adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing desa. Perbedaan kandungan sumberdaya alam dan tingkat kesuburan lahan akan mempengaruhi upaya-upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Diantara empat kecamatan yang diamati, yaitu Rendang, Selat, Bebandem, dan Manggis terdapat perbedaan yang menyolok. Rendang (Desa Pempatan) termasuk daerah dataran tinggi yang berada di kaki gunung Agung yang subur, sedangkan Manggis (Desa Tenganan) daerah dataran rendah. Tetapi jika dilihat dari laju pertumbuhan dan PDRB-nya, Kecamatan Manggis lebih baik.
2. Adanya perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah, yang meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Perbedaan kondisi demografis tersebut dapat mempengaruhi produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan.
Adanya perbedaan budaya antara penduduk dataran tinggi (Desa Pempatan) dengan dataran rendah (Desa Tenganan) turut mempengaruhi cara kerja dan pencapaian hasil. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan.
3. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat

konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

4. Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Investasi swasta perlu ditarik, tetapi swasta baru akan mau menginvestasikan dananya jika iklim usaha di daerah tersebut kondusif.
5. Adanya keseriusan upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu negara atau wilayah. Pemerintah perlu fokus di satu hal kekuatan dari masing masing Desa, agar dapat terjadi penguasaan bidang tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat atau daerah.
6. Memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah, melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan keseluruhan pelosok wilayah, seperti fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antar daerah. Juga jaringan dan fasilitas telekomunikasi sangat penting untuk dikembangkan agar tidak ada daerah yang terisolir dan tidak dapat berkomunikasi dengan daerah lainnya. Pembangunan pelabuhan besar di Padangbai Kecamatan Manggis perlu untuk membuka pintu investasi usaha-usaha lain disekitarnya, sehingga akan mendorong perekonomian daerah, terutama desa.
7. Mendorong pelaksanaan transmigrasi dan migrasi spontan. melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan daerah bersangkutan akan dapat pula berjalan.
8. Pengembangan Pusat Pertumbuhan (*Growth Poles*) secara tersebar, karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara

sekaligus. Perlunya dibangun pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah, agar dapat berkembang, sehingga kegiatan pembangunan dapat lebih disebarakan ke pelosok daerah. Kecamatan Rendang yang merupakan daerah peternakan dan kehutanan, dibangun misalnya pusat peternakan Karangasem, yang mengolah sapi menjadi barang jadi. Untuk kehutanan dapat dibangun pusat industry penggergajian kayu, seperti yang banyak dilihat di Desa Pempatan.

9. Pelaksanaan otonomi desa dan desentralisasi pembangunan desa juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Karena dengan adanya otonomi desa dan desentralisasi pembangunan, maka aktifitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemanfaatan ADD dalam hal ini sangat membantu mempercepat turunnya disparitas tersebut, tentunya dengan pemanfaatan dana yang tepat sasaran.

Dengan melakukan pembenahan terhadap kesepuluh faktor diatas, diharapkan disparitas pembangunan antar wilayah dapat dikurangi sehingga menjadi merata pembangunannya.

5.5. Analisis “*Klassen Typology*” Kecamatan-Kecamatan Di Kabupaten Karangasem - Provinsi Bali

Untuk melakukan analisa Tipologi Klassen, data yang dibutuhkan adalah data perkembangan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) per kapita (Tabel 5.7.) dan laju pertumbuhan PDRB untuk tiap kecamatan dalam Kabupaten Karangasem – Propinsi Bali dalam kurun waktu tahun 2004-2008 (Tabel 5.10). Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, kita dapat membagi kecamatan di Kabupaten Karangasem menjadi empat klasifikasi sesuai dengan Tipologi Klassen sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 5.1., yaitu :

1. Daerah yang masuk dalam kategori “cepat maju dan cepat tumbuh” adalah Kecamatan Karangasem (tertinggi laju pertumbuhannya), Kecamatan Manggis (tertinggi PDRB/Kapita)
2. Daerah yang masuk dalam kategori “berkembang cepat” tidak ada sama sekali.

3. Daerah yang masuk dalam kategori “relative tertinggal”, jika dilihat dari laju pertumbuhannya, maka berurutan dari yang tercepat hingga terendah adalah Kecamatan Abang, Kubu, Bebandem, Selat, Rendang, dan Sidemen. Sedangkan jika dilihat dari besarnya PDRB per Kapita, maka berurutan dari tercepat hingga terlambat adalah kecamatan Selat, Bebandem, Sidemen, Rendang, dan Kubu, Abang.
4. Daerah yang masuk dalam kategori “maju tapi tertekan” tidak ada sama sekali.

Tabel 5.11 Laju Pertumbuhan PDRB Kecamatan di Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tanpa Migas , 2004-2008 (%)

Wilayah	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
Kecamatan :						
<i>Kubu</i>	4.83	5.04	4.61	5.08	4.68	4.71
<i>Selat</i>	4.43	4.86	3.87	4.20	3.80	4.38
<i>Bebandem</i>	3.84	4.86	4.44	4.69	4.34	4.41
<i>Abang</i>	4.50	5.22	4.67	5.25	5.04	4.77
<i>Karangasem</i>	4.46	5.83	4.35	5.66	5.40	5.16
<i>Manggis</i>	4.28	5.52	5.67	6.49	6.64	4.99
<i>Sidemen</i>	3.87	4.65	4.06	4.04	3.67	4.06
<i>Rendang</i>	3.36	5.11	3.96	4.77	4.25	4.29
Kabupaten:						
<i>Karangasem</i>	4.49	5.13	4.80	5.20	5.07	4.94

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem – Bali 2009

Dari data-data di atas, masing-masing kecamatan diplot masuk ke dalam kwadran yang telah ditentukan, yaitu : kuadran 1 jika “*cepat maju dan cepat tumbuh*”; kuadran 2 jika “*berkembang cepat*”; kuadran 3 jika “*maju tetapi tertekan*”; serta kuadran 4 jika “*relative tertinggal*”. Hasil dari pengelompokan data-data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kuadran yang menunjukkan apakah kedelapan Kecamatan tersebut masuk ke dalam kuadran 1 “*cepat maju dan cepat tumbuh*”, atau kuadran 2 “*berkembang cepat*”, atau kuadran 3 “*maju tetapi tertekan*”, atau kuadran 4 “*relative tertinggal*”.

Pada Gambar 5.1. dapat dilihat bahwa hasil dari pengelompokan kedelapan Kecamatan di Kab. Karangasem mempunyai susunan sebagai berikut :

- kuadran 1 “*cepat maju dan cepat tumbuh*” : **Karangasem, Manggis**
- kuadran 2 “*berkembang cepat*” : Tidak ada
- kuadran 3 “*maju tetapi tertekan*” : Tidak ada
- kuadran 4 “*relative tertinggal*” : **Sidemen, Selat, Rendang, Kubu, Abang, Bebandem**

LAJU PERTUM- BUHAN(R)	PDRB/ KAPITA (Y)	$y_i > Y$	$y_i < Y$
	$r_i > R$	“cepat maju dan cepat tumbuh” KARANGASEM MANGGIS	“berkembang cepat”
$r_i < R$	“maju tapi tertekan”	“relatif tertinggal” ● SIDEMEN ● KUBU ● SELAT ● ABANG ● RENDANG ● BEBANDEM	

Gambar 5.1. Klasifikasi Kecamatan di Kabupaten Karangasem – Bali Menurut Tipologi Klassen, 2004-2008

Hasil dari analisa Tipologi Klasson menunjukkan bahwa terjadi perbedaan PDRB dan laju pertumbuhan diantara empat desa yang diteliti. Jika dilihat dari kecepatan pertumbuhannya maka urutan dari yang tercepat hingga yang terlambat adalah Kecamatan Manggis, Bebandem, Selat dan Rendang. Sedangkan jika dilihat dari besarnya PDRB per Kapita, maka berurutan dari tercepat hingga terlambat adalah kecamatan Manggis, Selat, Bebandem, dan Rendang. Kecamatan Rendang yang memiliki tanah yang subur, karena berada di lereng Gunung Agung justru kalah dengan Kecamatan Manggis yang berada di daerah pesisir.

Faktor yang mempengaruhi tingginya PDRB Kecamatan Manggis dan Kecamatan Karangasem, karena kedua wilayah tersebut dekat dengan ibukota kabupaten, sehingga pertumbuhannya tinggi. Akses yang mudah ditempuh ke daerah pesisir dibandingkan dengan daerah dataran tinggi, menyebabkan sulit berkembangnya daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Adanya program Alokasi Dana Desa yang sudah dilaksanakan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2007 hingga tahun 2009 belum memberikan dampak positif, yang tergambar dalam besarnya Indeks Williamson yang meningkat dari tahun 2004 – 2008 mendekati angka 1 yang berarti cenderung menjadi tinggi tingkat kesenjangan

antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Karangasem. Selain itu juga tergambar dalam analisis Typologi Klasson, yang memperlihatkan bahwa pembangunan selama lima tahun terakhir tidak berdampak pada enam kecamatan yang masuk dalam kwadran “daerah tertinggal”.



BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Analisa yang dilakukan di empat desa pada empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Bali menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa di empat desa tersebut belum mencapai efektifitas yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kesenjangan (disparitas) pembangunan ekonomi antar wilayah kecamatan dan cenderung meningkat yang tergambar dari meningkatnya nilai Indeks Williamson dari tahun 2004 hingga tahun 2008 mendekati nilai 1 (satu). Keterbatasan analisa ini adalah sulitnya memperoleh data-data yang dapat mengukur Produk Domestik Regional Bruto Desa menyebabkan analisa disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah di tingkat Desa menggunakan proksi di tingkat kecamatan.

Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh karena penentuan kuantitas Alokasi Dana Desa per desa belum menggunakan formula Alokasi Dana Desa yang ditentukan oleh pemerintah dalam Surat Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ Tahun 2005, sehingga aspek keadilannya masih kurang terpenuhi. Tidak dipergunakannya pembobotan Desa dalam penentuan ADD Proporsional dengan mempertimbangkan tujuh faktor esensial di desa, turut mempengaruhi disparitas tersebut. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa masih belum tepat sasaran, karena tidak dialokasikan pada sektor yang merupakan kekuatan dari masing-masing Desa, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi Desa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Analisa "*Location Quotient*" dapat membantu menentukan sektor-sektor yang menjadi kekuatan dari tiap-tiap daerah.

Melalui analisa "*Klassn Typology*" dapat terlihat bahwa hasil dari pembangunan ekonomi selama tahun 2004 hingga tahun 2008, dari delapan kecamatan di Kabupaten Karangasem, Bali hanya dua kecamatan yang masuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu kecamatan Manggis dan Karangasem, sedangkan sisanya masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal, yaitu kecamatan Rendang, Selat, Bebandem, Abang, Kubu, dan Sidemen. Alokasi Dana

Desa yang diharapkan sebagai penggerak ekonomi Desa yang mendukung ekonomi Kecamatan masih belum dapat mengangkat keenam kecamatan tersebut menuju daerah cepat maju dan cepat tumbuh.

6.2 Saran-Saran

- ✚ Adanya keterbatasan dalam ketersediaan data yang digunakan untuk menganalisa disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah Desa, maka dalam penentuan tingkat pertumbuhan Desa dapat digunakan indikator-indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Desa yang dapat diperbandingkan antar Desa.
- ✚ Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) pada sektor-sektor basis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Desa, disarankan untuk menggunakan analisa "*Location Quotient*", sehingga tidak salah sasaran. Perlunya pendampingan dalam penyaluran Alokasi Dana Desa di tiap Desa akan meningkatkan efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- ✚ Meskipun rumus penentuan Alokasi Dana Desa menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa yang dipakai sebagai acuan merupakan yang terbaik untuk saat ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap variabel-variabel pembobotan yang dipergunakan dalam penentuan ADD Proporsional, sehingga mudah dilakukan dan diterapkan di Desa dan memberikan dampak yang optimal.
- ✚ Perlu dilakukan penelitian mengenai peningkatan status hukum dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa, agar memiliki kekuatan hukum jika diberlakukan di daerah, mengingat kebijakan Alokasi Dana Desa menggunakan dana yang sangat besar secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Cetak

- Abdullah, F. (1998). *Merubah Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Abimanyu, A. & Megantara, A. (2009). *Era Baru Kebijakan Fiskal – Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Penerbitan Buku Kompas. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo H. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Apgar, W.C. & Brown, H.J. (1987). *Microeconomic and Public Policy*. Scot, Foresman and Company. United States of America. Arief, S. (1993). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia – UI Press. Jakarta
- Arifin, B. & Rachbini, D.J. (2001). *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Atmadja, A.P.S. (1996). *Kapita Selekta Keuangan Negara – Suatu Tinjauan Yuridis*. Universitas Tarumanegara. Jakarta.
- BPS. 2009. Bali Dalam Angka. Penerbit BPS. Bali
- BPS. 2009. Karangasem Dalam Angka. Penerbit BPS. Karangasem – Bali
- BPS. 2008. Karangasem Dalam Angka. Penerbit BPS. Karangasem – Bali
- BPS. 2007. Karangasem Dalam Angka. Penerbit BPS. Karangasem – Bali
- BPS. 2006. Karangasem Dalam Angka. Penerbit BPS. Karangasem – Bali
- BPS. 2005. Karangasem Dalam Angka. Penerbit BPS. Karangasem – Bali
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif – Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kuantitatif – Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Basuki, S.H. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Beratha, I.N. (1982). *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Davey, K. (1988). *Pembiayaan Pemerintahan Daerah (Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga)*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta.
- Djadijono, M. (2006). *Membangun Indonesia Dari Daerah*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Jakarta.
- Danim, S. (2005). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta

- Djaenuri, A. (2005). *Sistem Pemerintahan Desa*. Buku Materi Pokok IPEM-4213/3SKS/Modul 1-9. Edisi Pertama – Cetakan Kelima. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Halim, A. & Mujib, Ibnu. (2009). *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat – Daerah, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Sekolah Pasca Sarjana UGM. Jogjakarta
- Halim, A. (2002). *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan – Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. (2008). Penerbit Fokus Media. Bandung.
- Harris, S. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah – Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. LIPI Press. Jakarta
- Hillman, A.L. (2003). *Public Finance and Public Policy*. Cambridge University Press. United Kingdom.
- Kuncoro. (2004). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Wilayah. Dalam buku *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga. Jakarta..
- Kansas, N.D. (2003). *Anak Desa Penantang Zaman – Biografi Singkat Prof. DR. Drg. I Gede Winasa*. Komunitas Kertas Budaya Jembrana. Bali.
- Koentjaraningrat. (1984). *Masyarakat Desa Di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kumorotomo, W. (2008). *Desentralisasi Fiskal – Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Kamaluddin, R. (1987). *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Lester, J.D. (1993). *Writing Research Papers-A Complete Guide*. Seventh Edition. Harper Collins College Publishers. New York.
- Li, T.M. (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik*. Edisi III. BPPE Yogyakarta. Jawa Tengah.
- Mubyarto. (2001). *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. BPPE. Jogjakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Serial Otonomi Daerah. Penerbit Andi. Jogjakarta.
- Mubyarto. (1991). *Kajian Sosial Ekonomi Desa-Desa Perbatasan Di Kalimantan Timur*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Narang, A.T. (2004). *Regulasi Bagi Perkembangan Perekonomian Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Fiskal Nasional*. Megatama Sofwa Pressindo. Jakarta.
- Nugroho, R.D. (2008). *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta

- Nugroho, R.D. (2003). *Reinventing Pembangunan*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Osborne, D. & Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government – How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. Penguin Book Limited. Inggris.
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2004. – Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006. Penerbit Fokusmedia. Bandung.
- Pilliang, I.J. (2003). *Otonomi Daerah – Evaluasi dan Proyeksi*. Yayasan Harkat Bangsa dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Jakarta.
- Prijono, Y.M. & Tjiptoherijanto, P. (1983). *Demokrasi Di Pedesaan Jawa*. Penerbit Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi – UI. Jakarta.
- Puspitosari, H. (2006). *Marginalisasi Rakyat Dalam Anggaran Publik – Partisipasi Rakyat Dalam Menyusun Anggaran Publik di Daerah*. Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA. Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan – Kecamatan, Desa, dan Kelurahan*. (2008). Himpunan. Penerbit Fokus Media. Bandung
- Putra, D.S. & Kansas, N. (2004). *Menterjemahkan Otonomi Daerah Tanpa Basa-Basi (Pokok-pokok Pikiran Prof. DR. Drg. I Gede Winasa)*. Komunitas Kertas Budaya – Jembrana. Bali.
- RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004 – 2009 . (2006). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Rachbini, D.J. (1999). *Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.
- Rasyid, M.R. (2001). *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*. Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP). Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Editor: Kristin Samah. Jakarta.
- Rosen, H.S. (1988). *Public Finance*. Second Edition. Irwin Inc. Illionis. USA.
- Rubin, I.S. (2000). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Fourth Edition. Northern Illinois University. Chatham House Publishers. Seven Bridges Press. New York. USA.
- Safi'I, H.M. (2007). *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah – Perspektif Teoritik*. Averroes Press. Malang.
- Saragih, J.P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional – Teori dan Aplikasi*. Baduouse Media. Padang.
- Soedjito, S. (1987). *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*. PT Tiara Wacana Jogja. Jogjakarta.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik – Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Jogjakarta.

- Suharto, E. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Alfabeta. Bandung.
- Suradinata, E. (2002). *Pembaruan Birokrasi Dan Kebijaksanaan Publik*. Penerbit Peradaban. Bandung.
- Swarsi, S.L. (1986). *Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Bali*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bali.
- Singarimbun, M. & Effendi, Sofyan. (1989). *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Sidik, M. (2002). *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek Di Era Otonomi Daerah*. LPEM-FEUI, MPKP-FEUI, Penerbit Kompas, Dep. Keuangan. Jakarta.
- Tangkilisan, H.N. (2003). *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Penerbit Balairung & Co. Yogyakarta.
- Thoha, M. (2008). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Wasistiono, S. (2008). *Prosiding Fasilitas Penguatan Pemerintahan Desa Melalui Penyusunan Peraturan Desa Di Kabupaten Bandung*. Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bandung.
- Wasistiono, S. & Tahir, M.I. (2007). *Prospek Pembangunan Desa*. Penerbit Fokusmedia. Bandung.
- Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selekta – Manajemen Pemerintahan Daerah*. Edisi Revisi Ketiga. Penerbit Fokusmedia. Bandung.
- Wasistiono, S. (2009). *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Penerbit Fokusmedia. Bandung.
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Otonomi Desa – Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Winarno, B. (2003). *Komparasi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan – Indonesia vis a vis Taiwan, Thailand, dan Filipina*. Penerbit Media Pressindo. Jogjakarta.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik – Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Media Pressindo. Jogjakarta.
- Winasa, I.G. (2006). *Kalau Mau Pasti Bisa*. Panakom Publishing. Bali
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi. Rajawali Press. Jakarta
- Yuwono, S. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Yustika, A.E. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia – Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Zen, A & Patra, M. (2006). *Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik*. Malang Corruption Watch dan YAPPIKA. Jakarta

Majalah

_____. 1991. Prisma – Ekonomi dan Otonomi : Keniscayaan Zaman. No.8. Agustus 1991. LP3ES.

Jurnal

Wijayanti. (2004). Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional Indonesia, 1992 – 2001. Dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 9 No.2.

Makalah/Artikel

BPS. 2009. Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan di Kabupaten Karangasem. Bali

Hatta, M. (1933). Autonomie Dan Centralisatie Dalam Partai. Dalam *Harian Daulat Ra'jat* (1933). No. 76 Tahun ke-III.

Sidik, M. (2002). *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Makalah Seminar Nasional “Public Sector Scorecard”. Jakarta, 17-18 April 2002.

Simatupang, D. & Puji, N. 2008. *Kerangka Legal Formal Tentang Keuangan Publik : Substansi dan Kritik Yuridis*. Materi Hukum Keuangan Publik. Program Magister Ilmu Hukum – Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.

Situs

Negara Mawa Tata, Desa Mawa Cara. (2009). www.wikipedia.com

Pasaribu, Ernawati. 2007. Tinjauan Kinerja Ekonomi Regional : Studi Empiris Propinsi Kalimantan Tengah 2003-2007. www.bps-kalteng.go.id

Syahyuti. (2009). *Ekonomi Kerakyatan dan Otonomi Daerah*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. www.geocities.com

Laporan Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Karangasem oleh BPKP Tahun 2007-2009. www.bpkp.go.id

Ayu Savitri Gama. 2006. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial | I N P U T | Volume 2 Nomor 1*. www.ejournal.unud.ac.id

Lampiran Keputusan Bupati Karangasem
No.342 Tahun 2007 - Tanggal 01 Nopember 2007
Penetapan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
Tahun Anggaran 2007

No.	Desa/Kecamatan	Dana Perimbangan		Total 100%	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Jumlah Total	Dana Operasional Desa	BPD Dari Dana Operasional Desa
		60%	40%					
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7 = (5+6)	8 = (30%*7)	9 = (22%*8)
Kecamatan Rendang								
1	Desa Rendang	83.328.759,60	55.552.506,40	138.881.266,00	38.907.892,00	177.789.158,00	53.336.747,40	11.734.084,43
2	Desa Pempatan	72.987.243,00	48.658.162,00	121.645.405,00	38.907.892,00	160.553.297,00	48.165.989,10	10.596.517,60
3	Desa Besakih	72.987.243,00	48.658.162,00	121.645.405,00	38.907.892,00	160.553.297,00	48.165.989,10	10.596.517,60
4	Desa Pesaban	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
5	Desa Nongan	83.328.759,60	55.552.506,40	138.881.266,00	38.907.892,00	177.789.158,00	53.336.747,40	11.734.084,43
6	Desa Menanga	62.645.786,40	41.763.857,60	104.409.644,00	38.907.892,00	143.317.536,00	42.995.260,80	9.458.957,38
	Jumlah	424.134.829,20	282.756.552,80	706.891.382,00	233.447.352,00	940.338.734,00	282.101.620,20	62.062.356,44
Kecamatan Selat								
1	Desa Selat	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
2	Desa Duda	62.645.726,40	41.763.817,60	104.409.544,00	38.907.892,00	143.317.436,00	42.995.230,80	9.458.950,78
3	Desa Muncan	79.881.587,40	53.254.391,60	133.135.979,00	38.907.892,00	172.043.871,00	51.613.161,30	11.354.895,49
4	Desa Sebudi	69.540.070,80	46.360.047,20	115.900.118,00	38.907.892,00	154.808.010,00	46.442.403,00	10.217.328,66
5	Desa Duda Timur	66.092.898,60	44.061.932,40	110.154.831,00	38.907.892,00	149.062.723,00	44.718.816,90	9.838.139,72
6	Desa Duda Utara	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
7	Desa Peringsari	69.540.070,80	46.360.047,20	115.900.118,00	38.907.892,00	154.808.010,00	46.442.403,00	10.217.328,66
8	Desa Amerta Bhuana	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
	Jumlah	508.060.155,60	338.706.770,40	846.766.926,00	311.263.136,00	1.158.030.062,00	347.409.018,60	76.429.984,09
Kecamatan Sidemen								
1	Desa Sidemen	52.304.209,80	34.869.473,20	87.173.683,00	38.907.892,00	126.081.575,00	37.824.472,50	8.321.383,95
2	Desa Talibeng	62.645.726,40	41.763.817,60	104.409.544,00	38.907.892,00	143.317.436,00	42.995.230,80	9.458.950,78
3	Desa Tangkup	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
4	Desa Wisma Kerta	41.962.693,20	27.975.128,80	69.937.822,00	38.907.892,00	108.845.714,00	32.653.714,20	7.183.817,12
5	Desa Sangkan Gunung	66.092.898,60	44.061.932,40	110.154.831,00	38.907.892,00	149.062.723,00	44.718.816,90	9.838.139,72
6	Desa Telaga Tawang	52.304.220,60	34.869.480,40	87.173.701,00	38.907.892,00	126.081.593,00	37.824.477,90	8.321.385,14
7	Desa Tri Eka Buana	45.409.865,40	30.273.243,60	75.683.109,00	38.907.892,00	114.591.001,00	34.377.300,30	7.563.006,07
8	Desa Kerta Buana	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
9	Desa Sinduwati	52.304.209,80	34.869.473,20	87.173.683,00	38.907.892,00	126.081.575,00	37.824.472,50	8.321.383,95
10	Desa Lokasari	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
	Jumlah	526.489.281,00	350.992.854,00	877.482.135,00	389.078.920,00	1.266.561.055,00	379.968.316,50	83.593.029,63
Kecamatan Bebandem								
1	Desa Bebandem	76.434.415,20	50.956.276,80	127.390.692,00	38.907.892,00	166.298.584,00	49.889.575,20	10.975.706,54

2	Desa Bungaya	59.198.554,20	39.465.702,80	98.664.257,00	38.907.892,00	137.572.149,00	41.271.644,70	9.079.761,83
3	Desa Budakeling	62.645.726,40	41.763.817,60	104.409.544,00	38.907.892,00	143.317.436,00	42.995.230,80	9.458.950,78
4	Desa Jungutan	76.434.415,20	50.956.276,80	127.390.692,00	38.907.892,00	166.298.584,00	49.889.575,20	10.975.706,54
5	Desa Sibetan	69.540.070,80	46.360.047,20	115.900.118,00	38.907.892,00	154.808.010,00	46.442.403,00	10.217.328,66
6	Desa Macang	41.962.693,20	27.975.128,80	69.937.822,00	38.907.892,00	108.845.714,00	32.653.714,20	7.183.817,12
7	Desa Bungaya Kangin	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
8	Desa Buana Giri	66.092.898,60	44.061.932,40	110.154.831,00	38.907.892,00	149.062.723,00	44.718.816,90	9.838.139,72
	Jumlah	501.165.811,20	334.110.540,80	835.276.352,00	311.263.136,00	1.146.539.488,00	343.961.846,40	75.671.606,21

Kecamatan Manggis

1	Desa Ulakan	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
2	Desa Manggis	76.434.415,20	50.956.276,80	127.390.692,00	38.907.892,00	166.298.584,00	49.889.575,20	10.975.706,54
3	Desa Selumbang	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
4	Desa Ngis	45.409.865,40	30.273.243,60	75.683.109,00	38.907.892,00	114.591.001,00	34.377.300,30	7.563.006,07
5	Desa Nyuhtebel	45.409.865,40	30.273.243,60	75.683.109,00	38.907.892,00	114.591.001,00	34.377.300,30	7.563.006,07
6	Desa Pesedahan	41.962.693,20	27.975.128,80	69.937.822,00	38.907.892,00	108.845.714,00	32.653.714,20	7.183.817,12
7	Desa Gegelang	52.304.209,80	34.869.473,20	87.173.683,00	38.907.892,00	126.081.575,00	37.824.472,50	8.321.383,95
8	Desa Sengkidu	45.409.865,40	30.273.243,60	75.683.109,00	38.907.892,00	114.591.001,00	34.377.300,30	7.563.006,07
9	Desa Tenganan	52.304.209,80	34.869.473,20	87.173.683,00	38.907.892,00	126.081.575,00	37.824.472,50	8.321.383,95
10	Desa Antiga	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
11	Desa Antiga Kelod	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
12	Desa Padangbai	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
	Jumlah	624.203.345,40	416.135.563,60	1.040.338.909,00	466.894.704,00	1.507.233.613,00	452.170.083,90	99.477.418,46

Kecamatan Karangasem

1	Desa Bugbug	59.198.554,20	39.465.702,80	98.664.257,00	38.907.892,00	137.572.149,00	41.271.644,70	9.079.761,83
2	Desa Tumbu	52.304.209,80	34.869.473,20	87.173.683,00	38.907.892,00	126.081.575,00	37.824.472,50	8.321.383,95
3	Desa Seraya	79.881.587,40	53.254.391,60	133.135.979,00	38.907.892,00	172.043.871,00	51.613.161,30	11.354.895,49
4	Desa Seraya Timur	66.092.898,60	44.061.932,40	110.154.831,00	38.907.892,00	149.062.723,00	44.718.816,90	9.838.139,72
5	Desa Seraya Barat	66.092.898,60	44.061.932,40	110.154.831,00	38.907.892,00	149.062.723,00	44.718.816,90	9.838.139,72
6	Desa Pertama	66.092.898,60	44.061.932,40	110.154.831,00	38.907.892,00	149.062.723,00	44.718.816,90	9.838.139,72
7	Desa Tegallinggah	52.304.209,80	34.869.473,20	87.173.683,00	38.907.892,00	126.081.575,00	37.824.472,50	8.321.383,95
8	Desa Bukit	79.881.587,40	53.254.391,60	133.135.979,00	38.907.892,00	172.043.871,00	51.613.161,30	11.354.895,49
9	Kelurahan Subagan	58.447.248,00	-	58.447.248,00	-	58.447.248,00	17.534.174,40	3.857.518,37
10	Kelurahan Padangkerta	58.447.248,00	-	58.447.248,00	-	58.447.248,00	17.534.174,40	3.857.518,37
11	Kelurahan Karangasem	58.447.248,00	-	58.447.248,00	-	58.447.248,00	17.534.174,40	3.857.518,37
	Jumlah	697.190.588,40	347.899.229,60	1.045.089.818,00	311.263.136,00	1.356.352.954,00	406.905.886,20	89.519.294,96

Kecamatan Abang

1	Desa Abang	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
2	Desa Ababi	76.434.415,20	50.956.276,80	127.390.692,00	38.907.892,00	166.298.584,00	49.889.575,20	10.975.706,54
3	Desa Tista	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
4	Desa Tribuana	52.304.209,80	34.869.473,20	87.173.683,00	38.907.892,00	126.081.575,00	37.824.472,50	8.321.383,95

5	Desa Culik	52.304.209,80	34.869.473,20	87.173.683,00	38.907.892,00	126.081.575,00	37.824.472,50	8.321.383,95
6	Desa Datah	83.328.759,60	55.552.506,40	138.881.266,00	38.907.892,00	177.789.158,00	53.336.747,40	11.734.084,43
7	Desa Tiyingtali	62.645.726,40	41.763.817,60	104.409.544,00	38.907.892,00	143.317.436,00	42.995.230,80	9.458.950,78
8	Desa Bunutan	69.540.070,80	46.360.047,20	115.900.118,00	38.907.892,00	154.808.010,00	46.442.403,00	10.217.328,66
9	Desa Purwakerti	52.304.209,80	34.869.473,20	87.173.683,00	38.907.892,00	126.081.575,00	37.824.472,50	8.321.383,95
10	Desa Kertamandala	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
11	Desa Labasari	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
12	Desa Nawakerti	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
13	Desa Pidpid	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
14	Desa Kesimpar	52.304.209,80	34.869.473,20	87.173.683,00	38.907.892,00	126.081.575,00	37.824.472,50	8.321.383,95
Kecamatan Kubu		821.885.414,40	547.923.609,60	1.369.809.024,00	544.710.488,00	1.914.519.512,00	574.355.853,60	126.358.287,79
1	Desa Kubu	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
2	Desa Tianyar	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
3	Desa Dukuh	45.409.865,40	30.273.243,60	75.683.109,00	38.907.892,00	114.591.001,00	34.377.300,30	7.563.006,07
4	Desa Ban	86.775.931,80	57.850.621,20	144.626.553,00	38.907.892,00	183.534.445,00	55.060.333,50	12.113.273,37
5	Desa Tianyar Barat	48.857.037,60	32.571.358,40	81.428.396,00	38.907.892,00	120.336.288,00	36.100.886,40	7.942.195,01
6	Desa Tianyar Tengah	76.434.415,20	50.956.276,80	127.390.692,00	38.907.892,00	166.298.584,00	49.889.575,20	10.975.706,54
7	Desa Tulamben	55.751.382,00	37.167.588,00	92.918.970,00	38.907.892,00	131.826.862,00	39.548.058,60	8.700.572,89
8	Desa Baturinggit	45.409.865,40	30.273.243,60	75.683.109,00	38.907.892,00	114.591.001,00	34.377.300,30	7.563.006,07
9	Desa Sukadana	62.645.726,40	41.763.817,60	104.409.544,00	38.907.892,00	143.317.436,00	42.995.230,80	9.458.950,78
Jumlah		525.892.643,40	350.595.095,60	876.487.739,00	350.171.028,00	1.226.658.767,00	367.997.630,10	80.959.478,62
JUMLAH TOTAL		4.629.022.068,60	2.969.120.216,40	7.598.142.285,00	2.918.091.900,00	10.516.234.185,00	3.154.870.255,50	694.071.456,21

Lampiran Keputusan Bupati Karangasem
No.147 Tahun 2008 - Tanggal 19 Maret 2008
Penetapan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
Tahun Anggaran 2008

No.	Desa/Kecamatan	Dana Perimbangan		Total 100%	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Jumlah Total	Dana Operasional Desa	BPD Dari Dana Operasional Desa
		60%	40%					
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7 = (5+6)	8 = (30%*7)	9 = (22%*8)
Kecamatan Rendang								
1	Desa Rendang	113.380.720,10	150.031.167,90	263.411.888,00	55.925.906,00	319.337.794,00	95.801.338,20	21.076.294,40
2	Desa Pempatan	113.380.720,10	117.881.655,90	231.262.376,00	55.925.906,00	287.188.282,00	86.156.484,60	18.954.426,61
3	Desa Besakih	113.380.720,10	117.881.655,90	231.262.376,00	55.925.906,00	287.188.282,00	86.156.484,60	18.954.426,61
4	Desa Pesaban	113.380.720,10	42.866.056,90	156.246.777,00	55.925.906,00	212.172.683,00	63.651.804,90	14.003.397,08
5	Desa Nongan	113.380.720,10	150.031.198,90	263.411.919,00	55.925.906,00	319.337.825,00	95.801.347,50	21.076.296,45
6	Desa Menanga	113.380.720,10	85.732.112,90	199.112.833,00	55.925.906,00	255.038.739,00	76.511.621,70	16.832.556,77
	Jumlah	680.284.320,60	664.423.848,40	1.344.708.169,00	335.555.436,00	1.680.263.605,00	504.079.081,50	110.897.397,93
Kecamatan Selat								
1	Desa Selat	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.907,00	233.605.712,00	70.081.713,60	15.417.976,99
2	Desa Duda	113.380.720,10	85.732.112,90	199.112.833,00	55.925.907,00	255.038.740,00	76.511.622,00	16.832.556,84
3	Desa Muncan	113.380.720,10	139.314.683,90	252.695.404,00	55.925.907,00	308.621.311,00	92.586.393,30	20.369.006,53
4	Desa Sebudi	113.380.720,10	107.165.141,90	220.545.862,00	55.925.907,00	276.471.769,00	82.941.530,70	18.247.136,75
5	Desa Duda Timur	113.380.720,10	96.448.627,90	209.829.348,00	55.925.907,00	265.755.255,00	79.726.576,50	17.539.846,83
6	Desa Duda Utara	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.907,00	233.605.712,00	70.081.713,60	15.417.976,99
7	Desa Peringsari	113.380.720,10	107.165.141,90	220.545.862,00	55.925.907,00	276.471.769,00	82.941.530,70	18.247.136,75
8	Desa Amerta Bhuana	113.380.720,10	42.866.056,90	156.246.777,00	55.925.907,00	212.172.684,00	63.651.805,20	14.003.397,14
	Jumlah	907.045.760,80	707.289.935,20	1.614.335.696,00	447.407.256,00	2.061.742.952,00	618.522.885,60	136.075.034,83
Kecamatan Sidemen								
1	Desa Sidemen	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.907,00	222.889.198,00	66.866.759,40	14.710.687,07
2	Desa Talibeng	113.380.720,10	85.732.112,90	199.112.833,00	55.925.907,00	255.038.740,00	76.511.622,00	16.832.556,84
3	Desa Tangkup	113.380.720,10	42.866.056,90	156.246.777,00	55.925.907,00	212.172.684,00	63.651.805,20	14.003.397,14
4	Desa Wisma Kerta	113.380.720,10	21.433.032,90	134.813.753,00	55.925.907,00	190.739.660,00	57.221.898,00	12.588.817,56
5	Desa Sangkan Gunung	113.380.720,10	96.448.627,90	209.829.348,00	55.925.907,00	265.755.255,00	79.726.576,50	17.539.846,83
6	Desa Telaga Tawang	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.907,00	222.889.198,00	66.866.759,40	14.710.687,07
7	Desa Tri Eka Buana	113.380.720,10	32.149.541,90	145.530.262,00	55.925.907,00	201.456.169,00	60.436.850,70	13.296.107,15
8	Desa Kerta Buana	113.380.720,10	42.866.056,90	156.246.777,00	55.925.907,00	212.172.684,00	63.651.805,20	14.003.397,14
9	Desa Sinduwati	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.907,00	222.889.198,00	66.866.759,40	14.710.687,07
10	Desa Lokasari	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.907,00	233.605.712,00	70.081.713,60	15.417.976,99
	Jumlah	1.133.807.201,00	546.542.227,00	1.680.349.428,00	559.259.070,00	2.239.608.498,00	671.882.549,40	147.814.160,87

Kecamatan Bebandem

1	Desa Bebandem	113.380.720,10	128.598.169,90	241.978.890,00	55.925.907,00	297.904.797,00	89.371.439,10	19.661.716,60
2	Desa Bungaya	113.380.720,10	75.015.598,90	188.396.319,00	55.925.907,00	244.322.226,00	73.296.667,80	16.125.266,92
3	Desa Budakeling	113.380.720,10	85.732.112,90	199.112.833,00	55.925.907,00	255.038.740,00	76.511.622,00	16.832.556,84
4	Desa Jungutan	113.380.720,10	128.598.169,90	241.978.890,00	55.925.907,00	297.904.797,00	89.371.439,10	19.661.716,60
5	Desa Sibetan	113.380.720,10	107.165.141,90	220.545.862,00	55.925.907,00	276.471.769,00	82.941.530,70	18.247.136,75
6	Desa Macang	113.380.720,10	21.433.032,90	134.813.753,00	55.925.907,00	190.739.660,00	57.221.898,00	12.588.817,56
7	Desa Bungaya Kangin	113.380.720,10	42.866.085,90	156.246.806,00	55.925.907,00	212.172.713,00	63.651.813,90	14.003.399,06
8	Desa Buana Giri	113.380.720,10	96.448.627,90	209.829.348,00	55.925.907,00	265.755.255,00	79.726.576,50	17.539.846,83
	Jumlah	907.045.760,80	685.856.940,20	1.592.902.701,00	447.407.256,00	2.040.309.957,00	612.092.987,10	134.660.457,16
Kecamatan Manggis								
1	Desa Ulakan	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.907,00	233.605.712,00	70.081.713,60	15.417.976,99
2	Desa Manggis	113.380.720,10	128.598.169,90	241.978.890,00	55.925.907,00	297.904.797,00	89.371.439,10	19.661.716,60
3	Desa Selumbung	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.907,00	233.605.712,00	70.081.713,60	15.417.976,99
4	Desa Ngis	113.380.720,10	32.149.541,90	145.530.262,00	55.925.907,00	201.456.169,00	60.436.850,70	13.296.107,15
5	Desa Nyuhtebel	113.380.720,10	32.149.541,90	145.530.262,00	55.925.907,00	201.456.169,00	60.436.850,70	13.296.107,15
6	Desa Pesedahan	113.380.720,10	21.433.032,90	134.813.753,00	55.925.907,00	190.739.660,00	57.221.898,00	12.588.817,56
7	Desa Gegelang	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.907,00	222.889.198,00	66.866.759,40	14.710.687,07
8	Desa Sengkidu	113.380.720,10	32.149.541,90	145.530.262,00	55.925.907,00	201.456.169,00	60.436.850,70	13.296.107,15
9	Desa Tenganan	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.907,00	222.889.198,00	66.866.759,40	14.710.687,07
10	Desa Antiga	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.907,00	233.605.712,00	70.081.713,60	15.417.976,99
11	Desa Antiga Kelod	113.380.720,10	42.866.056,90	156.246.777,00	55.925.907,00	212.172.684,00	63.651.805,20	14.003.397,14
12	Desa Padangbai	113.380.720,10	42.866.056,90	156.246.777,00	55.925.907,00	212.172.684,00	63.651.805,20	14.003.397,14
	Jumlah	1.360.568.641,20	632.274.338,80	1.992.842.980,00	671.110.884,00	2.663.953.864,00	799.186.159,20	175.820.955,02
Kecamatan Karangasem								
1	Desa Bugbug	113.380.720,10	75.015.598,90	188.396.319,00	55.925.907,00	244.322.226,00	73.296.667,80	16.125.266,92
2	Desa Tumbu	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.907,00	222.889.198,00	66.866.759,40	14.710.687,07
3	Desa Seraya	113.380.720,10	139.314.683,90	252.695.404,00	55.925.907,00	308.621.311,00	92.586.393,30	20.369.006,53
4	Desa Seraya Timur	113.380.720,10	96.448.627,90	209.829.348,00	55.925.907,00	265.755.255,00	79.726.576,50	17.539.846,83
5	Desa Seraya Barat	113.380.720,10	96.448.627,90	209.829.348,00	55.925.907,00	265.755.255,00	79.726.576,50	17.539.846,83
6	Desa Pertima	113.380.720,10	96.448.627,90	209.829.348,00	55.925.907,00	265.755.255,00	79.726.576,50	17.539.846,83
7	Desa Tegallingah	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.907,00	222.889.198,00	66.866.759,40	14.710.687,07
8	Desa Bukit	113.380.720,10	139.314.683,90	252.695.404,00	55.925.907,00	308.621.311,00	92.586.393,30	20.369.006,53
9	Kelurahan Subagan	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelurahan Padangkerta	-	-	-	-	-	-	-
11	Kelurahan Karangasem	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	907.045.760,80	750.155.992,20	1.657.201.753,00	447.407.256,00	2.104.609.009,00	631.382.702,70	138.904.194,59
Kecamatan Abang								
1	Desa Abang	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.906,00	233.605.711,00	70.081.713,30	15.417.976,93
2	Desa Ababi	113.380.720,10	128.598.169,90	241.978.890,00	55.925.906,00	297.904.796,00	89.371.438,80	19.661.716,54
3	Desa Tista	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.906,00	233.605.711,00	70.081.713,30	15.417.976,93

4	Desa Tribuana	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.906,00	222.889.197,00	66.866.759,10	14.710.687,00
5	Desa Culik	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.906,00	222.889.197,00	66.866.759,10	14.710.687,00
6	Desa Datah	113.380.720,10	150.031.198,90	263.411.919,00	55.925.906,00	319.337.825,00	95.801.347,50	21.076.296,45
7	Desa Tiyingtali	113.380.720,10	85.732.112,90	199.112.833,00	55.925.906,00	255.038.739,00	76.511.621,70	16.832.556,77
8	Desa Bunutan	113.380.720,10	107.165.141,90	220.545.862,00	55.925.906,00	276.471.768,00	82.941.530,40	18.247.136,69
9	Desa Purwakerti	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.906,00	222.889.197,00	66.866.759,10	14.710.687,00
10	Desa Kertamandala	113.380.720,10	42.866.056,90	156.246.777,00	55.925.906,00	212.172.683,00	63.651.804,90	14.003.397,08
11	Desa Labasari	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.906,00	233.605.711,00	70.081.713,30	15.417.976,93
12	Desa Nawakerti	113.380.720,10	42.866.056,90	156.246.777,00	55.925.906,00	212.172.683,00	63.651.804,90	14.003.397,08
13	Desa Pidpid	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.906,00	233.605.711,00	70.081.713,30	15.417.976,93
14	Desa Kesimpar	113.380.720,10	53.582.570,90	166.963.291,00	55.925.906,00	222.889.197,00	66.866.759,10	14.710.687,00
	Jumlah	1.587.330.081,40	1.028.785.360,60	2.616.115.442,00	782.962.684,00	3.399.078.126,00	1.019.723.437,80	224.339.156,32
Kecamatan Kubu								
1	Desa Kubu	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.906,00	233.605.711,00	70.081.713,30	15.417.976,93
2	Desa Tianyar	113.380.720,10	42.866.056,90	156.246.777,00	55.925.906,00	212.172.683,00	63.651.804,90	14.003.397,08
3	Desa Dukuh	113.380.720,10	32.149.541,90	145.530.262,00	55.925.906,00	201.456.168,00	60.436.850,40	13.296.107,09
4	Desa Ban	113.380.720,10	160.747.712,90	274.128.433,00	55.925.906,00	330.054.339,00	99.016.301,70	21.783.586,37
5	Desa Tianyar Barat	113.380.720,10	42.866.056,90	156.246.777,00	55.925.906,00	212.172.683,00	63.651.804,90	14.003.397,08
6	Desa Tianyar Tengah	113.380.720,10	128.598.169,90	241.978.890,00	55.925.906,00	297.904.796,00	89.371.438,80	19.661.716,54
7	Desa Tulamben	113.380.720,10	64.299.084,90	177.679.805,00	55.925.906,00	233.605.711,00	70.081.713,30	15.417.976,93
8	Desa Baturinggit	113.380.720,10	32.149.541,90	145.530.262,00	55.925.906,00	201.456.168,00	60.436.850,40	13.296.107,09
9	Desa Sukadana	113.380.720,10	85.732.112,90	199.112.833,00	55.925.906,00	255.038.739,00	76.511.621,70	16.832.556,77
	Jumlah	1.020.426.480,90	653.707.363,10	1.674.133.844,00	503.333.154,00	2.177.466.998,00	653.240.099,40	143.712.821,87
JUMLAH TOTAL		8.503.554.007,50	5.669.036.005,50	14.172.590.013,00	4.194.442.996,00	18.367.033.009,00	5.510.109.902,70	1.212.224.178,59

Lampiran Keputusan Bupati Karangasem
No.248 Tahun 2009 - Tanggal 8 April 2009
Penetapan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
Tahun Anggaran 2009

No.	Desa/Kecamatan	Dana Perimbangan		Total 100%	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Jumlah Total	Dana Operasional Desa	BPD Dari Dana Operasional Desa
		60%	40%					
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7 = (5+6)	8 = (30%*7)	9 = (22%*8)
Kecamatan Rendang								
1	Desa Rendang	51.127.494,00	67.654.524,00	118.782.018,00	73.748.560,00	192.530.578,00	57.759.173,40	12.707.018,15
2	Desa Pempatan	51.127.494,00	53.157.126,00	104.284.620,00	73.748.560,00	178.033.180,00	53.409.954,00	11.750.189,88
3	Desa Besakih	51.127.494,00	53.157.126,00	104.284.620,00	73.748.560,00	178.033.180,00	53.409.954,00	11.750.189,88
4	Desa Pesaban	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
5	Desa Nongan	51.127.494,00	67.654.524,00	118.782.018,00	73.748.560,00	192.530.578,00	57.759.173,40	12.707.018,15
6	Desa Menanga	51.127.494,00	38.659.728,00	89.787.222,00	73.748.560,00	163.535.782,00	49.060.734,60	10.793.361,61
	Jumlah	306.764.964,00	299.612.892,00	606.377.856,00	442.491.360,00	1.048.869.216,00	314.660.764,80	69.225.368,26
Kecamatan Selat								
1	Desa Selat	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
2	Desa Duda	51.127.494,00	38.659.728,00	89.787.222,00	73.748.560,00	163.535.782,00	49.060.734,60	10.793.361,61
3	Desa Muncan	51.127.494,00	62.822.058,00	113.949.552,00	73.748.560,00	187.698.112,00	56.309.433,60	12.388.075,39
4	Desa Sebudi	51.127.494,00	48.324.660,00	99.452.154,00	73.748.560,00	173.200.714,00	51.960.214,20	11.431.247,12
5	Desa Duda Timur	51.127.494,00	43.492.194,00	94.619.688,00	73.748.560,00	168.368.248,00	50.510.474,40	11.112.304,37
6	Desa Duda Utara	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
7	Desa Peringsari	51.127.494,00	48.324.660,00	99.452.154,00	73.748.560,00	173.200.714,00	51.960.214,20	11.431.247,12
8	Desa Amerta Bhuana	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
	Jumlah	409.019.952,00	318.942.756,00	727.962.708,00	589.988.480,00	1.317.951.188,00	395.385.356,40	86.984.778,41
Kecamatan Sidemen								
1	Desa Sidemen	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34
2	Desa Talibeng	51.127.494,00	38.659.728,00	89.787.222,00	73.748.560,00	163.535.782,00	49.060.734,60	10.793.361,61
3	Desa Tangkup	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
4	Desa Wisma Kerta	51.127.494,00	9.571.015,49	60.698.509,49	73.748.560,00	134.447.069,49	40.334.120,85	8.873.506,59
5	Desa Sangkan Gunung	51.127.494,00	43.492.124,00	94.619.618,00	73.748.560,00	168.368.178,00	50.510.453,40	11.112.299,75
6	Desa Telaga Tawang	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34
7	Desa Tri Eka Buana	51.127.494,00	14.497.398,00	65.624.892,00	73.748.560,00	139.373.452,00	41.812.035,60	9.198.647,83
8	Desa Kerta Buana	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
9	Desa Sinduwati	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34
10	Desa Lokasari	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
	Jumlah	511.274.940,00	246.361.779,49	757.636.719,49	737.485.600,00	1.495.122.319,49	448.536.695,85	98.678.073,09
Kecamatan Bebandem								
1	Desa Bebandem	51.127.494,00	57.989.592,00	109.117.086,00	73.748.560,00	182.865.646,00	54.859.693,80	12.069.132,64

2	Desa Bungaya	51.127.494,00	33.825.162,00	84.952.656,00	73.748.560,00	158.701.216,00	47.610.364,80	10.474.280,26
3	Desa Budakeling	51.127.494,00	38.659.728,00	89.787.222,00	73.748.560,00	163.535.782,00	49.060.734,60	10.793.361,61
4	Desa Jungutan	51.127.494,00	57.989.592,00	109.117.086,00	73.748.560,00	182.865.646,00	54.859.693,80	12.069.132,64
5	Desa Sibetan	51.127.494,00	48.324.660,00	99.452.154,00	73.748.560,00	173.200.714,00	51.960.214,20	11.431.247,12
6	Desa Macang	51.127.494,00	9.476.688,00	60.604.182,00	73.748.560,00	134.352.742,00	40.305.822,60	8.867.280,97
7	Desa Bungaya Kangin	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
8	Desa Buana Giri	51.127.494,00	43.492.194,00	94.619.688,00	73.748.560,00	168.368.248,00	50.510.474,40	11.112.304,37
	Jumlah	409.019.952,00	309.087.480,00	718.107.432,00	589.988.480,00	1.308.095.912,00	392.428.773,60	86.334.330,19

Kecamatan Manggis

1	Desa Ulakan	51.127.494,00	57.989.592,00	109.117.086,00	73.748.560,00	182.865.646,00	54.859.693,80	12.069.132,64
2	Desa Manggis	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
3	Desa Selumbang	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
4	Desa Ngis	51.127.494,00	14.497.388,00	65.624.882,00	73.748.560,00	139.373.442,00	41.812.032,60	9.198.647,17
5	Desa Nyuhtebebel	51.127.494,00	14.497.388,00	65.624.882,00	73.748.560,00	139.373.442,00	41.812.032,60	9.198.647,17
6	Desa Pesedahan	51.127.494,00	9.571.423,49	60.698.917,49	73.748.560,00	134.447.477,49	40.334.243,25	8.873.533,51
7	Desa Gegelang	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34
8	Desa Sengkidu	51.127.494,00	14.497.388,00	65.624.882,00	73.748.560,00	139.373.442,00	41.812.032,60	9.198.647,17
9	Desa Tenganan	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34
10	Desa Antiga	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
11	Desa Antiga Kelod	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
12	Desa Padangbai	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
	Jumlah	613.529.928,00	285.021.955,49	898.551.883,49	884.982.720,00	1.783.534.603,49	535.060.381,05	117.713.283,83

Kecamatan Karangasem

1	Desa Bugbug	51.127.494,00	33.827.262,00	84.954.756,00	73.748.560,00	158.703.316,00	47.610.994,80	10.474.418,86
2	Desa Tumbu	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34
3	Desa Seraya	51.127.494,00	62.822.058,00	113.949.552,00	73.748.560,00	187.698.112,00	56.309.433,60	12.388.075,39
4	Desa Seraya Timur	51.127.494,00	43.492.194,00	94.619.688,00	73.748.560,00	168.368.248,00	50.510.474,40	11.112.304,37
5	Desa Seraya Barat	51.127.494,00	43.492.194,00	94.619.688,00	73.748.560,00	168.368.248,00	50.510.474,40	11.112.304,37
6	Desa Pertama	51.127.494,00	43.492.194,00	94.619.688,00	73.748.560,00	168.368.248,00	50.510.474,40	11.112.304,37
7	Desa Tegallinggah	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34
8	Desa Bukit	51.127.494,00	62.822.058,00	113.949.552,00	73.748.560,00	187.698.112,00	56.309.433,60	12.388.075,39
9	Kelurahan Subagan	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelurahan Padangkerta	-	-	-	-	-	-	-
11	Kelurahan Karangasem	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	409.019.952,00	338.272.620,00	747.292.572,00	589.988.480,00	1.337.281.052,00	401.184.315,60	88.260.549,43

Kecamatan Abang

1	Desa Abang	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
2	Desa Ababi	51.127.494,00	57.989.592,00	109.117.086,00	73.748.560,00	182.865.646,00	54.859.693,80	12.069.132,64
3	Desa Tista	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
4	Desa Tribuana	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34

5	Desa Culik	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34
6	Desa Datah	51.127.494,00	67.654.524,00	118.782.018,00	73.748.560,00	192.530.578,00	57.759.173,40	12.707.018,15
7	Desa Tiyingtali	51.127.494,00	38.659.728,00	89.787.222,00	73.748.560,00	163.535.782,00	49.060.734,60	10.793.361,61
8	Desa Bunutan	51.127.494,00	48.324.660,00	99.452.154,00	73.748.560,00	173.200.714,00	51.960.214,20	11.431.247,12
9	Desa Purwakerti	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34
10	Desa Kertamandala	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
11	Desa Labasari	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
12	Desa Nawakerti	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
13	Desa Pidpid	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
14	Desa Kesimpar	51.127.494,00	24.162.330,00	75.289.824,00	73.748.560,00	149.038.384,00	44.711.515,20	9.836.533,34
	Jumlah	715.784.916,00	463.916.736,00	1.179.701.652,00	1.032.479.840,00	2.212.181.492,00	663.654.447,60	146.003.978,47
Kecamatan Kubu								
1	Desa Kubu	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
2	Desa Tianyar	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
3	Desa Dukuh	51.127.494,00	14.497.398,00	65.624.892,00	73.748.560,00	139.373.452,00	41.812.035,60	9.198.647,83
4	Desa Ban	51.127.494,00	72.864.990,00	123.992.484,00	73.748.560,00	197.741.044,00	59.322.313,20	13.050.908,90
5	Desa Tianyar Barat	51.127.494,00	19.329.864,00	70.457.358,00	73.748.560,00	144.205.918,00	43.261.775,40	9.517.590,59
6	Desa Tianyar Tengah	51.127.494,00	57.989.592,00	109.117.086,00	73.748.560,00	182.865.646,00	54.859.693,80	12.069.132,64
7	Desa Tulamben	51.127.494,00	28.994.796,00	80.122.290,00	73.748.560,00	153.870.850,00	46.161.255,00	10.155.476,10
8	Desa Baturinggit	51.127.494,00	14.497.398,00	65.624.892,00	73.748.560,00	139.373.452,00	41.812.035,60	9.198.647,83
9	Desa Sukadana	51.127.494,00	38.659.728,00	89.787.222,00	73.748.560,00	163.535.782,00	49.060.734,60	10.793.361,61
	Jumlah	460.147.446,00	295.158.426,00	755.305.872,00	663.737.040,00	1.419.042.912,00	425.712.873,60	93.656.832,19
JUMLAH TOTAL		3.834.562.050,00	2.556.374.644,98	6.390.936.694,98	5.531.142.000,00	11.922.078.694,98	3.576.623.608,49	786.857.193,87

Alokasi Dana Desa Kabupaten Karangasem

Tahun 2007-2009

No.	Keterangan	Desa Penelitian			
		Desa Pempatan	Desa Selat	Desa Bebandem	Desa Tenganan
Tahun 2007					
1	Pembagian Merata (60%) ADDM	72.987.243,00	55.751.382,00	76.434.415,20	52.304.209,80
2	Pembagian Proporsional (40%) ADDP	48.658.162,00	37.167.588,00	50.956.276,80	34.869.473,20
3	Jumlah Total ADD	121.645.405,00	92.918.970,00	127.390.692,00	87.173.683,00
4	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	38.907.892,00	38.907.892,00	38.907.892,00	38.907.892,00
5	Total Dana Yang Diterima Desa	160.553.297,00	131.826.862,00	166.298.584,00	126.081.575,00
6	Pembagian Dana ADD untuk Pem Des (70%)	112.387.307,90	92.278.803,40	116.409.008,80	88.257.102,50
7	Pembagian Dana ADD untuk Operasional Desa (30%)	48.165.989,10	39.548.058,60	49.889.575,20	37.824.472,50
8	Pembagian Dana ADD untuk BPD (22% dari OD)	10.596.517,60	8.700.572,89	10.975.706,54	8.321.383,95
9	Total ADD Se Kabupaten Karangasem	7.598.142.285,00	7.598.142.285,00	7.598.142.285,00	7.598.142.285,00
10	Total Bagi Hasil Pajak/Retribusi Se Kab. Kr.As.	2.918.091.900,00	2.918.091.900,00	2.918.091.900,00	2.918.091.900,00
11	Total Pembagian Dana ADD untuk BPD	694.071.456,21	694.071.456,21	694.071.456,21	694.071.456,21
Tahun 2008					
1	Pembagian Merata (60%) ADDM	113.380.720,10	113.380.720,10	113.380.720,10	113.380.720,10
2	Pembagian Proporsional (40%) ADDP	150.031.167,90	64.299.084,90	128.598.169,90	53.582.570,90
3	Jumlah Total ADD	263.411.888,00	177.679.805,00	241.978.890,00	166.963.291,00
4	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	55.925.906,00	55.925.907,00	55.925.907,00	55.925.907,00
5	Total Dana Yang Diterima Desa	319.337.794,00	233.605.712,00	297.904.797,00	222.889.198,00
6	Pembagian Dana ADD untuk Pem Des (70%)	223.536.455,80	163.523.998,40	208.533.357,90	156.022.438,60
7	Pembagian Dana ADD untuk Operasional Desa (30%)	95.801.338,20	70.081.713,60	89.371.439,10	66.866.759,40
8	Pembagian Dana ADD untuk BPD (22% dari OD)	21.076.294,40	15.417.976,99	19.661.716,60	14.710.687,07
9	Total ADD Se Kabupaten Karangasem	14.172.590.013,00	14.172.590.013,00	14.172.590.013,00	14.172.590.013,00
10	Total Bagi Hasil Pajak/Retribusi Se Kab. Kr.As.	4.194.442.996,00	4.194.442.996,00	4.194.442.996,00	4.194.442.996,00
11	Total Pembagian Dana ADD untuk BPD	1.212.224.178,59	1.212.224.178,59	1.212.224.178,59	1.212.224.178,59
Tahun 2009					
1	Pembagian Merata (60%) ADDM	51.127.494,00	51.127.494,00	51.127.494,00	51.127.494,00
2	Pembagian Proporsional (40%) ADDP	67.654.524,00	28.994.796,00	57.989.592,00	24.162.330,00
3	Jumlah Total ADD	118.782.018,00	80.122.290,00	109.117.086,00	75.289.824,00
4	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	73.748.560,00	73.748.560,00	73.748.560,00	73.748.560,00
5	Total Dana Yang Diterima Desa	192.530.578,00	153.870.850,00	182.865.646,00	149.038.384,00
6	Pembagian Dana ADD untuk Pem Des (70%)	134.771.404,60	107.709.595,00	128.005.952,20	104.326.868,80
7	Pembagian Dana ADD untuk Operasional Desa (30%)	57.759.173,40	46.161.255,00	54.859.693,80	44.711.515,20
8	Pembagian Dana ADD untuk BPD (22% dari OD)	12.707.018,15	10.155.476,10	12.069.132,64	9.836.533,34
9	Total ADD Se Kabupaten Karangasem	6.390.936.694,98	6.390.936.694,98	6.390.936.694,98	6.390.936.694,98
10	Total Bagi Hasil Pajak/Retribusi Se Kab. Kr.As.	5.531.142.000,00	5.531.142.000,00	5.531.142.000,00	5.531.142.000,00
11	Total Pembagian Dana ADD untuk BPD	786.857.193,87	786.857.193,87	786.857.193,87	786.857.193,87

DESA-DESA KABUPATEN KARANGASEM

No.	KECAMATAN								Total 186 Desa
	Kubu 40 Desa	Karangasem 22 Desa	Rendang 26 Desa	Manggis 18 Desa	Selat 26 Desa	Sidemen 19 Desa	Bebandem 14 Desa	Abang 21 Desa	
1	Kubu Junta	Jasri	Menaya	Gegeleng	Gumung	Iseh	Kastala	Poh	
2	Dukuh	Subagan	Buyan	Angantelu	Selat	Tebola	Tohpati	Sega	
3	Ban	Tampuagan	Suwukan	Padangbai	Sukaluwih	Kebung	Liligundi	Gulinten	
4	Dlundungan	Karangasem	Pejeng	Ulakan	Tengeh	Telun Wayah	Komala	Culik	
5	PanekCutcut	Susuan	Tegenan	Tanah Ampo	Santi	Sukahat	Bebandem	Tista	
6	Manikaji	Dukuh Penaban	Batusesa	Yeh Poh	Sebudi	Tohjiwa	Budekeling	Ngis	
7	Kallaga	Ujung Hyang	Pemuteran	Manggis	Lebih	Klungah	Bungaya	Purwayu	
8	Temakung	Temega	Putung	Apit Yeh	Telung Buana	Tangkup Anyar	Sibetan	Basangalas	
9	Bonyoh	Peladung	Kubakal	Selubung	Badeg Tengah	Tabu	Jungsi	Ababi	
10	Belong Batukau	Padangkerta	Pule	Bukit Catu	Ancut	Tangkup Desa	Macang	Tanah Aji	
11	Pucang	Kertasari	Teges	Ngis	Sogra	Sangkungan	Nangka	Kesimpar	
12	Daya	Timbrah	Pempatan	Pekarangan	Yeha	Sangkan Gunung	Sakem	Datah	
13	Jatituhu	Asak	Alas Ngandang	Tenganan Dauh T	Pura	Sanggem	Tanah Aron	Kedampal	
14	Bunga	Perasi	Waringin	Tenganan Pegringsingan	Muncan	Dukuh	Umanyar	Tiyingtali	
15	Cegi	Tumbu	Guliang	Buitan	Padangaji	Mijil		Gamongan	
16	Pengalusan	Bukit	Besakih	Pesedahan	Taman Darma	Ipah		Tauka	
17	Perasan	Sekar Gunung	Tarib	Nyuh Tebel	Umacetra	Wangsean		Tumingal	
18	Tianyar	Bugbug	Tukad Belah	Sengkidu	Duda	Lebu		Linggawana	
19	Paleg Kaja	Seraya	Tembukus		Padang Tunggal	Delud Yeh		Benayu	
20	Pengiyahan	Dukuh	Kesipar		Putung			Tukad Besi	
21	Pedahan Kaja	Batu Gunung	Rendang		Pateh			Peselatan	
22	Pedahan Kelod	Jumenang	Pedukuhan		Geriana Kauh				
23	Karobelahan		Nogan		Geriana Kangin				
24	Munti Gunung		Pesaban		Karangsari				
25	Bantu Ringgit		Buk Cabe		Sebun				
26	Bantas		Segah		Bukit Gajah				
27	Kayuaya								
28	Bukit								
29	Lebah								
30	Karang Sari								
31	Tigaron								
32	Batudana								
33	Tulamben								
34	Muntig								
35	Beluhu								
36	Nusu								
37	Paled Kelod								
38	Belong Piugom								
39	Asti								
40	Darmaji								

DATA-DATA DESA X KABUPATEN Y

No.	Data-Data Desa X Kabupaten Y	Nilai Data
1	Pajak Daerah Kabupaten Y	Rp. 52.000.000.000
2	Retribusi Daerah	Rp. 48.703.130.000
3	Dana Perimbangan DAU/DAK	Rp. 802.000.000.000
4	Dana Perimbangan Propinsi	Rp. 84.198.000.000
5	Jumlah Keluarga Miskin Desa X	1.580 orang
6	Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Y	93.600 orang
7	Jumlah Anak < 9 tahun Desa X	20 orang
8	Jumlah Anak < 9 tahun Kabupaten Y	6.592 orang
9	Jumlah Penderita Penyakit Menular Desa X	3 orang
10	Jumlah Penderita Penyakit Menular Kabupaten Y	4.708 orang
11	Jarak Ibukota Desa X ke Ibukota Kabupaten Y	10 km
12	Rata-rata Keterjangkauan Desa ke Kabupaten Y	10,707 km
13	Jumlah Penduduk Desa X	4.841 orang
14	Jumlah Penduduk Kabupaten Y	3.900.928 orang
15	Luas Wilayah Desa X	5 km ²
16	Luas Wilayah Kabupaten Y	3.073 km ²
17	Jumlah PBB Yang Disetor Desa X	Rp. 24.580.740
18	Jumlah Total PBB Kabupaten	Rp. 4.429.000.000

Dari Penetapan Kabupaten Diketahui :

Σ ADDM	=	60% dari Σ ADD
Σ ADDP	=	40% dari Σ ADD
Σ Desa di Kabupaten Y	=	440 desa

LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN ADD DESA X KABUPATEN Y

I. TENTUKAN BOBOT VARIABEL UTAMA

Jenis Variabel	Kode	Bobot	Nilai
Variabel Kemiskinan	a1	4	0,286
Variabel Pendidikan Dasar	a2	3	0,214
Variabel Kesehatan	a3	3	0,214
Variabel Keterjangkauan	a4	1	0,071
Variabel Jumlah Penduduk	a5	1	0,071
Variabel Luas Wilayah	a6	1	0,071
Variabel PBB Desa	a7	1	0,071
		14	1,000

II MENGHITUNG JUMLAH ADD KABUPATEN Y

Matrik Perhitungan ADD Keseluruhan di Kabupaten Y Tahun 2009					[x Rp. 1.000.000]
Uraian	%	Pendapatan	Belanja Pegawai	Sisa	Jumlah ADD
Bagi hasil pajak	10%	52.000,00			5.200,000
Dana Perimbangan Pusat	10%	802.000,00	553.837,64	248.162,36	24.816,236
Retribusi	10%	48.707,13			4.870,713
Dana Perimbangan Propinsi	10%	84.198,00			8.419,800
Total		986.905,13			43.306,749

Jadi Σ ADD Kabupaten Y atau dana perimbangan yang dialokasikan ke seluruh desa kabupaten Y = **Rp. 43.306.749**

III MENGHITUNG BESARNYA ADDM DAN ADDP

$$\Sigma \text{ ADD} = 43.306.749.000$$

$$\begin{aligned} \text{ADDM se Kabupaten Y } (\Sigma \text{ ADDM Kab Y}) &= 60\% \times \Sigma \text{ ADD} \\ &= 0.6 \times 43.306.749.000 \\ &= \mathbf{25.984.049.400} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ADDM Desa X } (\Sigma \text{ ADDM Desa X}) &= \Sigma \text{ ADDM Kab Y} / \Sigma \text{ Desa} \\ &= 25.984.049 / 440 \text{ desa} \\ &= \mathbf{59.054.657,73} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ADDP se Kabupaten Y } (\Sigma \text{ ADDP}) &= 40\% \times \Sigma \text{ ADD} \\ &= 0.4 \times 43.306.749.000 \\ &= \mathbf{17.322.699.600} \end{aligned}$$

IV PERHITUNGAN KOEFISIEN VARIABEL

$$\begin{aligned} \text{Koefisien Variabel Kemiskinan } (\text{KV1}) &= \frac{\text{jumlah orang miskin desa X}}{\text{jumlah orang miskin kabupaten Y}} \\ &= 1.580/93.600 \\ &= \mathbf{0,01688} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Koefisien Variabel Pendidikan } (\text{KV2}) &= \frac{\text{jumlah anak < 9 tahun desa X}}{\text{jumlah anak < 9 tahun kabupaten Y}} \\ &= 20/6.592 \\ &= \mathbf{0,00303} \end{aligned}$$

$$\text{Koefisien Variabel Kesehatan } (\text{KV3}) = \frac{\text{jumlah penderita penyakit menular desa X}}{\text{jumlah penderita penyakit menular kabupaten Y}}$$

$$= 3 / 4.708$$

$$= \mathbf{0,00064}$$

Koefisien Variabel Keterjangkauan

(KV4)

$$= \frac{\text{jarak ibukota desa X ke ibukota Kabupaten Y}}{\text{rata-rata keterjangkauan desa ke kabupaten Y}}$$

$$= 10 / 10.707$$

$$= \mathbf{0,00093}$$

Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

(KV5)

$$= \frac{\text{jumlah penduduk desa X}}{\text{jumlah penduduk kabupaten Y}}$$

$$= 4.841 / 3.900.928$$

$$= \mathbf{0,00124}$$

Koefisien Variabel Luas Wilayah

(KV6)

$$= \frac{\text{Luas Wilayah Desa X}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Y}}$$

$$= 5 \text{ km}^2 / 3.073,7 \text{ km}^2$$

$$= \mathbf{0,00163}$$

Koefisien Variabel Jumlah PBB Yang Disetor

(KV7)

$$= \frac{\text{jumlah PBB yang disetor desa X}}{\text{jumlah total PBB kabupaten Y}}$$

$$= 24.580.740 / 4.429.000.000$$

$$= \mathbf{0,00555}$$

V PERHITUNGAN BOBOT DESA X (BDX) dan ADDP Desa X

BD desa X (BDx)

$$= \Sigma (\text{Angka Bobot} \times \text{Koefisien Variabel})$$

$$= (a1 \times KV1) + (a2 \times KV2) + (a3 \times KV3) + (a4 \times KV4) + (a5 \times KV5) + (a6 \times KV6) + (a7 \times KV7)$$

$$= [(0.286 \times 0.01688) + (0.214 \times 0.00303) + (0.214 \times 0.00064) + (0.071 \times 0.00093) + (0.071 \times 0.00124) + (0.071 \times 0.00163) + (0.071 \times 0.00555)]$$

$$= \mathbf{0,006277}$$

ADDPx

$$= \text{BDx} \times (\Sigma \text{ADD} - \Sigma \text{ADDM})$$

$$= \text{BDx} \times (\Sigma \text{ADDP})$$

$$= 0.006277 \times 17.322.699.600$$

$$= \mathbf{108.734.585}$$

VI PERHITUNGAN JUMLAH ADD DESA X

ADDx

$$= \text{ADDMx} + \text{ADDPx}$$

$$= 59.054.657,73 + 108.734.585$$

$$= \mathbf{167.789.242,73}$$

Jadi ADD yang diterima Desa X adalah Rp. 167.789.242,73

Efektifitas penyaluran..., Didiek Setiabudi Hargono, FE UI, 2010.

DATA-DATA DESA X KABUPATEN Y

No.	Data-Data Desa X Kabupaten Y	Satuan	Desa			
			Desa Tenganan Kec. Manggis	Desa Bebandem Kec. Bebandem	Desa Selat Kec. Selat	Desa Pempatan Kec. Rendang
1	Pajak Daerah Kabupaten Y	Rp.				
2	Retribusi Daerah	Rp.				
3	Dana Perimbangan DAU/DAK	Rp.				
4	Dana Perimbangan Propinsi	Rp.				
5	Jumlah Keluarga Miskin Desa X	orang				
6	Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Y	orang				
7	Jumlah Anak < 9 tahun Desa X	orang				
8	Jumlah Anak < 9 tahun Kabupaten Y	orang				
9	Jumlah Penderita Penyakit Menular Desa X	orang				
10	Jumlah Penderita Penyakit Menular Kabupaten Y	orang				
11	Jarak Ibukota Desa X ke Ibukota Kabupaten Y	km				
12	Rata-rata Keterjangkauan Desa ke Kabupaten Y	km				
13	Jumlah Penduduk Desa X	orang				
14	Jumlah Penduduk Kabupaten Y	orang				
15	Luas Wilayah Desa X	km ²				
16	Luas Wilayah Kabupaten Y	km ²				
17	Jumlah PBB Yang Disetor Desa X	Rp.				
18	Jumlah Total PBB Kabupaten	Rp.				

Dari Penetapan Kabupaten Diketahui :

Σ ADDM	=	60% dari Σ ADD
Σ ADDP	=	40% dari Σ ADD
Σ Desa di Kabupaten Y	=	440 desa

Lampiran 8 . Cara Perhitungan "Williamson Index "

Rumus :

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \times (ni/N)}}{Y}$$

- Iw** = Indeks Kesenjangan Williamson
Yi = PDRB Per Kapita Kecamatan ke-i
Y = PDRB Per Kapita Kabupaten Karangasem
ni = Jumlah Penduduk kecamatan ke-i
N = Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem

Tahun 2004

Kecamatan	Yi	Y	ni	N	Yi-Y	(Yi-Y)2	ni/N	(Yi-Y)2 * ni/N	S (Yi-Y)2*ni/N	V S (Yi-Y)2*ni/N	{V (S (Yi-Y)2*ni/N)}/Y
Kubu	2.266,24	3.435,91	62.769	389.576	#####	1.368.118,34	0,161	220.433,04	1.684.259,71	1.297,79	0,378
Selat	3.342,88		36.456		-93,03	8.654,89	0,094	809,91			
Bebandem	3.125,84		42.674		-310,07	96.141,51	0,110	10.531,30			
Abang	2.590,17		65.998		-845,74	715.271,34	0,169	121.173,99			
Karangasem	4.497,88		72.146		1.061,97	1.127.779,47	0,185	208.854,70			
Manggis	6.295,85		45.835		2.859,94	8.179.277,68	0,118	962.321,07			
Sidemen	2.667,07		30.213		-768,84	591.119,24	0,078	45.843,39			
Rendang	2.282,78		33.485		#####	1.329.716,02	0,086	114.292,31			

Tahun 2005

Kecamatan	Yi	Y	ni	N	Yi-Y	(Yi-Y)2	ni/N	(Yi-Y)2 * ni/N	S (Yi-Y)2*ni/N	V S (Yi-Y)2*ni/N	{V (S (Yi-Y)2*ni/N)}/Y
Kubu	2.485,30	3.808,88	64.346	395.418	-1323,58	1.751.854,96	0,163	285.077,71	2.196.360,37	1.482,01	0,389
Selat	3.717,23		36.791		-91,65	8.399,18	0,093	781,49			
Bebandem	3.511,24		42.635		-297,64	88.588,19	0,108	9.551,81			
Abang	2.909,40		66.166		-899,48	809.055,80	0,167	135.380,75			
Karangasem	5.053,40		72.729		1244,52	1.548.822,26	0,184	284.873,97			
Manggis	7.081,75		46.019		3272,87	10.711.654,21	0,116	1.246.629,17			
Sidemen	2.797,76		32.258		-1011,12	1.022.360,72	0,082	83.403,67			
Rendang	2.494,31		34.474		-1314,57	1.728.096,18	0,087	150.661,80			

Tahun 2006

Kecamatan	Yi	Y	ni	N	Yi-Y	(Yi-Y)2	ni/N	(Yi-Y)2 * ni/N	S (Yi-Y)2*ni/N	V S (Yi-Y)2*ni/N	{V (S (Yi-Y)2*ni/N)}/Y
Kubu	2.512,28	3.957,78	67.559	404.593	-1445,50	2.089.479,79	0,17	348.901,65	2.557.113,33	1.599,10	0,404
Selat	3.851,26		37.418		-106,52	11.346,80	0,09	1.049,39			
Bebandem	3.720,66		42.631		-237,12	56.224,41	0,11	5.924,23			
Abang	2.992,45		68.311		-965,33	931.867,72	0,17	157.335,44			
Karangasem	5.244,02		74.195		1286,24	1.654.403,95	0,18	303.387,60			
Manggis	7.556,61		46.235		3598,83	12.951.588,60	0,11	1.480.047,11			
Sidemen	2.886,78		33.004		-1071,00	1.147.037,94	0,08	93.567,71			
Rendang	2.573,53		35.241		-1384,25	1.916.138,98	0,09	166.900,20			

Tahun 2007

Kecamatan	Yi	Y	ni	N	Yi-Y	(Yi-Y)2	ni/N	(Yi-Y)2 * ni/N	S (Yi-Y)2*ni/N	V S (Yi-Y)2*ni/N	{V (S (Yi-Y)2*ni/N)}/Y
Kubu	2.642,40	4.128,79	70.718	427.481	-1486,39	2.209.345,87	0,17	365.491,15	2.862.542,58	1.691,91	0,410
Selat	4.089,89		38.469		-38,90	1.513,48	0,09	136,20			

Bebandem	3.551,56		48.989		-577,23	333.189,91	0,11	38.183,31			
Abang	3.300,91		68.294		-827,88	685.391,50	0,16	109.497,56			
Karangasem	5.078,99		84.806		950,20	902.883,16	0,20	179.118,86			
Manggis	8.332,19		46.785		4203,40	17.668.548,78	0,11	1.933.707,12			
Sidemen	3.072,37		33.803		-1056,42	1.116.025,46	0,08	88.249,56			
Rendang	2.795,29		35.617		-1333,50	1.778.226,14	0,08	148.158,82			

Tahun 2008

Kecamatan	Yi	Y	ni	N	Yi-Y	(Yi-Y) ²	ni/N	(Yi-Y) ² * ni/N	S (Yi-Y) ² *ni/N	V S (Yi-Y) ² *ni/N	{V (S (Yi-Y) ² *ni/N)} / Y
Kubu	2.746,00	4.317,67	35.786	430.251	-1571,67	2.470.134,24	0,08	205.452,69	3.307.957,05	1.818,78	0,421
Selat	4.191,55		33.958		-126,12	15.906,95	0,08	1.255,47			
Bebandem	3.699,54		47.202		-618,13	382.087,50	0,11	41.918,08			
Abang	3.460,54		84.883		-857,13	734.679,96	0,20	144.942,93			
Karangasem	5.348,53		68.428		1030,86	1.062.680,77	0,16	169.010,93			
Manggis	8.806,81		48.907		4489,14	20.152.369,77	0,11	2.290.737,15			
Sidemen	3.170,67		39.772		-1147,00	1.315.610,19	0,09	121.613,78			
Rendang	2.900,21		71.315		-1417,46	2.009.181,60	0,17	333.026,04			

"Location Quotient" Rata-rata

KABUPATEN KARANGASEM

2004-2008

No.	Lapangan Usaha	KECAMATAN							
		RENDANG	SIDEMAN	MANGGIS	KARANGASEM	ABANG	BEBANDEM	SELAT	KUBU
1	Pertanian	1,2856	1,2726	0,5675	0,8571	1,1426	1,3804	1,2834	1,5718
	a. Tanaman Bahan Makanan	1,4991	1,5578	0,5311	0,7406	0,9674	1,5938	1,4374	1,1665
	b. Tanaman Perkebunan	0,7142	0,7624	0,5314	1,0502	1,7690	1,1385	0,9318	2,6973
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,5141	1,0876	0,8031	0,7683	1,1657	1,1400	1,1726	2,3912
	d. Kehutanan	7,2224	1,0133	0,2293	0,3574	1,0754	1,2910	1,0848	0,7796
	e. Perikanan	-	-	0,5382	1,5792	1,8537	0,4756	0,5767	2,4906
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0170	-	-	0,0200	0,4769	3,1700	4,7424	6,1081
	c. Penggalian	0,0170	-	-	0,0200	0,4769	3,1700	4,7424	6,1081
3	Industri Pengolahan	1,1412	2,0896	0,3538	0,8991	1,2749	0,9973	1,9026	0,7801
	b. Industri Tanpa Migas	1,1412	2,0896	0,3538	0,8991	1,2749	0,9973	1,9026	0,7801
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,0265	1,3901	0,7696	1,1323	1,2606	2,5342	0,8402	1,7232
	a. Listrik	0,6985	1,1479	0,7979	1,3900	1,3138	3,0760	0,7531	1,8844
	c. Air Bersih	1,5511	1,7774	0,7244	0,7201	1,1754	1,6530	0,9650	1,4580
5	Bangunan	0,3150	0,2497	1,1085	1,4269	1,4495	1,9617	0,2160	0,6434
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	0,9423	0,9919	2,1608	0,5962	0,6942	0,8788	0,6699	0,7505
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,5119	1,5898	0,7024	0,9359	1,0913	1,4151	1,0748	1,1949
	b. Hotel	0,0316	0,0704	3,1278	0,7604	0,8084	0,0075	0,1158	0,3957
	c. Restoran	0,0077	0,0091	4,6213	0,0040	0,0057	0,0046	0,0063	0,0082
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,6028	0,3425	2,0547	0,6470	0,6564	1,4974	0,7574	0,8184
	a. Pengangkutan	0,5966	0,3387	2,0990	0,6068	0,6612	1,5066	0,7485	0,8170
	- Angkutan Jalan Raya	0,8245	0,4577	0,7908	0,8495	1,0323	2,4601	1,1920	1,3552
	- Angkutan Laut	-	-	4,6407	-	-	-	-	-
	- Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	-	-	4,6411	-	-	-	-	-
	- Jasa Penunjang Komunikasi	1,0860	0,6579	1,3684	1,0605	0,7275	1,2572	0,7483	0,5945
	b. Komunikasi	0,8609	0,5021	0,1943	2,3410	0,4505	1,1114	1,1390	0,8741
	- Pos dan Telekomunikasi	0,8609	0,5021	0,1943	2,3410	0,4505	1,1114	1,1390	0,8741
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1,5526	1,1443	0,6213	0,9651	1,0760	1,8500	1,2179	1,6176
	a. Bank	2,9960	0,9587	0,7641	0,6360	0,3435	3,4492	1,3974	0,87
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	2,9685	0,5506	0,5439	1,8215	0,1629	0,6085	1,3708	0,2659
	c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	3,0451	1,0220	0,7828	-	-	-
	d. Sewa Bangunan	1,3642	1,2733	0,5604	0,8706	1,2885	1,8026	1,2366	1,8469
	e. Jasa Perusahaan	0,4989	0,2758	0,4516	2,7637	0,0692	0,4574	0,6460	1,2883
9	Jasa-jasa	0,7916	0,6478	0,8790	1,5591	0,9895	0,6885	0,7755	0,8281
	a. Pemerintahan Umum	0,8368	0,6308	0,5457	1,7470	1,1536	0,6883	0,7034	0,9097
	b. Swasta	0,7235	0,6734	1,3819	1,2756	0,7418	0,6890	0,8827	0,7051
	- Sosial Kemasyarakatan	1,5555	1,3241	0,6074	0,8493	1,2507	1,5130	1,2128	1,6514
	- Hiburan dan Rekreasi	1,0500	1,1533	0,9046	1,1367	1,1785	1,2207	0,8968	0,918
	- Perorangan dan Rumahtangga	0,6811	0,6366	1,4241	1,2968	0,7120	0,6430	0,8663	0,6588